



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
DANAU TOBA TAHUN 2024 - 2044**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan pariwisata nasional;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba perlu dilakukan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh terhadap aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, investasi, lingkungan, sosial budaya, dan pengembangan wilayah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024 - 2044;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL DANAU TOBA TAHUN 2024-2044.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
3. Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah destinasi Pariwisata yang berskala nasional.
4. DPN Danau Toba adalah DPN yang meliputi kawasan strategis Pariwisata nasional Danau Toba dan sekitarnya.
5. Rencana Induk DPN Danau Toba yang selanjutnya disebut RIDPN Danau Toba adalah dokumen perencanaan pengembangan Kepariwisata terpadu di DPN Danau Toba tahun 2024-2044.
6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, badan pengelola, badan usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan RIDPN Danau Toba.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) RIDPN Danau Toba merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Danau Toba dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Kepariwisata secara terpadu di DPN Danau Toba.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pemerintah Kabupaten Toba;
 - c. Pemerintah Kabupaten Simalungun;
 - d. Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - e. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
 - f. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - g. Pemerintah Kabupaten Karo;
 - h. Pemerintah Kabupaten Dairi; dan
 - i. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 3

- (1) RIDPN Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
 - b. sasaran dan arah pengembangan;
 - c. pelaksanaan pengembangan; dan
 - d. rencana aksi.
- (2) RIDPN Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPN Danau Toba;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata;
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata; dan
- g. pengelolaan DPN Danau Toba.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2024-2044 meliputi:
 - a. tahap pertama tahun 2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima tahun 2040-2044.
- (2) Rencana aksi tahap pertama tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana aksi masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Presiden berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional, hasil evaluasi tahunan, dan peninjauan kembali pada akhir tahap.

Pasal 6

- (1) RIDPN Danau Toba dijabarkan dalam bentuk:
 - a. rencana kerja kementerian/lembaga; dan
 - b. rencana kerja pemerintah daerah pada DPN Danau Toba.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Danau Toba harus melaksanakan RIDPN Danau Toba sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Danau Toba harus memelihara dan menjaga fungsi sarana prasarana fisik yang dibangun sesuai dengan RIDPN Danau Toba.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DPN Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan DPN Danau Toba oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kawasan lindung dan daya dukung atau daya tampung kawasan wisata.

(3) Pengelolaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (3) Pengelolaan DPN Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi dan tata kelola di pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. tata kelola lingkungan dan penanggulangan bencana; dan
 - c. tata kelola sosial budaya.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan DPN Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Danau Toba dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Bupati/wali kota pada DPN Danau Toba melaporkan pelaksanaan RIDPN Danau Toba kepada Gubernur Sumatera Utara berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Gubernur Sumatera Utara dan menteri/pimpinan lembaga terkait melaporkan pelaksanaan RIDPN Danau Toba kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (3) Menteri melaporkan pelaksanaan RIDPN Danau Toba kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata berdasarkan hasil laporan Gubernur Sumatera Utara dan menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaporan pelaksanaan RIDPN Danau Toba dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan RIDPN Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) RIDPN Danau Toba ditinjau setiap 5 (lima) tahun pada akhir tahap berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Peninjauan kembali RIDPN Danau Toba tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada akhir tahap pertama.
- (3) Peninjauan kembali RIDPN Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali RIDPN Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.

Pasal 11

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN Danau Toba bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAKTINO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 180

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA
NASIONAL DANAU TOBA TAHUN 2024-2044

RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
DANAU TOBA TAHUN 2024-2044

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini memberikan perhatian dan harapan besar terhadap sektor Pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Perkembangan Pariwisata diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar berupa devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara, pendapatan dari wisatawan nusantara, dan pembukaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahap untuk mewujudkan sasaran pengembangan Pariwisata tersebut telah dicanangkan pemerintah melalui pengembangan 10 (sepuluh) destinasi Pariwisata prioritas, termasuk DPN Danau Toba yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara. Keberhasilan penyiapan DPN Danau Toba diharapkan dapat menjadi pengungkit dan bahkan meningkatkan momentum pertumbuhan sektor Pariwisata Indonesia yang menunjukkan tren positif dalam 6 (enam) tahun terakhir.

Perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang fluktuatif dengan pangsa pasar wisatawan mancanegara terbesar berasal dari Malaysia. Pada tahun 2018, sekitar 60% (enam puluh persen) wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Sumatera Utara juga mengunjungi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toba dan sekitarnya. Di sisi lain, perkembangan kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Sumatera Utara terus meningkat hingga mencapai lebih dari 11 (sebelas) juta perjalanan.

Danau Toba merupakan Daya Tarik Wisata (DTW) yang unik sebagai kawasan kaldera terbesar di dunia yang terbentuk dari letusan gunung berapi super sekitar 74.000 (tujuh puluh empat ribu) tahun yang lalu, danau terbesar di Asia Tenggara, dan gunung berapi tektonik dengan panjang 100 km (seratus kilometer), lebar 30 km (tiga puluh kilometer), kedalaman 505 m (lima ratus lima meter), dan terletak di ketinggian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

904 m (sembilan ratus empat meter) di atas permukaan laut. Danau Toba merupakan warisan dunia yang penting dengan keanekaragaman geologis, biologis, dan budaya, yang juga didukung oleh atraksi buatan manusia. Pada tahun 2020 Kaldera Toba ditetapkan sebagai *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark*.

Peningkatan aktivitas Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di KSPN Toba dan sekitarnya, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan aksesibilitas, amenities, dan atraksi yang memadai. Penyediaannya membutuhkan kontribusi dan partisipasi dari berbagai Pemangku Kepentingan, baik publik, swasta, maupun masyarakat. Kolaborasi Pemangku Kepentingan tersebut membutuhkan kebijakan spesifik untuk mendukung pengelolaan dan perlindungan yang terpadu. Kolaborasi tersebut juga sangat penting untuk menjaga status Kaldera Toba sebagai *UNESCO Global Geopark*.

Salah satu upaya untuk memandu kolaborasi lintas Pemangku Kepentingan dilaksanakan melalui perencanaan secara terpadu yang dituangkan dalam RIDPN Danau Toba. Penyusunan RIDPN Danau Toba dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek Kepariwisata, infrastruktur, lingkungan, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, sosial budaya, investasi, dan perkembangan wilayah secara keseluruhan. RIDPN Danau Toba juga diharapkan dapat memberi jawaban bagi permasalahan dan tantangan dalam pengembangan Pariwisata, meliputi:

1. penurunan kondisi lingkungan makro yang ditunjukkan oleh pencemaran air danau dan deforestasi;
2. penurunan kondisi lingkungan mikro terkait penanganan sampah dan limbah;
3. rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai makna dan nilai sumber daya kawasan;
4. rendahnya kapasitas tata kelola wilayah; dan
5. keterbatasan aksesibilitas untuk menghubungkan DTW di wilayah DPN Danau Toba yang luas.

Pengembangan DPN Danau Toba yang terpadu diharapkan dapat mendukung perbaikan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pembangunan infrastruktur, serta pemanfaatan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dasar, peluang usaha, kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Hasil pemetaan dan analisis terhadap isu utama dalam pengembangan DPN Danau Toba dituangkan dalam RIDPN Danau Toba yang terdiri atas:

1. visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
2. sasaran dan arah pengembangan;
3. pelaksanaan pengembangan; dan
4. rencana aksi.

B. Visi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

B. Visi

Visi pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba secara terpadu pada tahun 2024-2044, yaitu Pariwisata mewujudkan kemajuan tanah leluhur oleh dan bagi seluruh masyarakat di DPN Danau Toba, yang diterjemahkan dalam bahasa lokal menjadi '*Marsipature Hutanabe*'. Visi tersebut dapat dicapai dengan bertumpu pada 2 (dua) pendekatan utama:

1. pengembangan DPN Danau Toba sebagai destinasi berkelas dunia yang didukung perubahan pola pikir dan komitmen pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dengan mengurangi degradasi lingkungan, termasuk penurunan kualitas air danau, deforestasi, kebakaran, serta sanitasi, kebersihan, dan sebagainya; dan
2. pengembangan DPN Danau Toba yang mendorong kemajuan kawasan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan kapasitas masyarakat yang memadai untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan Pariwisata.

Visi pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba juga memperkuat status Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang telah memiliki citra *Lake Toba*–“*Caldera of Kings*” dan sebagai *Geopark* Kaldera Toba (*Master Plan Geopark Kaldera Toba 2018-2030*).



Gambar 1. Citra Kawasan Danau Toba

Citra dan slogan Danau Toba menggambarkan posisi Danau Toba, baik alam maupun budayanya, yang telah disesuaikan dengan panduan logo citra '*Wonderful Indonesia*'. Alam Danau Toba diwakili oleh 8 (delapan) uliran air yang mewakili 8 (delapan) kabupaten di kawasan Danau Toba dan disimbolkan dengan sebuah pulau yang unik di Danau Toba, yakni Pulau Samosir. Awan menggambarkan bahwa Danau Toba adalah danau yang terletak di dataran tinggi, yaitu 900 m (sembilan ratus meter) di atas permukaan laut. Elemen budaya diwakili oleh cecak (*boraspati*) yang merupakan simbol adaptasi suku Batak serta seni Gorga yang merupakan ornamen yang sangat khas dari suku Batak.

C. Misi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

C. Misi

Pencapaian misi untuk mewujudkan visi pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. melaksanakan pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman sumber daya alam, geologis, dan budaya di DPN Danau Toba secara bertanggung jawab. Pelestarian difokuskan pada perbaikan lingkungan yang menyangkut perairan danau, kawasan hutan, serta aset taman bumi (*geopark*) dan budaya;
2. meningkatkan kolaborasi dari semua Pemangku Kepentingan dalam satu kesatuan wilayah yang terintegrasi secara fisik dan nonfisik serta secara sektoral. Kolaborasi difokuskan pada pengembangan sinergi dan kerja sama antar pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan isu Kepariwisata terkait tata ruang, infrastruktur, amenities Pariwisata, dan tata kelola destinasi yang dikaitkan dengan kapasitas sosial ekonomi;
3. meningkatkan DTW yang pelaksanaannya difokuskan untuk pengembangan atraksi dan fasilitas kenyamanan wisatawan (amenitas) berstandar internasional dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
4. menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat rantai pasok Pariwisata terhadap berbagai potensi alam, budaya, dan ekonomi yang dimiliki DPN Danau Toba. Penciptaan nilai tambah ekonomi dan rantai pasok Pariwisata difokuskan pada keterkaitan sektor Pariwisata dan sektor pertanian yang kontribusinya masih signifikan sebagai sumber penghasilan masyarakat di DPN Danau Toba. Penciptaan rantai pasok Pariwisata menjadi penting untuk meningkatkan efek berganda dari pengeluaran wisatawan dan efek pengungkit untuk berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Pelaksanaannya tetap memperhatikan partisipasi masyarakat, daya dukung lingkungan, dan kualitas layanan Pariwisata untuk menjamin keberlanjutan dari manfaat yang diciptakan; dan
5. mengembangkan produk Pariwisata secara berkelanjutan untuk memenuhi perubahan tren pasar yang dinamis dan memperkuat destinasi agar mampu memberikan layanan Pariwisata yang lebih baik dan menciptakan manfaat pendapatan dari wisatawan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

D. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba bertujuan untuk:

1. meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. meningkatkan kualitas infrastruktur aksesibilitas dan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas dan usaha Pariwisata;

3. meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

3. meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang digerakkan oleh sektor Pariwisata; dan
4. mendorong investasi swasta yang bernilai tambah tinggi.

Hasilnya diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar berupa devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara, pendapatan dari wisatawan nusantara, dan pembukaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di DPN Danau Toba.

E. Ruang Lingkup

RIDPN Danau Toba mencakup rencana pengembangan seluruh wilayah destinasi Pariwisata di DPN Danau Toba dalam periode 21 (dua puluh satu) tahun yang dilengkapi dengan rencana pengembangan wilayah destinasi Pariwisata Danau Toba secara terinci untuk tahun 2024.

RIDPN Danau Toba disusun melalui serangkaian tahap tentang kondisi dan tantangan pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba yang diselaraskan dengan aspirasi Pemangku Kepentingan:

1. analisis regulasi mengenai analisis kelembagaan, hukum, regulasi, dan kerangka kebijakan baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sektor Pariwisata;
2. analisis permintaan dan peluang pengembangan kawasan destinasi Pariwisata;
3. analisis kondisi awal rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur, atraksi, dan fasilitas bagi wisatawan;
4. artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial-ekonomi, dan warisan budaya;
5. penyiapan visi, proyeksi pertumbuhan, dan beberapa skenario pengembangan;
6. perincian skenario pengembangan terpilih yang menjadi dasar perumusan rencana aksi;
7. penyusunan dokumen RIDPN Danau Toba; dan
8. pelibatan dan partisipasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam seluruh tahapan.

Ruang lingkup wilayah dan substansi dari RIDPN Danau Toba mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya dan memadukan rencana yang relevan dengan kebutuhan pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RIDPN Danau Toba antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); dan
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143).

Selain peraturan perundang-undangan di atas, juga perlu memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5); dan
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2).

Delineasi wilayah dalam RIDPN Danau Toba mencakup KSPN Toba dan sekitarnya. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya menetapkan bahwa delineasi kawasan Danau Toba mengikuti delineasi daerah tangkapan air dan *Catchment Area Treatment* (CAT), yang terletak pada koordinat 2°10'3"00" Lintang Utara dan 98°24' Bujur Timur. Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, DPN Danau Toba dapat diterjemahkan mencakup 8 (delapan) kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Secara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Secara administrasi kewilayahan, ruang lingkup DPN Danau Toba mencakup 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Kabupaten Toba;
3. Pemerintah Kabupaten Simalungun;
4. Pemerintah Kabupaten Samosir;
5. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Pemerintah Kabupaten Karo;
8. Pemerintah Kabupaten Dairi; dan
9. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Fokus pengembangan RIDPN Danau Toba di 8 (delapan) kabupaten diarahkan kepada 32 (tiga puluh dua) kecamatan yang berbatasan langsung dengan Danau Toba sebagai fokus pengembangan yaitu 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Toba, 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Simalungun, 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Samosir, 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Karo, 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Dairi, dan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Kemudian dipilih sebanyak 8 (delapan) kecamatan untuk menjadi 6 (enam) *Key Tourism Area* (KTA) dirinci dalam RIDPN Danau Toba, yaitu KTA Parapat, KTA Simanindo, KTA Pangururan, KTA Balige, KTA Muara, dan KTA Merek. Pengembangan keenam KTA ini diharapkan menjadi pengungkit bagi perkembangan Pariwisata di Danau Toba. Kriteria pemilihan keenam KTA didasarkan pada kajian *Market Analysis and Demand Assessment* Danau Toba dan sekitarnya pada tahun 2017 dan *baseline analysis* RIDPN Danau Toba pada tahun 2019.

Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak memiliki KTA tetap mendapat perhatian Pemerintah Indonesia, khususnya untuk akses dan pemenuhan pelayanan dasar serta pola penyebaran pengembangan Kepariwisata sesuai tahap pengembangan. Namun, Kabupaten Dairi berperan sebagai penunjang dalam pengembangan KTA Merek karena terdapat salah satu situs warisan geologi (*geosite*), yaitu Dinding Kaldera Barat (*Western Caldera Wall*) Silalahi-Sabungan. Sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat ikut berperan dan bertanggung jawab dalam pelestarian air danau.

Berdasarkan . . .



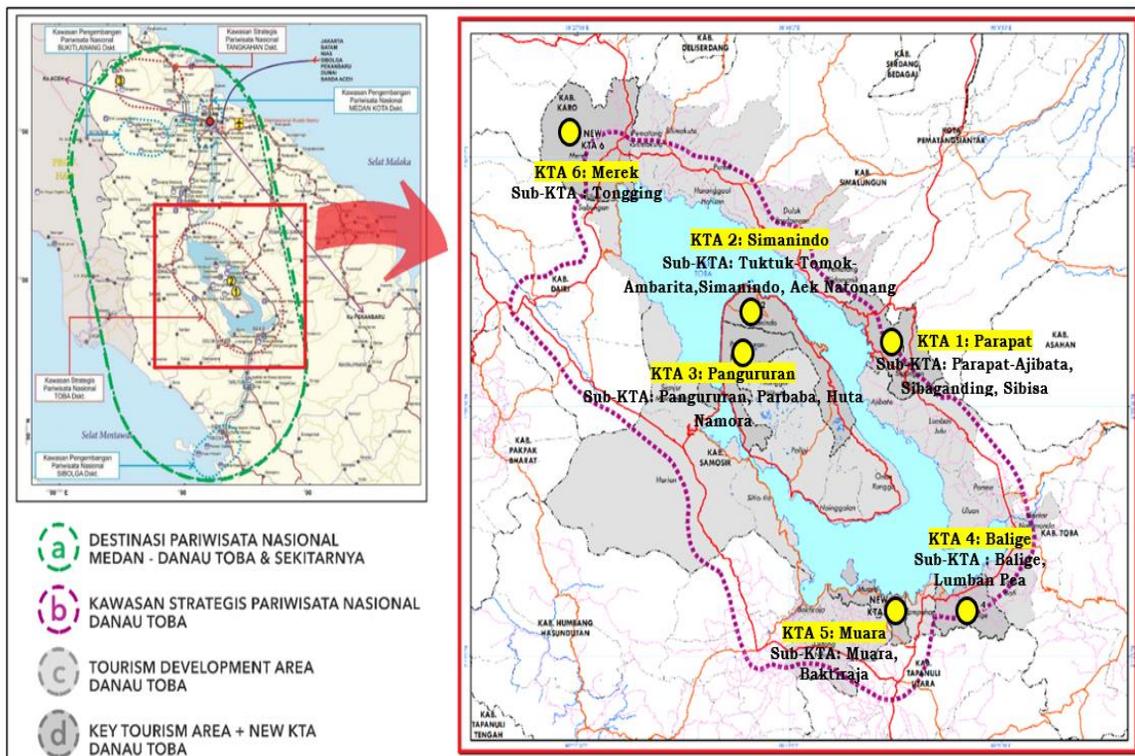
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Berdasarkan penjelasan di atas, 6 (enam) KTA juga dilengkapi dengan Sub KTA. Rincian KTA dan Sub KTA (Tabel 1) sebagai berikut:

Tabel 1. KTA dan Sub KTA di RIDPN Danau Toba

KTA	Sub KTA	Kecamatan	Kabupaten
Parapat	Parapat - Ajibata	Girsang Sipangan Bolon	Simalungun
	Sibaganding	Girsang Sipangan Bolon	Simalungun
	Sibisa	Ajibata	Toba
Simanindo	Tuktuk - Tomok - Ambarita	Simanindo	Samosir
	Simanindo	Simanindo	Samosir
	Aek Natonang	Simanindo	Samosir
Pangururan	Pangururan	Pangururan	Samosir
	Parbaba	Pangururan	Samosir
	Huta Namora	Pangururan	Samosir
Balige	Balige	Balige	Toba
	Lumban Pea	Balige	Toba
Muara	Muara	Muara	Tapanuli Utara
	Baktiraja	Baktiraja	Humbang Hasundutan
Merek	Tongging	Merek	Karo



Gambar 2. Lokasi KTA RIDPN Danau Toba

Keterangan:

KTA 1 = Parapat, KTA 2 = Simanindo, KTA 3 = Pangururan, KTA 4 = Balige, KTA 5 = Muara, KTA 6 = Merek

Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pengembangan Pariwisata Danau Toba juga mempertimbangkan potensi keanekaragaman geologis, biologis, dan budaya yang dapat diringkaskan dalam daftar DTW sebagai berikut:

Tabel 2. DTW di DPN Danau Toba

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten
KTA Parapat	Parapat, Non & Semi-Welded YTT	Alam	Girsang Sipangan Bolon	Simalungun
	Patrajasa, Welded YTT Tilt Blocks	Alam	Girsang Sipangan Bolon	Simalungun
	Monkey Forest Sibaganding Limestone	Alam	Girsang Sipangan Bolon	Simalungun
	Wisata Muka Air Parapat, Pantai Bebas	Alam	Girsang Sipangan Bolon	Simalungun
	Pantai Tigaras	Alam	Dolok Pardamean	Simalungun
	Bukit Indah Simarjarunjung	Alam	Purba	Simalungun
	Tanjung Unta	Alam	Pematang Sidamanik	Simalungun
	Haranggaol, Welded Middle Toba Tuff (MTT)	Alam	Haranggaol Horison	Simalungun
	Haranggaol Non Welded YTT	Alam	Haranggaol Horison	Simalungun
	Haranggaol Welded Haranggaol Dacitic Tuff (HDT)	Alam	Haranggaol Horison	Simalungun
	Haranggaol Andesitic Lava	Alam	Haranggaol Horison	Simalungun
	Pantai Sigumbagumba	Alam	Haranggaol Horison	Simalungun
	Air Terjun Situmurun	Alam	Lumban Julu	Toba
	Situmurun Uluan Block	Alam	Lumban Julu	Toba

Air Terjun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten
	Air Terjun, Paleozoic Basement Caldera Wall	Alam	Lumban Julu	Toba
	Rumah Pengasingan Bung Karno	Budaya	Girsang Sipangan Bolon	Simalungun
	Istana Simalungun	Budaya	Purba	Simalungun
	Desa Jangga Dolok, permukiman tradisional	Budaya	Lumban Julu	Toba
	Huta Bagasan, rumah tradisional	Budaya	Lumban Julu	Toba
	Desa Sigapiton	Budaya	Ajibata	Toba
	Bukit Gibeon, wisata religi	Budaya	Ajibata	Toba
	Geopark Information Center (GIC) Parapat	Buatan	Girsang Sipangan Bolon	Simalungun
	Pusat Konservasi Gajah Aek Nauli	Buatan	Girsang Sipangan Bolon	Simalungun
	Water Fun Nine, taman bermain	Buatan	Girsang Sipangan Bolon	Simalungun
	Eden 100 Botanical Garden	Buatan	Lumban Julu	Toba
	Toba Caldera Resort	Buatan	Ajibata	Toba
KTA Simanindo	Pantai Batu Hoda	Alam	Simanindo	Samosir
	Simanindo Terrace Sediment	Alam	Simanindo	Samosir
	Lava Dasit Ambarita	Alam	Simanindo	Samosir
	Kubah Dasit Tuktuk	Alam	Simanindo	Samosir

Danau . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten
	Danau Sedimen Tomok	Alam	Simanindo	Samosir
	Danau Aek Natonang	Alam	Simanindo	Samosir
	Air Terjun Sigarattung	Alam	Simanindo	Samosir
	Batu Kursi Raja Siallagan	Budaya	Simanindo	Samosir
	Situs Arkeologi Sipalaka Siallagan	Budaya	Simanindo	Samosir
	Makam Tua Raja Sidabutar	Budaya	Simanindo	Samosir
	Desa Ambarita	Budaya	Simanindo	Samosir
	Desa Tuktuk	Budaya	Simanindo	Samosir
	Desa Tomok	Budaya	Simanindo	Samosir
	Silimalombu Eco-Lodge	Budaya	Simanindo	Samosir
	Desa Huta Hotang	Budaya	Simanindo	Samosir
	Museum Huta Bolon	Buatan	Simanindo	Samosir
	Wisata Martoba	Budaya	Simanindo	Samosir
	KTA Pangururan	Aek Rangat	Alam	Pangururan
Danau Sidihoni		Alam	Pangururan	Samosir
Hutatinggi Landform Panoramic View		Alam	Pangururan	Samosir
Hutatinggi Debris Flow Deposit		Alam	Pangururan	Samosir

Hutatinggi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten
	Hutatinggi Lacustrine Deposit Sequence	Alam	Pangururan	Samosir
	Hutatinggi Diatomae-Lacustrin Deposit	Alam	Pangururan	Samosir
	Wisata Air Pangururan	Alam	Pangururan	Samosir
	Pantai Parbaba	Alam	Pangururan	Samosir
	Pantai Situngkir	Alam	Pangururan	Samosir
	Pantai Tandarabun	Alam	Pangururan	Samosir
	Lava Dasit Sianjur Mulamula	Alam	Sianjur Mulamula	Samosir
	Lava Dasit Batu Parhorasan	Alam	Sianjur Mulamula	Samosir
	Siboro Limestone Volcanic Contact	Alam	Sianjur Mulamula	Samosir
	Air Terjun Naisogop	Alam	Sianjur Mulamula	Samosir
	Batu Sawan	Alam	Sianjur Mulamula	Samosir
	Pemandian Sakral Aek Sipitu Dai	Alam	Sianjur Mulamula	Samosir
	Simpang Limbong Metapebbly Mudstone	Alam	Sianjur Mulamula	Samosir
	Simpang Harian Welded Olders Toba Tuff (OTT)	Alam	Harian	Samosir
	Simpang Harian Welded Youngest Toba Tuff (YTT)	Alam	Harian	Samosir
	Simanuk Hydrothermally Altered YTT	Alam	Harian	Samosir
	Air Terjun Efrata	Alam	Harian	Samosir

Bukit . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten
	Bukit Holbung	Alam	Harian	Samosir
	Hutan Pinus Tele	Alam	Harian	Samosir
	Air Terjun Mbilulu	Alam	Tinada	Pakpak Bharat
	Air Terjun Lae Una	Alam	Tinada	Pakpak Bharat
	Delleng Sindeka	Alam	Tinada	Pakpak Bharat
	Rumah Tradisional Batak	Budaya	Sianjur Mulamula	Samosir
	Batu Hobon	Budaya	Sianjur Mulamula	Samosir
	Rumah Tradisional Sopo Guru Tatea Bulan	Budaya	Sianjur Mulamula	Samosir
	Benteng Sisingamangaraja XII	Budaya	Tinada	Pakpak Bharat
	Pusat Informasi Geopark	Buatan	Sianjur Mulamula	Samosir
	Menara Pandang Tele	Buatan	Harian	Samosir
KTA Balige	Liang Sipege, Limestone Caldera Wall	Alam	Balige	Toba
	Basiha Stone, Prismatic Joints, Andesitic Lava	Alam	Balige	Toba
	Pantai Lumban Silintong	Alam	Balige	Toba
	Bukit Tarabunga, panorama	Alam	Tampahan	Toba
	Pantai Lumban Bulbul	Budaya	Balige	Toba
	Pasar Tradisional Onan Balerong	Budaya	Balige	Toba

Makam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten
	Makam Sisingamangaraja XII	Budaya	Balige	Toba
	Desa Meat, Paleozoic Basement Caldera Wall dan aktivitas menenun	Budaya	Tampahan	Toba
	Huta Tinggi Parmalim, wisata religi	Budaya	Laguboti	Toba
	Museum T.B. Silalahi	Buatan	Balige	Toba
KTA Muara	Huta Ginjang Plateau YTT Hydrothermal alteration, landform panoramic view	Alam	Muara	Tapanuli Utara
	Tapian Nauli, Non-welded YTT Plateau	Alam	Muara	Tapanuli Utara
	Tapian Nauli Welded OTT	Alam	Muara	Tapanuli Utara
	Tapian Nauli Brecciated Lava	Alam	Muara	Tapanuli Utara
	Dolok Martumbur, Mesozoic Meta-sandstones	Alam	Muara	Tapanuli Utara
	Sibandang, Volcanic Cone	Alam	Muara	Tapanuli Utara
	Bakara-Doloksanggul, Caldera Sequence	Alam	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Bakkara Panoramic View	Alam	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Bakara-Tipang, Welded-OTT	Alam	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Air Terjun Janji	Alam	Baktiraja	Humbang Hasundutan

Pulau . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten
	Pulau Simamora	Alam	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Air Terjun Sipultak Hoda	Alam	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Sipinsur, landform panoramic view	Alam	Paranginan	Humbang Hasundutan
	Tao Silosung, kolam sakral	Alam	Lintong Nihuta	Humbang Hasundutan
	Tao Sipinggaan, kolam sakral	Alam	Lintong Nihuta	Humbang Hasundutan
	Sibandang-Pardepur Post-calderic Volcanic Formations (Desa Sibandang)	Budaya	Muara	Tapanuli Utara
	Muara-Desa Ulos	Budaya	Muara	Tapanuli Utara
	Tombak Sulu-sulu, Limestone-Budaya	Budaya	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Istana Raja Sisingamangaraja	Budaya	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Desa Wisata Tipang	Budaya	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Tombak Hatuanan, situs arkeologi	Budaya	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Sumur Aek Sipangolu, sumur air sakral	Budaya	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Sumur Aek Sitio-tio, sumur air sakral	Budaya	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Hariara Tungkot, situs arkeologi	Budaya	Baktiraja	Humbang Hasundutan
	Batu Hundul-Hundulan, situs sakral	Budaya	Baktiraja	Humbang Hasundutan

Sipinsur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten
	Sipinsur, Botanical Garden	Buatan	Paranginan	Humbang Hasundutan
	Sipinsur Information Kiosk	Buatan	Paranginan	Humbang Hasundutan
KTA Merek	Sipiso-piso Volcanic Cone	Alam	Merek	Karo
	Air Terjun Sipiso-piso	Alam	Merek	Karo
	Desa Tongging, Paleozoic Basement, caldera wall	Alam	Merek	Karo
	Kodon-kodon Caldera Wall	Alam	Merek	Karo
	Bukit Gajah Bobok	Alam	Merek	Karo
	Sapo Juma	Alam	Merek	Karo
	Bukit Sibuatan	Alam	Merek	Karo
	Kodon Palezoic Basement	Alam	Silahi Sabungan	Dairi
	Silalahi Volcanic Debris	Alam	Silahi Sabungan	Dairi
	Silalahi Renun Caldera Wall	Alam	Silahi Sabungan	Dairi
	Pantai Silahisabungan	Alam	Silahi Sabungan	Dairi
	Batu Sigadap	Budaya	Silahi Sabungan	Dairi
	Desa Dokkan, permukiman tradisional	Budaya	Merek	Karo
	Monumen Silalahi	Budaya	Silahi Sabungan	Dairi
	Simalem Resort, agrotourism	Buatan	Merek	Karo

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

BAB II

SASARAN DAN ARAH PENGEMBANGAN

A. Sasaran

Pengembangan Pariwisata Danau Toba diarahkan untuk mewujudkan sasaran dalam meningkatkan pertumbuhan dan kualitas aktivitas Pariwisata di DPN Danau Toba dalam periode 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, serta pendapatan dari Pariwisata, yang ditopang daya dukung lingkungan yang memadai. Peningkatan kualitas utamanya didukung oleh peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan yang membentuk devisa dari wisatawan mancanegara dan pendapatan dari wisatawan nusantara. Proyeksi kunjungan wisatawan dan pendapatan Pariwisata disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Proyeksi Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan Pariwisata DPN Danau Toba

Indikator	2024	2029	2034	2039	2044
a. Wisatawan Mancanegara (Kunjungan)	208.100	341.950	561.900	743.840	984.700
b. Pendapatan Devisa (juta US\$)*	145,7	263,79	477,6	685,78	984,7
c. Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	2.626.100	3.332.650	4.229.300	4.645.020	5.101.600
d. Pendapatan (Rp juta)	1.925.200	2.619.690	3.564.700	4.247.340	5.060.700

Pertumbuhan aktivitas Pariwisata ini didukung oleh penyediaan tenaga kerja dan ketersediaan lahan yang masing-masing diwakili oleh indikator jumlah penduduk dan ketersediaan lahan. Fokus pengembangan Pariwisata DPN Danau Toba diperkirakan akan berdampak pada pertambahan penduduk mencapai lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pada tahun 2044.

Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di KTA Balige dan KTA Muara sebanyak 36,7% (tiga puluh enam koma tujuh persen), diikuti oleh KTA Merek 19,4% (sembilan belas koma empat persen), KTA Pangururan 19,1% (sembilan belas koma satu persen), KTA Parapat 18,4% (delapan belas koma empat persen), dan KTA Simanindo 6,4% (enam koma empat persen). Pengembangan Pariwisata di kawasan ini diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan kerja minimal

77.204 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

77.204 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat) orang. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas Pariwisata diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan lahan di DPN Danau Toba sekitar 1.800 ha (seribu delapan ratus hektare) untuk memfasilitasi pembangunan permukiman sebanyak 35,6% (tiga puluh lima koma enam persen), hotel dan pondok wisata (*homestay*) sebanyak 11,9% (sebelas koma sembilan persen), dan amenitas lainnya sebanyak 52,5% (lima puluh dua koma lima persen) sampai dengan tahun 2044.

B. Arah Pengembangan

Kebijakan pengembangan RIDPN Danau Toba disusun berdasarkan keselarasannya dengan kriteria distribusi spasial aktivitas Pariwisata di DPN Danau Toba, dengan rincian sebagai berikut:

1. kriteria lingkungan, yang meliputi kebijakan dan regulasi terkait kualitas air, hutan dan kawasan lindung, limbah dan persampahan, risiko bencana, kualitas udara, kesehatan lingkungan dan keselamatan, keanekaragaman hayati, serta sumber daya fisik dan budaya;
2. kriteria Kepariwisata, yang meliputi kemudahan mencapai DTW, kepuasan pengalaman wisatawan, penciptaan nilai bagi daya tarik potensial di luar KTA, manfaat ekonomi bagi pemerintah, manfaat ekonomi bagi industri Pariwisata, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat;
3. kriteria tata ruang, yang meliputi kesesuaian lahan, alokasi lahan dan dampaknya terhadap intensitas kegiatan, serta keterkaitan antara pola pengembangan Pariwisata dengan rencana tata ruang;
4. kriteria penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur, yang meliputi kualitas dan akses infrastruktur, serta keselarasannya dengan daya dukung lingkungan dan pemanfaatannya untuk Pariwisata;
5. kriteria keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata, yang meliputi penyediaan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi sebagai tuan rumah, pekerja, dan pelaku usaha Pariwisata; dan
6. kriteria tata kelola sosial budaya, yang meliputi mitigasi risiko sosial (spekulasi lahan, kecemburuan sosial, dan pergeseran hubungan diaspora dengan masyarakat), beban dan peluang pelestarian budaya, serta aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

Hasil penyelarasan mengarahkan pada pola dan tahap pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba. Berdasarkan 6 (enam) kriteria distribusi spasial, pengembangan DTW di DPN Danau Toba dilaksanakan dengan pola tersebar. Dalam pola pengembangan ini, pengembangan DTW yang semula difokuskan pada 6 (enam) KTA, akan diperluas ke DTW lainnya di 32 (tiga puluh dua) kecamatan di DPN Danau Toba. Perluasan dilaksanakan sesuai

dengan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

dengan potensi, serta komitmen dan kolaborasi yang lebih kuat dari Pemangku Kepentingan. Kolaborasi tidak terbatas pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia (SDM), serta perbaikan iklim usaha yang mencakup perbaikan kebijakan, penegakan hukum, dan harmonisasi kewenangan dan fungsi antar lembaga di DPN Danau Toba. Arah pengembangan Pariwisata yang tersebar diharapkan dapat memastikan distribusi dampak positif ekonomi tersebar ke seluruh DPN Danau Toba.

Arah pengembangan DPN Danau Toba tahun 2024-2044 akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap, sebagai berikut:

1. TAHAP PERTAMA: KEBANGKITAN (Tahun 2024)

Pada tahap ini pengembangan DPN Danau Toba difokuskan untuk mengembalikan tren kunjungan wisatawan mancanegara yang berfluktuasi ke arah pertumbuhan yang positif. Pelaksanaannya akan menekankan pada perubahan pola pikir untuk memperbaiki komitmen dan kontribusi Pemangku Kepentingan dalam rangka penyehatan kondisi lingkungan strategis. Inisiatif besar yang akan menjadi pengungkit mencakup peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan Pariwisata sesuai dengan standar pelayanan minimal, serta dilengkapi dengan perluasan pasar. Diferensiasi produk wisata juga mulai dilakukan pada tahap ini sesuai dengan tema pengembangan Pariwisata di 6 (enam) KTA yaitu KTA Parapat, KTA Simanindo, KTA Pangururan, KTA Balige, KTA Muara, dan KTA Merek.

2. TAHAP KEDUA: PERCEPATAN I (Tahun 2025-2029)

Tahap kedua dimulai setelah lingkungan strategis di DPN Danau Toba sudah pulih kembali dan para Pemangku Kepentingan lebih siap untuk bersama-sama melakukan pengembangan Pariwisata secara intensif. Pelaksanaan akselerasi menekankan pada konsistensi untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, meneruskan upaya standardisasi kualitas, dan memperluas diferensiasi produk, didukung oleh semakin baiknya berbagai infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas destinasi kawasan Danau Toba yang terkonsentrasi di 6 (enam) KTA yaitu KTA Parapat, KTA Simanindo, KTA Pangururan, KTA Balige, KTA Muara, dan KTA Merek.

3. TAHAP KETIGA: PERCEPATAN II (Tahun 2030-2034)

Tahap ketiga melanjutkan tren yang positif di tahap sebelumnya. Tahap ini ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan dan kemampuan menarik segmen pasar yang baru serta perlu didukung dengan produk yang semakin bervariasi dan berkualitas, praktik hijau dalam industri Pariwisata, dan pembangunan berbagai sektor lainnya yang semakin berkembang di KSPN Toba dan sekitarnya.

4. TAHAP KEEMPAT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

4. **TAHAP KEEMPAT: PEMATANGAN I (Tahun 2035-2039)**
Tahap keempat dimulai dengan memanfaatkan hasil diferensiasi produk wisata dan perluasan pasar baru untuk memastikan KSPN Toba dan sekitarnya mencapai status destinasi yang matang dan berdaya saing. Pada tahap ini, pasar baru sudah dapat berkembang dengan produk yang terus dikembangkan sehingga pelaksanaannya menekankan pada diversifikasi produk dan pasar.
5. **TAHAP KELIMA: PEMATANGAN II (Tahun 2040-2044)**
Tahap kelima melanjutkan diversifikasi produk dan pasar, serta melakukan integrasi yang lebih luas di DPN Danau Toba termasuk pelibatan rantai pasok Kepariwisata dengan sektor lainnya. Selain itu, perlu dilakukan integrasi antara perencanaan RIDPN dengan perencanaan di kawasan secara saksama.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB III

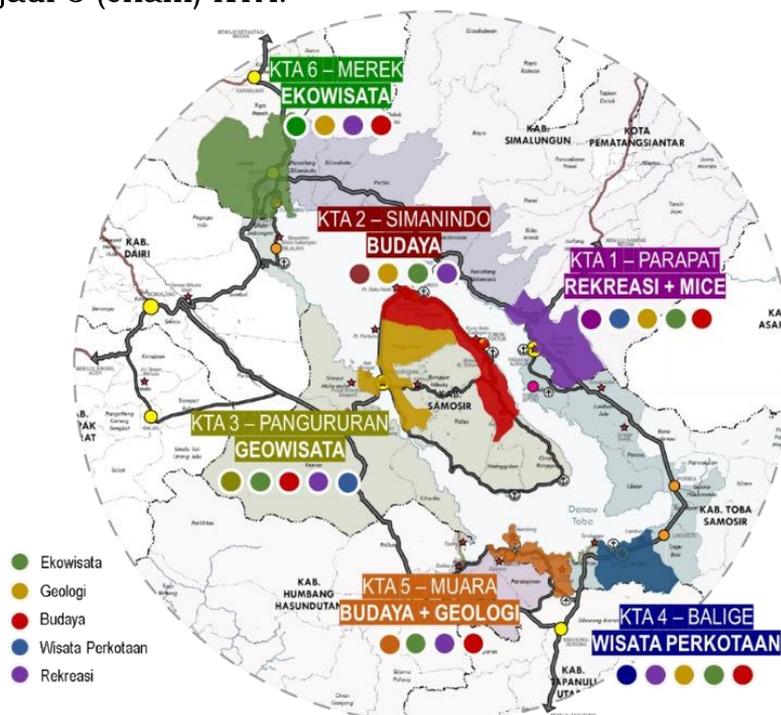
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

A. Perwilayahan Pembangunan DPN Danau Toba

Skenario pengembangan Pariwisata secara spasial di DPN Danau Toba akan mengikuti skenario penyebaran. Skenario ini memberikan manfaat bagi pengembangan Pariwisata di Danau Toba, seperti kualitas air danau lebih baik, risiko bencana lebih kecil, lingkungan lebih asri, peningkatan pengalaman dan kepuasan wisatawan, keterlibatan dan keuntungan sosial bagi masyarakat yang lebih luas di seluruh *geosite*, konservasi budaya Batak lebih menyeluruh, dan meminimalisir beban pada masing-masing DTW karena terbaginya wisatawan.

Secara terinci, pelaksanaan perwilayahan pembangunan DPN Danau Toba diarahkan berdasarkan 9 (sembilan) kebijakan strategis, sebagai berikut:

1. kebijakan diferensiasi Pariwisata secara tematik memberikan penguatan untuk potensi KTA tertentu, menghindarkan persaingan antar KTA, sekaligus meningkatkan lama tinggal wisatawan dan/atau menarik wisatawan untuk datang kembali dan menemukan pengalaman yang berbeda-beda di tiap KTA, serta meningkatkan kualitas pengalaman bagi wisatawan. Tema yang diusulkan dibagi menjadi 6 (enam) KTA.



Gambar 3. Pengembangan Pariwisata Tematik di 6 (Enam) KTA

2. kebijakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

2. kebijakan pemerataan pengembangan Pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian wilayah, serta mengurangi kesenjangan antar kabupaten. Kebijakan distribusi pengembangan Pariwisata akan mengarahkan pembatasan pengembangan di KTA Parapat dan KTA Simanindo untuk mengurangi beban dan mengimbangnya dengan pengembangan di KTA Pangururan dan KTA Balige. Pengembangan Pariwisata juga didistribusikan ke KTA Merek dan KTA Muara, serta DTW lain di dalam 32 (tiga puluh dua) kecamatan di DPN Danau Toba.
3. kebijakan peningkatan aksesibilitas menuju DPN Danau Toba diperlukan untuk mendatangkan wisatawan dari wilayah sekitarnya (Aceh, Medan, Tebing Tinggi, dan lainnya) dan pintu gerbang utama (Kualanamu). Selain aksesibilitas eksternal, pembangunan konektivitas internal diperlukan untuk menghubungkan antar DTW di semua Sub KTA. Peningkatan konektivitas juga perlu disertai dengan penyediaan moda transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan serta peningkatan kualitas layanan, termasuk untuk aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
4. kebijakan peningkatan kualitas lingkungan dengan preservasi hutan melalui reforestasi dan peningkatan kualitas air Danau Toba.
5. kebijakan penanggulangan dampak sosial dan bencana didasarkan pada antisipasi gejolak sosial dan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan dengan mengidentifikasi dampak dari pembangunan fisik, isu pengadaan lahan, isu kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja dan berusaha, serta isu keselarasan pengembangan Pariwisata dengan nilai dan norma budaya setempat.
6. kebijakan untuk meningkatkan keterkaitan dengan sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan dan menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat di DPN Danau Toba. Kegiatan pertanian dapat diintegrasikan dengan Pariwisata melalui pengembangan agrowisata seperti memelihara, memanen, dan menikmati hasil olahan.
7. kebijakan perlindungan terhadap budaya Batak dan *geopark*, dilakukan melalui praktik keseharian sebagai bagian dari keramahtamahan Batak dan perlindungan terhadap *geosite* sebagai bagian dari *Global Geopark Network*. Pengemasan informasi budaya, sejarah, dan geologi perlu ditingkatkan untuk menambah pengalaman wisatawan.
8. kebijakan peningkatan kualitas amenities melalui pemenuhan standar internasional merujuk pada standar nasional maupun internasional. Pengembangan proyek percontohan '*green hotel*' perlu dilakukan untuk memberi rujukan tentang praktik penerapan Pariwisata berkelanjutan di sektor akomodasi. Kemajuan dari transformasi menuju Pariwisata yang ramah lingkungan juga terus dipantau melalui *Sustainable Tourism Observatory* yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi.

9. kebijakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

9. kebijakan penguatan kelembagaan secara terpadu, sistem kelembagaan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan pemerataan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Selain itu, sistem kelembagaan perlu dilengkapi dengan basis data terpadu untuk dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan dan kebijakan yang memastikan berjalannya pengembangan Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kesembilan kebijakan strategis di atas diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan Pariwisata di Danau Toba. Rencana perwilayahan untuk pengembangan Pariwisata di masing-masing KTA diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Pengembangan KTA Parapat

Pengembangan KTA Parapat akan difokuskan pada tema *Meeting Incentive, Conference, and Exhibition* (MICE) serta rekreasi. Lokus pengembangan KTA Parapat mencakup Sub KTA Parapat-Ajibata, Sub KTA Sibaganding, dan Sub KTA Sibisa sebagai kawasan otoritatif dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Sub KTA Parapat-Ajibata diarahkan menjadi induk KTA Parapat karena berada di area Pariwisata yang telah berkembang khususnya di sekitar Kelurahan Tiga Raja dan Kelurahan Pardamean-Ajibata. Ruang aktivitas di Sub KTA Parapat-Ajibata bersifat terbuka dan menunjukkan karakter tema KTA. Pengembangan dilakukan melalui penataan kawasan wisata seperti Pantai Bebas, Hotel Inna Parapat, Alun-alun Parapat, Rumah Pengasingan Bung Karno, Kampung (Nelayan) Tiga Raja, Pelabuhan Ajibata, Long Beach Ajibata, seberang Hotel Atsari, serta kawasan perdagangan dan jasa lainnya. Keberadaan Pantai Bebas, wisata, serta koridor yang ramah terhadap pejalan kaki berpotensi menjadi ikon pusat KTA. Rumah Pengasingan Bung Karno dapat diperbaiki untuk kelestariannya. Pengendalian pembangunan fisik juga dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan. Pemberdayaan ekonomi lokal desa wisata dan kawasan wisata, salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa serta pemukiman dilakukan sesuai rencana pola ruang, tidak melanggar ketentuan, serta tidak merusak aset alam seperti pemandangan.

Sub KTA Sibaganding direncanakan akan dikembangkan sebagai kawasan wisata serta kawasan perdagangan dan jasa. Layanan komersial lainnya di kawasan ini akan dibangun secara harmonis dengan lingkungan alam dan permukiman tradisional. Ruang-ruang alam terbuka dijaga dan dipastikan ramah pejalan kaki, serta dapat digunakan sebagai area berkemah. Perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat ditata dan disiapkan agar dapat dikunjungi oleh wisatawan untuk menikmati hasilnya di tempat. Pembangunan fisik dibatasi sesuai aturan pemanfaatan hutan lindung, sedangkan

pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

pembangunan di tebing-tebing yang curam (di pinggir jalan) dilarang. Fasilitas untuk memandang disediakan dan dilengkapi area parkir terbatas di tepi jalan, termasuk fasilitas pendukungnya seperti toilet, tempat duduk, dan lain-lain. Kawasan ini dikembangkan di kemudian hari bersama dengan dibukanya jalan alternatif.

Sub KTA Sibisa di Kecamatan Ajibata akan difokuskan di wilayah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sebagai kawasan terpadu Toba Caldera Resort yang memiliki citra berkelas internasional dan unik. Kawasan ini dikembangkan dengan mengedepankan aspek preservasi kualitas lingkungan seperti pelestarian air danau dan reboisasi, melalui pengembangan konsep *eco-resort*. Pengembangan Toba Caldera Resort dipandu oleh rencana induk yang telah menetapkan 8 (delapan) zona, yaitu:

- a. zona campuran;
- b. zona kedatangan/publik;
- c. zona pusat konvensi;
- d. zona destinasi wisata bertema edukasi;
- e. zona hotel area tebing;
- f. zona resort di sekitar pantai laguna;
- g. zona destinasi wisata bertema petualangan alam di sekitar laguna alami; dan
- h. zona kebun raya.

Rencana induk juga mencakup pengembangan konektivitas wilayah yang terintegrasi dengan jalur pejalan kaki, kereta gantung, dan ruang terbuka hijau. Pengembangan kawasan ini diharapkan akan mendorong pengembangan agrowisata, perdagangan, dan industri, melalui program fasilitasi rantai pasok kepada masyarakat setempat.

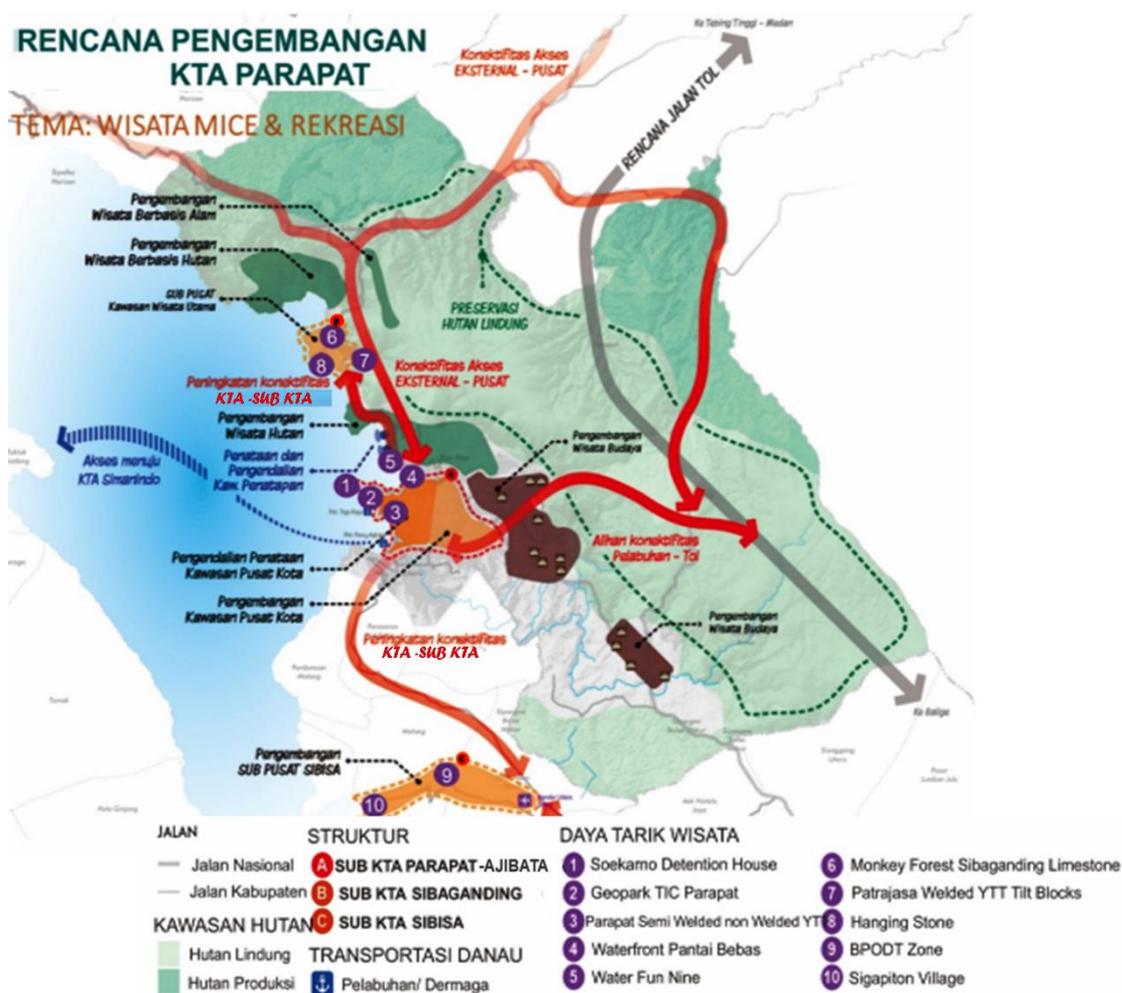
Pola ruang di KTA Parapat yang tersedia untuk menampung kegiatan Pariwisata ini adalah campuran, rimba kota, hutan lindung, Pariwisata, perdagangan dan jasa skala wilayah perencanaan, perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, perkantoran, perkebunan, perumahan kepadatan rendah, perumahan kepadatan sedang, perumahan kepadatan tinggi, sempadan sungai, sarana pelayanan umum skala kecamatan, sarana pelayanan umum skala kota, dan taman kecamatan. Kebutuhan residensial didistribusikan di atas peruntukan pola ruang perumahan kepadatan rendah, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan tinggi, serta peruntukan perkebunan dan peruntukan sarana pelayanan umum skala kecamatan.

Gambar 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -



Gambar 4. Rencana Pengembangan KTA Parapat

Kebutuhan ruang untuk akomodasi diletakkan di atas peruntukan pola ruang campuran, perdagangan dan jasa skala bagian wilayah perencanaan, perkantoran, perkebunan, perumahan kepadatan rendah, perumahan kepadatan tinggi, sarana pelayanan umum skala kecamatan, dan sarana pelayanan umum skala kota.

Kebutuhan ruang atraksi dan amenitas diletakkan untuk Pariwisata dan sarana pelayanan umum. Distribusi kebutuhan ruang atraksi dan amenitas ini juga diletakkan di kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata seperti hutan lindung, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, dan perumahan.

Dengan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Dengan tema wisata rekreasi, kehadiran ruang terbuka menjadi sangat penting di kawasan prioritas di KTA Parapat. Penataan lingkungan perlu memberikan rasa aman bagi wisatawan yang berkunjung, juga menjaga pandangan ke arah danau yang menjadi unggulan ruang terbuka ini yang sekaligus menjadi gardu pandang. Keterbukaan ini juga bisa menjaga pandangan ke arah danau dari jalan yang melaluinya dan menjadikannya salah satu daya tarik untuk wisatawan dalam bentuk *scenic road*.

Tata hijau juga harus mendukung tema kolonial dan penyangga, sehingga dapat mengingatkan para wisatawan terhadap sejarah yang ada di KTA Parapat. Tanaman yang dipilih adalah tanaman asli dari daerah Toba dan tambahan tanaman lainnya untuk memperkuat suasana kolonial. Area hijau di sempadan danau perlu dipertahankan sehingga mendukung ekosistem tepi danau sekaligus menjadi daya tarik untuk wisatawan.

Pengembangan Pariwisata secara spasial di KTA Parapat disesuaikan dengan 5 (lima) tahap pengembangan. Peruntukan ruang yang akan dikembangkan pada tahap pertama di KTA Parapat, yaitu area permukiman, wisata campuran, dan pelayanan Pariwisata. Pemanfaatan ruang akan dilakukan di Desa Pardamean Ajibata, Desa Tiga Raja, Desa Sibaganding, Desa Parsaoran Sibisa, Desa Pardamean Sibisa, Desa Motung, dan Desa Sigapiton berupa amenitas, permukiman, serta perdagangan dan jasa.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, peruntukan ruang yang akan dikembangkan yaitu Panatapan Parapat sebagai area wisata hutan, Girsang I dan Girsang II sebagai area wisata budaya, Sibaganding sebagai area agrowisata serta Monkey Forest sebagai area wisata hutan. Selain itu, pada tahap ini pemanfaatan ruang juga akan dilakukan di Desa Sipangan Bolon. Ruang amenitas di Desa Sibaganding juga akan dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan objek wisata Aek Nauli Elephant Conservation Camp. Pemanfaatan ruang juga akan dilakukan di Desa Sipangan Bolon. Pemanfaatan ruang di jalur timur KTA Parapat khususnya di Desa Girsang dibatasi dengan tujuan untuk menjaga ruang hutan yang alami dan dapat dinikmati serta diakses secara langsung. Sedangkan untuk Sub KTA Sibisa dilakukan dengan pengembangan lebih lanjut dari Kawasan Toba Caldera Resort oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang sebagian berada di Desa Parsaoran Sibisa, Desa Pardamean Sibisa, Desa Motung, dan Desa Sigapiton yang diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan Pariwisata berupa atraksi dan amenitas di KTA Parapat yang mampu menangkap segmen pasar berkualitas. Pada tahap keempat dan tahap kelima, pengembangan KTA Parapat akan diarahkan pada Bukit Parapat sebagai area wisata hutan khususnya di wilayah Desa Girsang berupa pondok wisata (*homestay*).

2. Rencana . . .

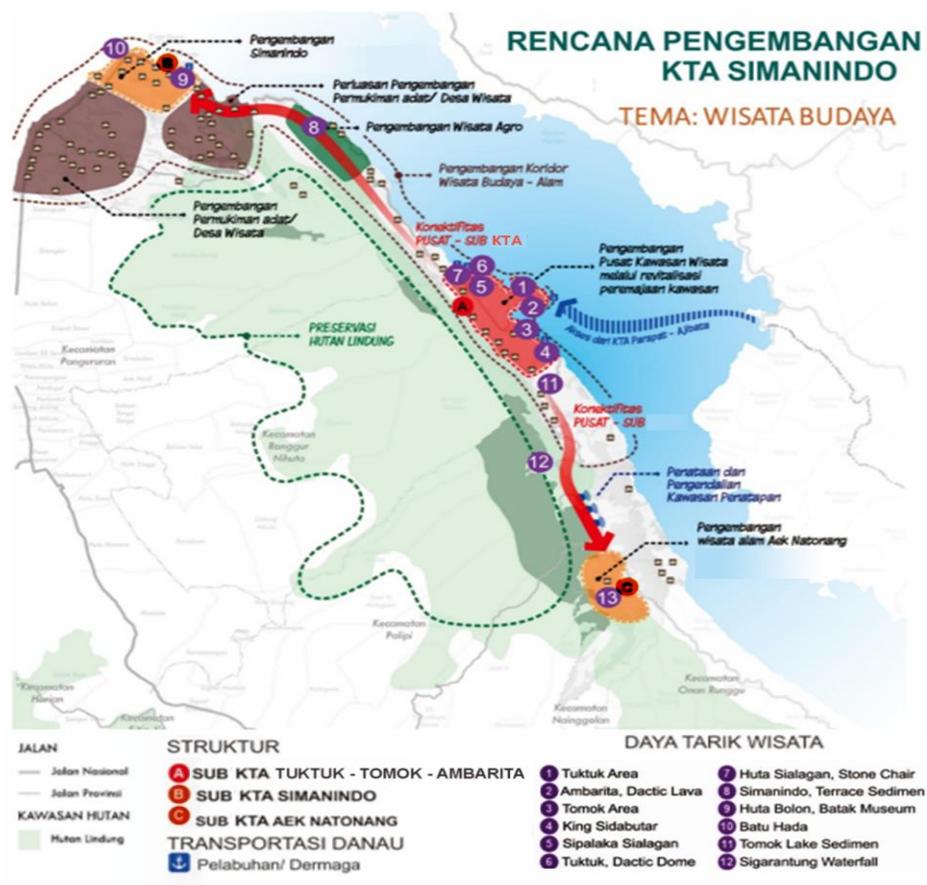


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

2. Rencana Pengembangan KTA Simanindo

Pengembangan KTA Simanindo akan difokuskan pada tema budaya karena terletak di koridor timur dan utara Pulau Samosir yang memiliki banyak potensi perkampungan tradisional (huta) Batak, serta *geosite* yang menyimpan unsur sejarah dan budaya. Lokus pengembangan KTA Simanindo mencakup Sub KTA Tuktuk-Tomok-Ambarita, Sub KTA Simanindo, dan Sub KTA Aek Natonang. Sub KTA Tuktuk-Tomok-Ambarita diarahkan menjadi induk terhadap KTA Simanindo karena berada di area Pariwisata yang telah berkembang di Desa Siadong, Desa Tomok, dan Desa Ambarita. Rencana pengembangan dilaksanakan melalui peremajaan kawasan untuk memfasilitasi aktivitas rekreatif, Huta Batak, serta layanan Pariwisata yang bersifat komersial, termasuk hotel, kafe, rumah makan, dan sebagainya. Ruang aktivitas bersifat terbuka dan ramah terhadap pejalan kaki dengan lanskap yang tertata rapi. Aktivitas di sekitar cagar budaya serta *geosite* diatur dan dibatasi. Pembangunan di ruang publik yang memiliki akses ke danau, area pertanian, dan pelayanan komersial (permanen dan pedagang kaki lima), dikendalikan dengan daerah penyangga. Di sepanjang koridor dirancang untuk memberikan ruang pandang yang menarik, jelas, dan tidak tertutup elemen apapun (seperti papan reklame) bagi wisatawan ke arah bentang alam Pulau Samosir.



Gambar 5. Rencana Pengembangan KTA Simanindo

Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Pengembangan Sub KTA Aek Natonang direncanakan mencakup ruang wisata terbuka yang dibangun harmonis dengan lingkungan alam dan mengikuti peraturan zonasi kebun raya untuk pemanfaatan ruangnya. Ruang alam dibatasi penggunaannya, namun dapat digunakan sebagai area berkemah nonpermanen, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya.

Pengembangan di Sub KTA Simanindo dilakukan secara selektif mengingat daya dukung yang terbatas dan kebutuhan pelestarian sumber daya budaya. Pelayanan Pariwisata dapat disediakan pada peruntukan ruang wisata campuran dan aktivitas wisata dapat dilakukan di beberapa peruntukan ruang lain. Pengembangan Sub KTA Simanindo diarahkan agar lebih menyebar mengikuti jalur sirkulasi yang sudah ada, sekaligus mengikuti pola pengembangan budaya tradisional Batak dalam jalur sirkulasi utama. Pada saat yang sama, penataan *ribbon development* yang berbentuk memanjang langsung di pinggir jalur sirkulasi utama perlu dilaksanakan sehingga suasana budaya tradisional Batak bisa tetap dirasakan dan diperkuat.

Ruang terbuka di Sub KTA Simanindo berupa lahan persawahan yang besar dan luas serta dikelilingi perbukitan dan pegunungan. Dalam lingkup yang lebih kecil, ruang terbuka di kawasan ini mencakup lapangan kecil yang dikelilingi oleh dinding dari batu dengan rumpun bambu diluarnya. Ruang terbuka ini akan terhubung dengan jalan utama. Tata hijau dikembangkan dengan memilih tanaman lokal di sekitar wilayah Danau Toba dan tanaman tambahan. Area hijau pada sempadan danau perlu dipertahankan sehingga mendukung ekosistem tepi danau dan menjadi daya tarik untuk wisatawan.

Pengembangan secara spasial di KTA Simanindo dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan ruang untuk kegiatan Pariwisata sesuai 5 (lima) tahap pengembangan. Untuk tahap pertama, pemanfaatan ruang untuk atraksi dan amenities akan diarahkan pada kawasan agrowisata dan wisata campuran di Sub KTA Tuktuk-Tomok-Ambarita sebagai induk KTA Simanindo. Pemanfaatan ruang juga akan diarahkan untuk kawasan wisata budaya di sekitar DTW Museum Huta Nibolon di Sub KTA Simanindo, tepatnya di wilayah Simanindo Sangkal dan Simarmata. Selain itu pengembangan dilakukan di Sub KTA Aek Natonang tepatnya di kawasan wisata alam Aek Natonang serta di wilayah wisata budaya Martoba. Ruang yang dikembangkan ialah amenities dan akomodasi berupa pondok wisata (*homestay*).

Pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, pemanfaatan ruang diarahkan pada kawasan permukiman di Desa Simarmata, Desa Dos Roha, dan Desa Cinta Dame sebagai kawasan tempat tinggal tenaga kerja yang bekerja pada sektor Pariwisata di kawasan tersebut. Pengembangan juga dilakukan di kawasan wisata hutan di wilayah Lontung dan agrowisata di Martoba sebagai atraksi dan amenitas pendukung. Pada tahap keempat dan tahap kelima, pemanfaatan ruang KTA Simanindo akan difokuskan pada permukiman di Desa Simarmata dan Desa Tomok.

3. Rencana Pengembangan KTA Pangururan

Pengembangan KTA Pangururan diarahkan dengan tema wisata berbasis alam atau geowisata, sesuai potensi bentang alam dan *geosite* yang khas. Lokus pengembangan KTA Pangururan mencakup Sub KTA Pangururan, Sub KTA Parbaba, dan Sub KTA Huta Namora. Sub KTA Pangururan diarahkan menjadi induk KTA Pangururan karena berada di area Pariwisata yang telah berkembang di perkotaan Pangururan, sedangkan Sub KTA Parbaba, Sub KTA Huta Namora, dan di Harian (Menara Panorama Tele dan sekitarnya) akan dikembangkan pada tahap berikutnya. Karakter ruang di KTA Pangururan seperti perkotaan pada umumnya yang terdiri dari area aktivitas Pariwisata campuran dan pelayanan Pariwisata. Sebagian besar Sub KTA berupa area Pariwisata aktivitas campuran, kecuali Sub KTA Parbaba yang memiliki ruang sebagai pelayanan Pariwisata.

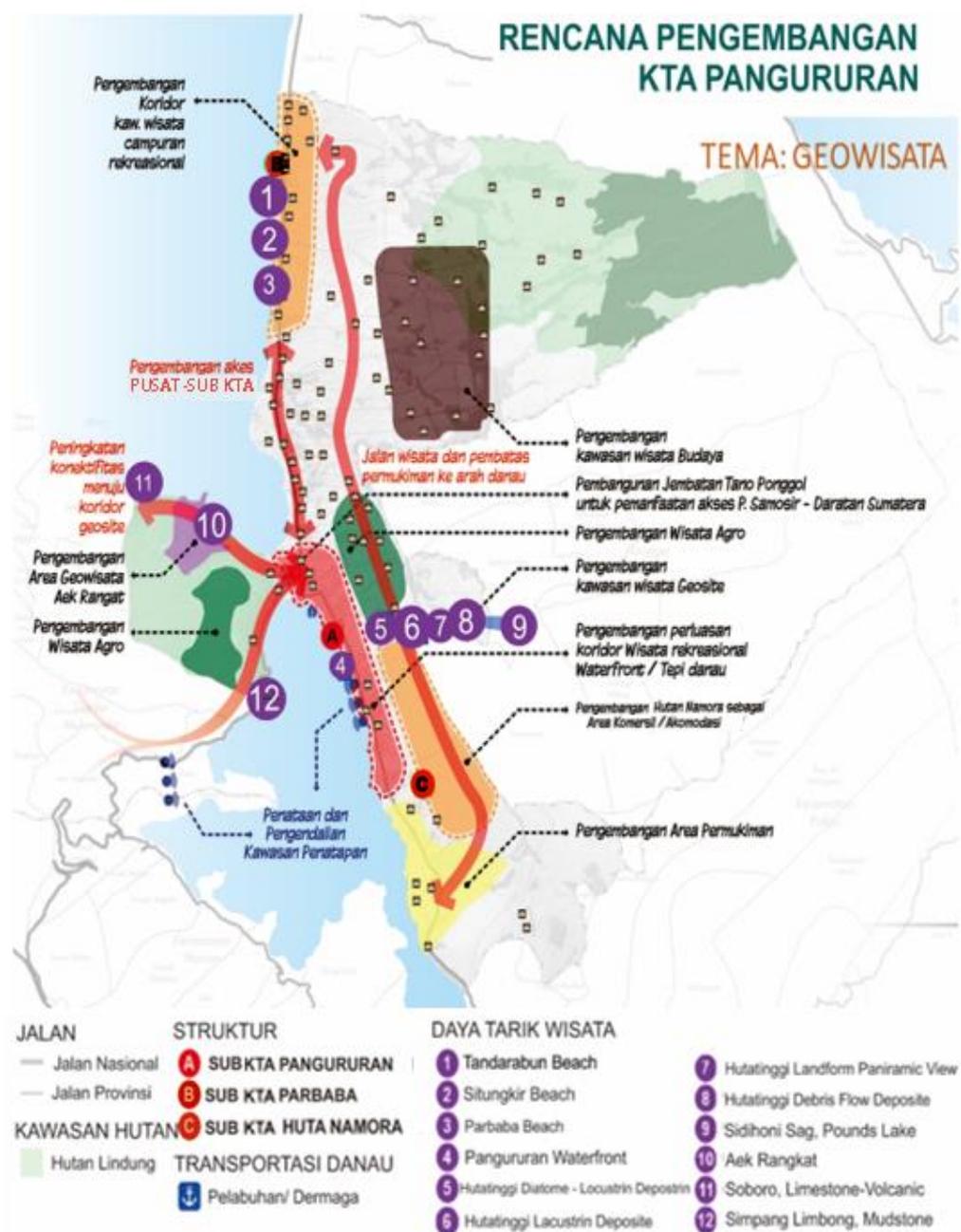
Ruang aktivitas ini bersifat terbuka dan menunjukkan karakter tema KTA berupa geowisata. Penataan bentang alam difokuskan pada wisata muka air dengan Gunung Pusuk Buhit sebagai orientasinya. Keberadaan wisata muka air yang luas memanjang, alur dan jembatan Tano Ponggol, serta koridor yang ramah terhadap pejalan kaki berpotensi menjadi ikon Sub KTA Pangururan yang merupakan gerbang menuju kawasan Danau Toba bagian barat. Pengembangan juga dilaksanakan untuk pusat pelayanan perkotaan dan fasilitas akomodasi wisata melalui perbaikan kualitas fisik lingkungan serta perbaikan sarana dan prasarana perkotaan, sehingga menjadi lebih representatif untuk kegiatan Pariwisata. Ruang di Sub KTA Pangururan juga dapat digunakan sebagai area penyelenggaraan festival/acara. Pelayanan komersial termasuk pedagang kaki lima ditata dan dikendalikan di area tertentu.

Gambar 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -



Gambar 6. Rencana Pengembangan KTA Pangururan

Pola ruang di Sub KTA Pangururan tersedia untuk menampung kegiatan Pariwisata adalah campuran, rimba kota, Pariwisata, perdagangan dan jasa skala wilayah perencanaan, perdagangan dan jasa skala kota, perkebunan, perumahan kepadatan rendah, perumahan kepadatan sedang, perumahan kepadatan tinggi, sarana pelayanan umum skala kecamatan, serta taman kota. Kebutuhan residensial didistribusikan di atas peruntukan pola ruang perumahan kepadatan rendah, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan

kepadatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

kepadatan tinggi. Kebutuhan ruang untuk akomodasi diletakkan di atas peruntukan pola ruang perdagangan dan jasa skala wilayah perencanaan, perdagangan dan jasa skala kota, perumahan kepadatan rendah, serta sarana pelayanan umum skala kecamatan.

Pengembangan Sub KTA Parbaba akan dilakukan dengan tema wisata berbasis rekreasional, dengan mengutamakan pemberdayaan ekonomi lokal. Pengembangan kawasan Sub KTA Parbaba dilakukan secara terkendali dan tertata untuk menjaga sempadan danau, terutama terkait dengan keberadaan akomodasi berupa hotel dan pondok wisata (*homestay*), serta rumah makan, kafe, dan lainnya. Kawasan Sub KTA Parbaba direncanakan bersifat terbuka, ramah terhadap pejalan kaki, memiliki sistem pengaturan lalu lintas yang baik, serta pengendalian pembangunan fisik permanen. Ruang terbuka diatur antara ruang untuk pembangunan berbagai fasilitas pelayanan Pariwisata dan ruang untuk permukiman/perkampungan tradisional.

Pengembangan Sub KTA Huta Namora difokuskan pada wisata berkelas dengan fasilitas resor dan lapangan golf bernuansa geowisata. Ruang aktivitas direncanakan bersifat terbuka, ramah terhadap pejalan kaki, serta mencakup bangunan dan lanskap yang tertata rapi dan pemandangan terbuka. Perancangan hotel dan lapangan golf wajib memperhatikan aspek lingkungan, terutama dalam penggunaan dan pengelolaan limbah.

Pola ruang pada wilayah KTA Pangururan diarahkan pada pengembangan wisata berbasis alam dengan pemanfaatan potensi pertanian dan *geosite*. Kealamian ruang perkebunan dan pertanian tetap dijaga dengan membangun beberapa fasilitas Pariwisata yang terbatas dan terukur. Pada kawasan Tele atau Menara Pandang, penanganan ruang aktivitas wisata akan dibatasi karena lokasi yang berada di dinding kaldera (*caldera wall*).

Kebutuhan ruang untuk akomodasi di KTA Pangururan diletakkan di atas peruntukan pola ruang perdagangan dan jasa skala wilayah perencanaan, perdagangan dan jasa skala kota, perumahan kepadatan rendah, serta sarana pelayanan umum skala kecamatan. Kebutuhan ruang atraksi dan amenitas diletakkan di atas peruntukan Pariwisata dan rimba kota, serta di tempat yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata seperti peruntukan pola ruang rimba kota, taman kota, dan perkebunan.

Penataan ruang terbuka perlu memberikan rasa aman bagi wisatawan yang berkunjung dan menjaga pemandangan indah (*scenic vista*) ke arah Danau Toba dan dinding kaldera (*caldera wall*) melalui Menara Pandang Tele yang merupakan ruang terbuka unggulan di KTA Pangururan. Ruang terbuka ini dapat mengarahkan pandangan wisatawan ke arah danau dan dinding kaldera (*caldera wall*) saat menyusuri jalan yang berbentuk rute berpemandangan indah (*scenic road*). Jalur hijau dikembangkan untuk mendukung tema

wisata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

wisata geologi dan alam dengan menciptakan suasana yang sejuk dan teduh. Area hijau pada sempadan danau perlu dipertahankan untuk mendukung ekosistem tepi danau dan sekaligus menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan.

Pengembangan secara spasial di KTA Pangururan dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan ruang untuk kegiatan Pariwisata, sesuai dengan 5 (lima) tahap. Pada tahap pertama, pemanfaatan ruang Sub KTA Pangururan diarahkan pada kawasan pusat Pangururan sebagai kawasan wisata campuran dan kawasan komersial, Sub KTA Parbaba sebagai kawasan wisata alam dan komersial, Sub KTA Huta Namora sebagai kawasan komersial, kawasan Rianiate sebagai area permukiman, dan kawasan Aek Rangat sebagai area geowisata.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, pemanfaatan ruang KTA Pangururan diarahkan di sekitar kawasan wisata alam kaki Gunung Pusuk Buhit dan wisata budaya Huta Batak di sekitar kawasan Pardomuan Nauli dan Lumban Suhi-suhi, serta di wilayah Tanjung Bunga dan Siopat Sosor untuk agrowisata. Pada tahap keempat dan tahap kelima, pemanfaatan ruang di DTW utama akan terus diperkuat.

4. Rencana Pengembangan KTA Balige

Pengembangan KTA Balige difokuskan pada wisata berbasis pusaka perkotaan, sesuai dengan daya tarik unggulan yakni Pasar Onan Balerong, Museum TB Silalahi, Makam Sisingamangaraja XII, dan beberapa bangunan bersejarah lainnya merupakan ruang aktivitas yang bersifat terbuka dan ramah untuk pejalan kaki. Lokus pengembangan KTA Balige terdiri dari Sub KTA Balige sekaligus sebagai pusat perkotaan berada di area Pariwisata yang berkembang, dan Sub KTA Lumban Pea sebagai daerah penyangga.

Pada Sub KTA Lumban Pea, pemanfaatan ruang difokuskan pada kawasan Pariwisata terpadu yang terdiri dari DTW buatan dan fasilitas Pariwisata. Ruang aktivitas bersifat terbuka, ramah terhadap pejalan kaki, dilengkapi dengan bangunan dan lanskap tertata rapi sebagai satu kesatuan kawasan yang terencana, serta pemandangan terbuka ke arah danau. Kawasan sains dan teknologi menjadi ikon dengan desain futuristik dan lanskap yang menarik namun tetap menunjukkan identitas lokal. Ruang terbuka dapat berfungsi sebagai area pelaksanaan festival/acara.

Kawasan antara Sub KTA Balige dan Sub KTA Lumban Pea adalah kawasan Lumban Bulbul yang akan dipertahankan sebagai kawasan wisata muka air dan di bagian selatannya sebagai kawasan agrowisata. Kealamian ruang pertanian tetap dijaga dan dipertahankan dengan membangun beberapa fasilitas Pariwisata yang terbatas dan terukur.

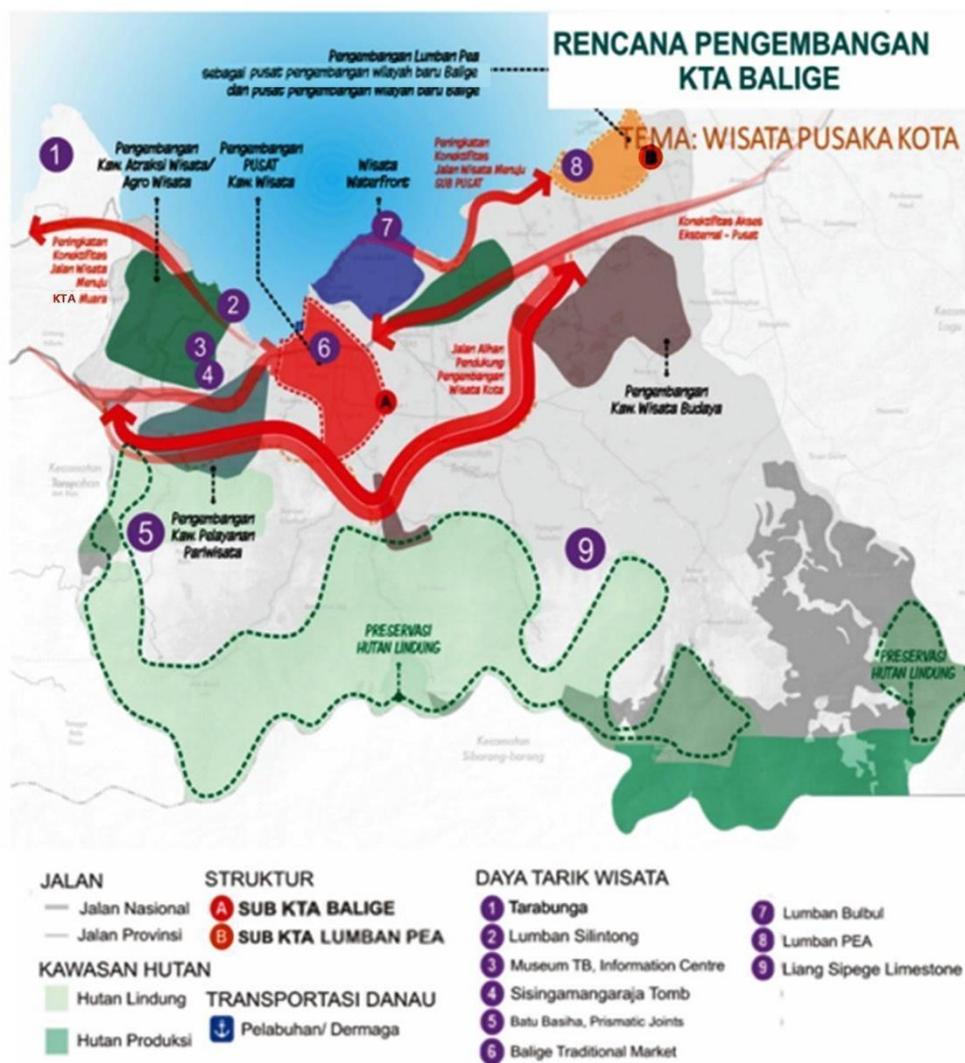
Kawasan di sebelah barat Sub KTA Balige adalah kawasan Lumban Silintong yang tetap dijaga keaslian sebagai ruang perkebunan dan pertanian dengan dukungan beberapa fasilitas Pariwisata yang terbatas dan terukur.

Gambar 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -



Gambar 7. Rencana Pengembangan KTA Balige

Kehadiran ruang terbuka wisata pusaka perkotaan, menjadi sangat penting di Sub KTA Balige. Penataan yang penting pada ruang terbuka milik umum di kawasan ini adalah menjaga pandangan ke dan dari ruang terbuka agar tidak terhalang bangunan, tanaman, petunjuk arah, dan lainnya. Pembatas baik yang keras (pagar dan lainnya) ataupun lunak (tanaman dan lainnya) dikendalikan sehingga memberikan rasa aman bagi wisatawan yang berkunjung, serta menjaga pandangan indah ke arah danau di utara dan pegunungan di selatan yang menjadi unggulan ruang terbuka ini, dan sekaligus menjadi menara pandang dan *scenic road* dari jalan yang melaluinya. Tata hijau juga harus mendukung wisata pusaka perkotaan. Area hijau pada sempadan danau perlu dipertahankan untuk mendukung

ekosistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

ekosistem tepi danau sekaligus menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan.

Distribusi ruang di KTA Balige direncanakan berdasarkan kebutuhan lahan, ketersediaan lahan, dan rencana pemanfaatan ruang Pariwisata sesuai 5 (lima) tahap pengembangan. Pada tahap pertama, pemanfaatan ruang KTA Balige diarahkan pada ruang atraksi di Pasar Bareleng dan Lumban Pea, lalu diperluas ke ruang atraksi serta amenitas di Lumban Silintong dan Desa Hinalang Bagasan. Untuk mengakomodir kawasan bermukim bagi tenaga kerja di sektor Pariwisata akan dikembangkan kawasan permukiman di Sub KTA Balige. Sub KTA Balige di area Lumban Pea Timur juga dikembangkan, terutama pada kawasan wisata rekreatif seperti kawasan sains dan teknologi.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, pengembangan KTA Balige akan difokuskan untuk ruang amenitas serta akomodasi di Lumban Pea dan Lumban Bulbul sebagai fasilitas penunjang Pariwisata untuk DTW di sekitarnya. Pemanfaatan ruang KTA Balige diarahkan di sekitar Jalan Elak yakni di kawasan Sangkar Nihuta sebagai area layanan Pariwisata, kawasan Batu Basiha sebagai area agrowisata dan kawasan Sibolahotang Sas sebagai area agrowisata dan permukiman. Sub KTA Muara dan Sub KTA Baktiraja pada tahap ini telah menerima distribusi wisatawan dari Sub KTA Balige dan Sub KTA Lumban Pea, sehingga diarahkan menjadi sebuah KTA baru, yaitu KTA Muara yang akan dijelaskan secara lebih lanjut.

Pada tahap keempat dan tahap kelima, pengembangan KTA Balige diarahkan untuk kawasan permukiman di Desa Sibolahotang Sas. Pemanfaatan ruang KTA Balige diarahkan pada kawasan Baruara sebagai area wisata budaya.

5. Rencana Pengembangan KTA Muara

Pengembangan KTA Muara direncanakan menjadi kawasan Pariwisata budaya-geologi. Sebagian besar kawasan Muara merupakan area yang tidak terlalu lebar, sehingga arah pengembangannya difokuskan untuk menjaga kondisi lingkungan alam sebaik mungkin.

Pengembangan Sub KTA Muara dilakukan melalui pendekatan Desa Wisata, dengan Desa Ulos sebagai ikon. Kelestarian permukiman tradisional dijaga termasuk bentang alam di sekitarnya. Aktivitas di sempadan danau diatur dan dibatasi. Ruang-ruang publik yang memiliki akses ke danau serta area pertanian dikendalikan dari pembangunan fisik, atau dibatasi dengan daerah penyangga, terutama terkait aktivitas layanan komersial (permanen dan pedagang kaki lima).

Sub KTA . . .

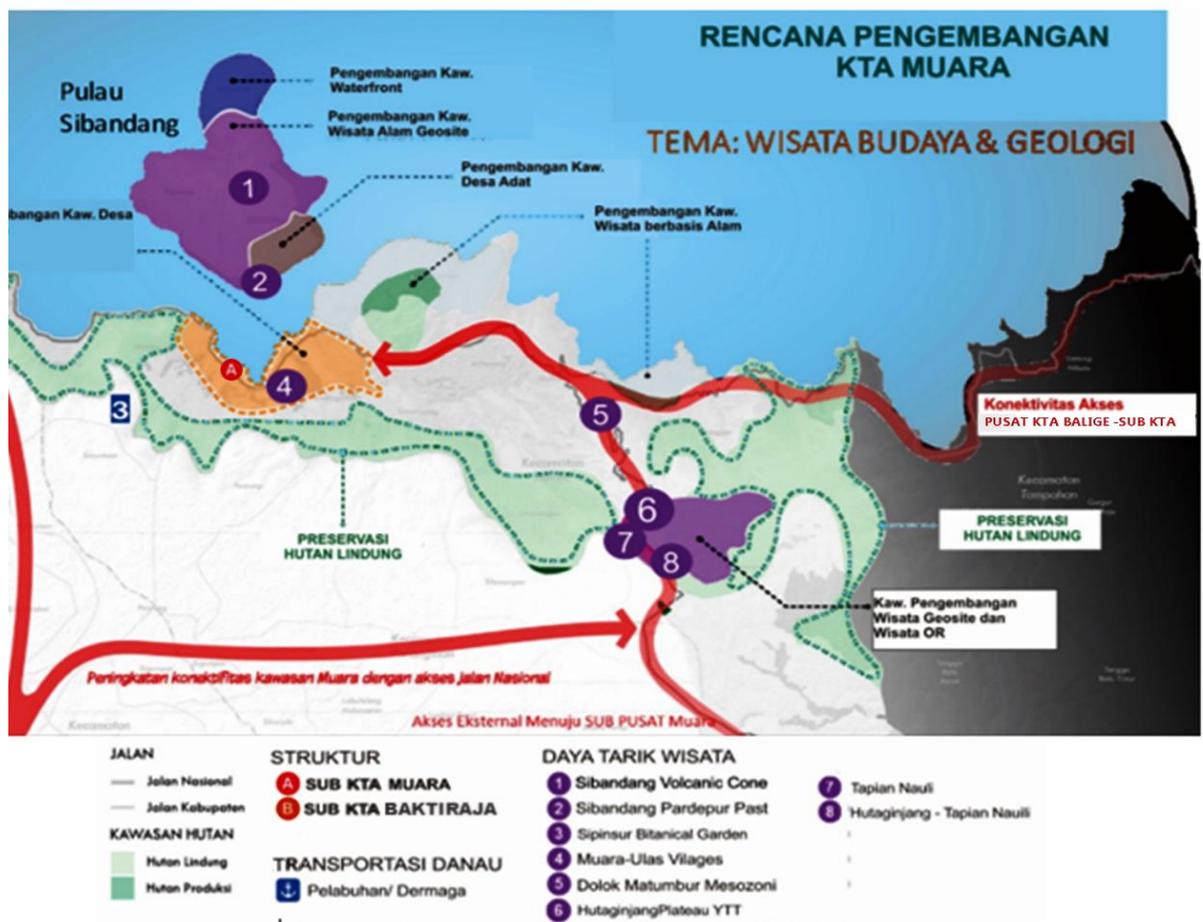


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Sub KTA Muara juga memiliki Pulau Sibandang yang berbasis wisata alam dan preservasi aset lingkungan. Ruang wisata dibangun harmonis dengan lingkungan alam dan permukiman tradisional, serta terbuka dan ramah untuk pejalan kaki. Area lain seperti Kawasan Sipinsur dan Kawasan Hutan Ginjang akan dikembangkan wisata berbasis alam dengan memanfaatkan potensi *geosite* dan mengutamakan pelestarian lingkungan. Selain *geosite*, potensi wisata juga dimiliki oleh perkebunan di wilayah Silali Toruan dan Batu Binumbun. Kealamian ruang perkebunan tetap dijaga dengan membangun beberapa fasilitas Pariwisata yang terbatas dan terukur.

Pola ruang di KTA Muara yang tersedia untuk menampung kegiatan Pariwisata ini adalah campuran, rimba kota, Pariwisata, perdagangan dan jasa skala wilayah perencanaan, perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, perumahan kepadatan rendah, perumahan kepadatan sedang, serta perumahan kepadatan tinggi. Kebutuhan residensial didistribusikan di atas peruntukan pola ruang perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah.



Gambar 8. Rencana Pengembangan KTA Muara

Kebutuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Kebutuhan ruang untuk akomodasi diletakkan di atas peruntukan pola ruang perdagangan dan jasa skala bagian wilayah perencanaan, perdagangan dan jasa skala kota, serta perumahan kepadatan sedang. Kebutuhan ruang atraksi dan amenitas diletakkan di peruntukan Pariwisata, serta di tempat-tempat yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata.

Pada tahap kedua dan ketiga, pengembangan KTA Muara akan diarahkan untuk *geosite* dan amenitas di Pulau Sibandang sebagai kawasan wisata alam dan campuran. Selain itu pengembangan *geosite* dan amenitas juga dilakukan di Sub KTA Muara, serta kawasan Sipinsur sebagai wisata campuran dan Kawasan Huta Ginjang sebagai area geowisata. Fasilitas akomodasi yang akan dikembangkan berupa penambahan kamar pondok wisata (*homestay*) di KTA Muara yang terdiri dari Desa Huta Nagodang dan Desa Unte Mungkur. Pengembangan KTA Muara akan diarahkan untuk wisata di kawasan Silalahi Toruan dan di kawasan Batu Binumbun dan Desa Unte Mungkur, serta pengembangan permukiman di Desa Dolok Matumbur. Sub KTA Muara dan Sub KTA Baktiraja pada tahap ini telah menerima distribusi wisatawan dari KTA Balige. Pada tahap keempat dan tahap kelima, pengembangan yang sudah ada akan terus diperkuat.

6. Rencana Pengembangan KTA Merek

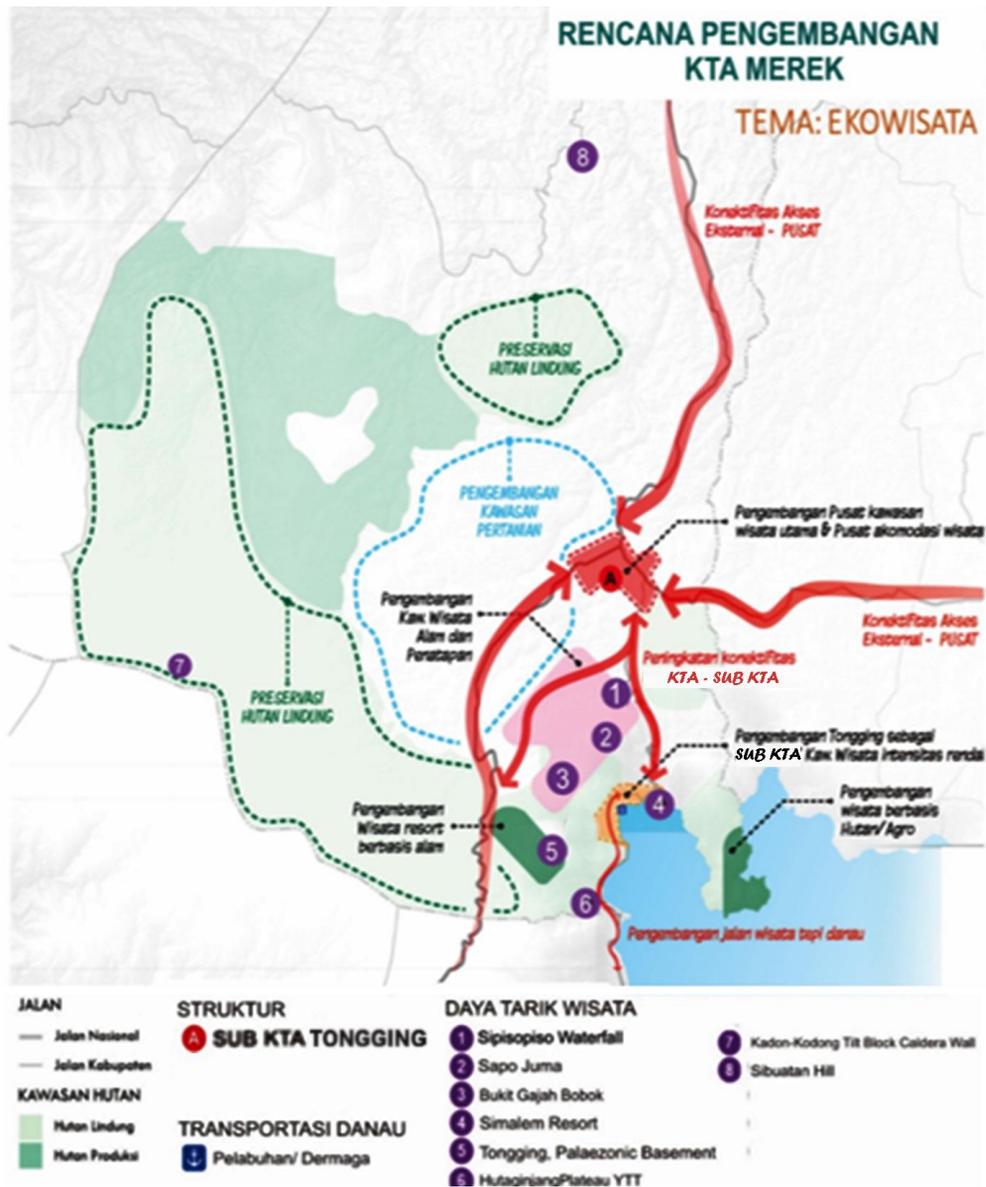
Pengembangan KTA Merek difokuskan pada tema ekowisata. Beberapa kawasan berciri perdesaan dikembangkan sebagai kawasan perdesaan tematik wisata. Perkembangan saat ini di KTA Merek belum beragam dan secara umum fungsi ruang diisi aktivitas perdagangan dan permukiman, sementara ruang area induk Sub KTA berupa area aktivitas Pariwisata campuran. Mayoritas pemanfaatan ruang KTA Merek dilaksanakan dengan prinsip preservasi lingkungan. Pengembangan fasilitas Pariwisata seperti akomodasi hotel serta perdagangan dan jasa akan difokuskan pada KTA Merek. Selain menyediakan amenitas, KTA Merek juga menyediakan kawasan permukiman untuk penduduk dan pekerja. Permukiman dapat dijadikan pondok wisata (*homestay*) yang dirancang tertata rapi dan tetap mempertahankan karakter perdesaan dan perkebunan.

Gambar 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -



Gambar 9. Rencana Pengembangan KTA Merek

Pengembangan KTA Merek diarahkan untuk layanan Pariwisata, perdagangan dan jasa, serta akomodasi terutama di kawasan KTA Merek yakni Desa Tongging. Pemanfaatan ruang juga diarahkan di kawasan wisata campuran berupa amenitas di kawasan Sub KTA Merek, serta pengembangan kawasan agrowisata di Simalem Resort.

Pengembangan KTA Merek juga diarahkan untuk pengembangan wisata di Desa Sibolangit sebagai area agrowisata. Pemanfaatan ruang juga diarahkan pada permukiman di Sub KTA Merek sebagai wadah untuk menampung tenaga kerja yang bertambah akibat meningkatnya kegiatan Pariwisata. Pada tahap keempat dan tahap kelima dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap akomodasi dan permukiman di KTA Merek.

B. Pembangunan DTW . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

B. Pembangunan DTW

1. Pengembangan DTW di KTA Parapat

Pariwisata MICE dan rekreasi yang akan dikembangkan di KTA Parapat didukung dengan pengembangan potensi alam dan budaya. Tema ini juga dipadukan dengan suasana pinggir kota yang berada di lahan berbukit bergaya kolonial dengan memanfaatkan peninggalan bangunan dan lanskap bersejarah yang ada.

Sesuai rencana pengembangan spasial, pengembangan DTW di KTA Parapat pada tahap pertama akan difokuskan pada 2 (dua) Sub KTA yaitu Sub KTA Parapat-Ajibata dan Sub KTA Sibisa yang akan dikembangkan menjadi beberapa segmen sesuai karakteristik fisik dan kegiatan wisata, sebagai berikut:

- a. segmen Pantai Bebas-Hotel Inna Parapat (Hotel Khas):
 - 1) mengembangkan kegiatan wisata muka air, untuk melihat pemandangan (*sightseeing*), berjalan-jalan, berfoto, bermain, maupun kuliner;
 - 2) merevitalisasi kegiatan wisata tirta yang sudah ada, berupa naik perahu dan bermain air di bagian-bagian pantai berpasir putih; dan
 - 3) mengembangkan kegiatan pendukung wisata di koridor jalan sepanjang wisata muka air yang menghubungkan fungsi penunjang wisata (hotel dan restoran) dengan ruang publik dan tepian danau.
- b. segmen "Alun-alun" Parapat-Rumah Pengasingan Bung Karno:
 - 1) membentuk taman kota yang berisi fungsi museum, galeri pengetahuan, fasilitas wisata rekreasi-edukasi beserta fasilitas pendukungnya;
 - 2) mengadaptasi bangunan mess komando daerah militer, PT Perkebunan Nusantara, dan pemerintah daerah menjadi museum, galeri pengetahuan, serta fasilitas wisata rekreasi-edukasi; dan
 - 3) revitalisasi Rumah Pengasingan Bung Karno.
- c. segmen Kampung (Nelayan) Tiga Raja: menata kampung untuk layak dijadikan destinasi kampung masyarakat lokal.
- d. segmen Pelabuhan Ajibata-Long Beach Ajibata: menata lingkungan pantai.
- e. segmen Pantai Bebas-Terminal Sosor Saba Parapat: menata lingkungan pantai.

DTW di Sub KTA Sibisa yang akan dikembangkan, yaitu Wilayah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dalam bentuk Toba Caldera Resort sebagai kawasan wisata terpadu yang mencakup beberapa fasilitas MICE bertaraf internasional, akomodasi, restoran dan kafe, serta jalur *trekking* atau sepeda untuk mengakses dan menikmati hutan dan desa di sekitarnya. Sesuai dengan rencana induk

Badan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, segmen Toba Caldera Resort yang akan dikembangkan pada tahap pertama adalah wilayah seluas 68,74 ha (enam puluh delapan koma tujuh empat hektare) dengan fokus pada pengembangan akomodasi yaitu *iconic/flagship hotel*, *upscale-luxury hotel*, dan hotel butik, *glamping* tepi tebing, dan pembangunan kawasan komersial seperti *retail strip*, *village strip*, *retail-box*, *convenience center*, area pendidikan dan sains, area bermain anak dalam ruangan, titik pandang pinggir tebing dan titik pandang matahari terbenam. *Geopark Tourism Information Center* (TIC), juga akan dikembangkan sebagai pusat informasi Danau Toba dengan statusnya sebagai *Geopark Global Partner*.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, DTW yang akan dikembangkan yaitu Panatapan Parapat sebagai area wisata hutan, DTW Girsang sebagai kawasan wisata budaya, DTW Sibaganding sebagai area agrowisata, serta Monkey Forest sebagai area wisata hutan. Di bagian pesisir utara Sub KTA Parapat terdapat koridor Panatapan Parapat yang berada di lokasi kemiringan lereng yang cukup curam namun memiliki potensi daya tarik pemandangan langsung ke Danau Toba.

Pengembangan potensi wisata di jalur timur KTA Parapat di antaranya mencakup pengembangan wisata alam dan wisata budaya di Desa Girsang Sipangan Bolon dengan memanfaatkan potensi hutan serta keberadaan Huta Batak. Kelestarian perkampungan tradisional Batak juga dijaga termasuk lanskap yang menjadi bagian dari struktur ruangnya. Dalam perkembangan akses baru jalan tol, DTW ini akan menjadi titik henti pertama bagi wisatawan untuk menyaksikan keindahan lanskap Danau Toba.

Pengembangan DTW Sibaganding difokuskan pada wisata alam, *geosite*, potensi agrowisata serta keanekaragaman flora dan fauna yang dikemas dalam produk ekowisata seperti Taman Wisata Kera Sibaganding dan Aek Nauli Elephant Conservation Camp. Sementara pengembangan pada Sub KTA Sibisa, difokuskan pada pengembangan segmen Toba Caldera Resort seluas 59,31 ha (lima puluh sembilan koma tiga satu hektare). Fokus pengembangan pada fasilitas antara lain:

- a. kelanjutan pembangunan area hotel: hotel keluarga, hotel skala menengah, resor pantai, dan hotel pantai;
- b. pembangunan fasilitas konvensi dan hiburan seperti *green MICE venue*, area pendukung MICE, serta area makanan dan minuman;
- c. hunian tapak kelas menengah-atas (*holiday villa lagoon*) dan hunian tapak kelas atas (*branded residence*); dan
- d. pembangunan wisata buatan taman bertema (*theme park*) untuk merespon permintaan wisatawan yang sudah semakin meningkat.

Pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pada tahap keempat dan tahap kelima pengembangan KTA Parapat akan lebih diarahkan untuk memperkuat area wisata hutan di Bukit Parapat khususnya di wilayah Desa Girsang. Pengembangan pada Sub KTA Sibisa, yaitu di Toba Caldera Resort akan difokuskan pada area seluas 75,79 ha (tujuh puluh lima koma tujuh sembilan hektare), yang mencakup antara lain: hotel keluarga, MICE *venue and hotel*, hunian tapak kelas menengah dan atas, hunian vertikal (*low-rise condominium*), dan area-area lain yang dapat dikembangkan untuk tahap berikutnya.

2. Pengembangan DTW di KTA Simanindo

Pengembangan DTW di KTA Simanindo mengutamakan pelestarian keaslian aset budaya dan alam tradisional Batak, serta pengembangan aset wisata yang telah ada untuk menjadi DTW yang lebih baik. Pola pengembangannya adalah wisata budaya serta tempat peristirahatan dengan suasana pedesaan yang berada di lahan mendatar antara tepi danau dan kaki gunung. Karakter bangunan dan lanskap tradisional Batak di kawasan ini akan direvitalisasi, terutama pada perkampungan tradisional Batak yang memiliki peninggalan arkeologi.

Sesuai dengan rencana pengembangan spasial, pengembangan DTW di KTA Simanindo akan dikembangkan menjadi beberapa segmen dengan mengutamakan pelestarian warisan budaya dan alam, sebagai berikut:

- a. segmen Ambarita: merehabilitasi Huta Siallagan dan area di sekitarnya melalui pemugaran/pelestarian cagar budaya dan mengembangkannya menjadi ikon utama Pariwisata Simanindo. Klaster Segmen Ambarita (Huta Siallagan) memiliki peninggalan arkeologi berupa Batu Persidangan dan Batu Eksekusi yang berada di tepi danau;
- b. segmen Tuktuk Siadong: mengembangkan jalur wisata haiking di area perbukitan Bukit Beta dan sekitarnya;
- c. segmen Tomok: merehabilitasi Huta Sidabutar dan area di sekitarnya melalui pemugaran/pelestarian cagar budaya serta mengembangkannya menjadi ikon utama Pariwisata Simanindo;
- d. segmen antara Ambarita-Tuktuk Siadong-Tomok: memiliki aset lanskap khas berupa bentangan sawah dan huta sehingga perlu dilakukan:
 - 1) pelestarian aset/warisan budaya dan alam, khususnya Huta Batak dan sawah, untuk memperkuat identitas kawasan dan DTW;
 - 2) pengembangan jalur wisata haiking di area perbukitan lereng bagian timur Pulau Samosir menuju air terjun dan agrowisata di area persawahan; dan
 - 3) pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda antara Ambarita-Tuktuk Siadong-Tomok,

e. segmen . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- e. segmen Aek Natonang: mengembangkan wisata berbasis alam. Area yang akan dikembangkan yaitu kebun raya, yang dilengkapi dengan *eco-camp* serta sarana edukasi yang mencakup peta interpretatif tentang keanekaragaman hayati, perpustakaan, penjualan cendera mata yang relevan, dan sebagainya. Perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat disekitarnya juga ditata dan disiapkan agar dapat dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan; dan
- f. segmen lainnya: mengembangkan wisata budaya Martoba.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, pengembangan DTW di KTA Simanindo akan difokuskan pada kawasan wisata hutan di wilayah Lontung dan agrowisata di Martoba. Pada tahap keempat dan tahap kelima, pengembangan DTW yang sudah ada akan terus diperkuat.

3. Pengembangan DTW di KTA Pangururan

Tema wisata yang diusung di KTA Pangururan yaitu geologi dan alam yang mendukung pengembangan warisan budaya dan lingkungan yang ada di sekitar Pangururan. Atraksi akan difokuskan pada wisata rekreasi tepi danau, yang didukung barisan dinding kaldera di bagian barat, Huta Batak, gereja hasil akulturasi budaya Batak dan agama Kristen, bangunan bergaya kolonial, serta kehidupan kota yang aktif.

Sesuai dengan rencana pengembangan spasial, pengembangan DTW di KTA Pangururan pada tahap pertama akan difokuskan pada Sub KTA Pangururan, Sub KTA Parbaba, Sub KTA Huta Namora, dan kawasan Aek Rangat. Segmen ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian, rencana pengembangan atraksi per segmen sebagai berikut:

- a. segmen Pangururan dengan DTW yang memanjang dari poros utama utara-selatan kota Kecamatan Pangururan dan wisata muka air danau:
 - 1) koridor Gerbang Kota sampai Taman Liberty Malau: mengembangkan kegiatan wisata kota di sepanjang koridor dengan memanfaatkan obyek bersejarah seperti kompleks Gereja Bolon Huria Kristen Batak Protestan Pangururan, rumah dinas Bupati Samosir dan warisan bangunan bersejarah di sekitarnya, serta mengembangkan Huta Batak;
 - 2) koridor Taman Liberty Malau-Pasar Onan Baru-Rumah Sakit Umum Daerah Pangururan:
 - a) mengembangkan kegiatan wisata belanja dan kuliner di area Pasar Onan Baru serta menjadikannya sebagai simpul utama wisata kota dengan memanfaatkan pengembangan yang membuka pemandangan ke arah muka air; dan

b) melestarikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- b) melestarikan dan mengembangkan obyek bersejarah seperti Huta Batak sebagai DTW.
- 3) Wisata muka air danau: menata dan mengembangkan kegiatan muka air, baik yang bersifat melihat pemandangan, berjalan-jalan, berfoto, bermain, maupun yang bersifat kuliner (makan dan minum) dengan memanfaatkan lahan reklamasi yang ada dan diintegrasikan dengan penataan yang telah dilakukan. Ruang di segmen ini juga dapat digunakan sebagai area penyelenggaraan acara/festival, dengan pemandangan Danau Toba berlatar belakang dinding kaldera.
- b. segmen Parbaba: mengembangkan wisata berbasis rekreasional di Pantai Parbaba, Pantai Situngkir, dan Pantai Tandarabun.
- c. segmen Huta Namora: mengembangkan wisata berkelas dengan fasilitas resor dan lapangan golf bernuansa geowisata dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
- d. segmen Aek Rangat: mengembangkan wisata pemandian air panas yang berkualitas dengan pengelolaan sesuai standar internasional.

Kawasan lainnya yang akan dikembangkan pada tahap pertama yaitu:

- a. Tano Ponggol yang merupakan satu-satunya tempat di mana daratan Sumatera bertemu dengan Pulau Samosir, meskipun kemudian jadi terpisah karena kanal air yang dibangun pada masa penjajahan oleh Belanda. Kawasan ini merupakan penghubung Pulau Samosir dan daratan Sumatera melalui transportasi darat, serta menjadi gerbang masuk ke Pulau Samosir secara umum dan Kota Pangururan secara khusus. Atraksi yang akan dikembangkan di Tano Ponggol antara lain: menyediakan area pandang yang aman dan nyaman bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan Danau Toba dengan maksimal.
- b. Kawasan Air Terjun Efrata yang terletak di Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga DTW yang dikembangkan mencakup kawasan wisata alam di kaki Gunung Pusuk Buhit dan wisata budaya Huta Batak di sekitar Kawasan Pardomuan Nauli dan Lumban Suhi-suhi. Pengembangan agrowisata juga dilakukan di wilayah Tanjung Bunga dan Siopat Sosor. Kemudian terdapat kawasan Sianjur Mulamula yang merupakan area *geosite* Pusuk Buhit dimana terdapat TIC *Geopark* Kaldera Toba dan beberapa elemen *geosite* lain dan DTW budaya. Pada kawasan Tele atau Menara Pandang akan dilakukan penataan sesuai daya dukung lokasi yang berada di dinding kaldera. Pada tahap keempat dan tahap kelima, pengembangan DTW utama akan diperkuat.

4. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

4. Pengembangan DTW di KTA Balige

Tema wisata yang diusung untuk KTA Balige adalah wisata pusaka perkotaan melihat dari perkembangan sejarah kawasan ini dan posisinya sebagai pusat pengembangan wilayah. Peran yang diambil adalah sebagai pusat layanan perkotaan dan akomodasi wisata bagi DTW yang sudah cukup dikenal, serta dekat dengan Bandar Udara Silangit dan dilalui oleh jalan lintas tengah Sumatera. Bentang alamnya sebagian besar terdiri dari dataran yang berada di tepi danau dan dikelilingi oleh pegunungan di sisi lainnya.

Pengembangan KTA Balige diarahkan pada revitalisasi bangunan cagar budaya yang menjadi DTW seperti Pasar Onan Balerong dan peninggalan kolonial seperti makam dan museum. Atraksi Pariwisata kota juga didukung penataan lalu lintas. Di sekitar koridor jalan alihan akan dikembangkan permukiman yang bersifat perkampungan tradisional dan wisata budaya yang memanfaatkan potensi Huta Batak. Pengembangan wisata akan berbasis pada preservasi budaya, termasuk lanskap yang menjadi bagian dari struktur ruangnya. Kawasan ini juga dapat dilengkapi dengan pengembangan pondok wisata (*homestay*) yang menggunakan rumah penduduk atau rumah baru. Selain wisata budaya, direncanakan pula pengembangan wisata alam dengan salah satu elemen *geosite*, yaitu Liang Sipege.

Sesuai dengan rencana pengembangan spasial, pengembangan DTW di KTA Balige pada tahap pertama akan difokuskan pada atraksi di Sub KTA Balige yaitu Pasar Onan Balerong dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Balige, Sub KTA Lumban Pea, serta kawasan lain seperti Lumban Silintong dan kawasan lain di sekitarnya. Rencana pengembangan atraksi per segmen adalah sebagai berikut:

- a. segmen Balige: merupakan pusat layanan wisata yang dibagi menjadi 4 (empat) koridor yaitu:
 - 1) Koridor Pasar Onan Balerong dan poros barat-timur Kota Balige:
 - a) merehabilitasi Pasar Onan Balerong dan area di sekitarnya melalui pemugaran/pelestarian cagar budaya serta mengembangkannya menjadi ikon utama (titik pusat) Pariwisata Kota Balige; dan
 - b) mengembangkan kegiatan wisata kota di sepanjang koridor poros barat-timur Kota Balige dengan memanfaatkan titik-titik obyek bersejarah seperti Monumen Raja Sonak Malela, Tugu Donald Isaac Panjaitan, Makam Raja Pardede, Huta Napitupulu, Makam Napitupulu, Masjid Al-Hadhonah, dan lainnya sebagai DTW.

2) koridor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- 2) koridor Huria Kristen Batak Protestan Balige-Rumah Sakit-Huria Kristen Batak Protestan dan poros pusat kota ke selatan, serta Segmen Tugu Donald Isaac Panjaitan dan poros pusat kota ke utara yang merupakan kawasan yang bersisian langsung dengan Danau Toba: melestarikan Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Rumah Sakit Umum Daerah Balige dan area perumahan kolonial di sekitarnya, serta mengembangkan fasilitas tambahan yang mendukung pengembangan fungsi bangunan tersebut sebagai DTW dengan tetap menjaga fungsi utama dan kelestariannya; dan
- 3) koridor area wisata muka air Balige, terbagi menjadi:
 - a) menata dan mengembangkan kegiatan muka air, baik yang bersifat *sightseeing* (melihat pemandangan), berjalan-jalan, berfoto, bermain, maupun yang bersifat kuliner (makan dan minum) di wisata muka air danau; dan
 - b) menata dan mengembangkan kegiatan muka air, baik yang bersifat *sightseeing* (melihat pemandangan), berjalan-jalan, berfoto, bermain, bersepeda, maupun yang bersifat kuliner (piknik) pada spot tertentu di wisata muka air sungai.
- b. segmen Lumban Pea: mengembangkan atraksi Pariwisata terpadu yang terdiri dari DTW buatan kawasan sains dan teknologi dan fasilitas Pariwisata. Ruang terbuka dapat berfungsi sebagai area pelaksanaan festival/acara.
- c. segmen Lumban Silintong: mengembangkan wisata berbasis pertanian (agrowisata) dan budaya dengan atraksi utama Museum Tiopan Bernhard Silalahi yang menyuguhkan kebudayaan Batak mulai dari artefak (benda budaya) hingga lanskap sawah. Museum ini juga merupakan salah satu *geosite* dan dapat menjadi titik awal produk wisata *geotrail*. Di sebelah selatan kawasan ini terdapat kawasan Sangkar Nihuta yang direncanakan berfungsi sebagai pusat pelayanan Pariwisata.
- d. segmen kawasan lainnya: Lumban Bulbul yang berada di bagian timur dari Sub KTA Balige yang sebagian besar merupakan persawahan yang mempunyai potensi sebagai DTW baru karena keindahan pemandangannya dan perannya dalam sejarah Kota Balige. Pada kawasan Lumban Bulbul akan dilakukan penataan kawasan pantai publik. Di sebelah selatan kawasan Lumban Bulbul terdapat Desa Sibolahotang Sas yang akan dikembangkan sebagai kawasan agrowisata. Wisatawan dapat menggunakan akses yang juga digunakan untuk aktivitas pertanian. Desa Sibolahotang Sas juga memiliki perkampungan tradisional yang dapat dikunjungi sebagai bagian dari wisata budaya.

Pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, pengembangan KTA Balige akan difokuskan untuk memperkuat atraksi di Lumban Pea dan Lumban Bulbul serta kawasan Batu Basiha dan Sibolahotang Sas sebagai area agrowisata. Pada tahap keempat dan tahap kelima, pengembangan atraksi di KTA Balige diarahkan untuk memperluas DTW ke kawasan Baruara sebagai area wisata budaya.

5. Pengembangan DTW di KTA Muara

Pengembangan DTW di KTA Muara akan dilaksanakan pada tahap kedua dan tahap ketiga. Pengembangan KTA Muara difokuskan pada tema wisata budaya-geologi karena masih memiliki permukiman tradisional, bentangan sawah dan Pulau Sibandang sebagai pulau kedua terbesar di Danau Toba. Pengembangan difokuskan pada kawasan yang sudah ada dengan menjaga tata kawasan berkarakter perdesaan serta bangunan-bangunan dan lanskap tradisional Batak melalui aktivitas pembuatan ulos. Pengembangan difokuskan pada peningkatan kualitas wisata dan pendukungnya dengan tetap menjaga kelestarian dan keaslian warisan budaya dan alam (geologi).

Geosite Bakkara-Tipang sebagai suatu saujana yang sangat menarik dan panoramik memiliki kekayaan sejarah dan budaya berupa Tombak Sulu-sulu dan Air Terjun Binanga Janji. Kawasan ini juga memiliki Istana Sisingamangaraja, Desa Wisata Tipang, Tomak Hatuanan, Sumur Aek Sipangolu dan Aek Sitio-tio, Tapak Arkeologis Hariara Tungkot dan Tempat Sakral Batu Hundul-hundulan, serta titik pandang antara Bakkara dan Huta Ginjang berupa Hutan Pinus Sipinsur dengan panorama danau yang indah. Pengembangan agrowisata kopi Lintong di Huta Ginjang dan desa di sekitarnya akan dikembangkan sebagai kawasan ekowisata berbasis masyarakat.

Desa Wisata Ulos diperkuat sebagai ikon di Sub KTA Muara dan dilengkapi dengan ruang-ruang pameran untuk menjual produk ulos. Wisatawan dapat mengunjungi dan tinggal di pondok wisata (*homestay*) bersama masyarakat lokal, serta mempelajari cara pembuatan ulos pada desa-desa binaan. Pengembangan atraksi di kawasan Sipinsur dan kawasan Huta Ginjang akan difokuskan pada wisata alam dengan memanfaatkan potensi *geosite* dan perkebunan di wilayah Silali Toruan dan Batubinumbun.

Pengembangan Pulau Sibandang dilakukan dengan fokus wisata berbasis alam di desa wisata dan mengutamakan preservasi aset lingkungan. Pulau Sibandang merupakan *geosite* dan DTW unggulan, dimana wisatawan dapat menikmati produk wisata yang bernuansa perdesaan tradisional dan unsur-unsur *geopark*. Wisatawan dapat menggunakan akses yang juga digunakan untuk aktivitas perkebunan. Perkebunan yang dimiliki masyarakat akan ditata dan disiapkan agar dapat dikunjungi oleh wisatawan.

Pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Pada tahap keempat dan tahap kelima, pengembangan KTA Muara akan diarahkan untuk mendistribusikan wisatawan dari Sub KTA Muara dan Sub KTA Baktiraja bagian timur yang sudah cukup dikenal wisatawan ke bagian barat yang relatif belum dikenal.

Secara umum, arah pelaksanaan pengembangan DTW di KTA Muara mencakup:

- a. melestarikan bangunan cagar budaya berikut lanskap agar sesuai dengan kondisi semula dan mempertahankan nilai kesejarahannya. Pelestarian bangunan tradisional Batak dapat dilakukan untuk Ruma Bolon Marhutala Manurung di Jangga Dolok yang dapat mengikuti pola preservasi lanskap budaya seperti di Kampung Naga, Jawa Barat. Penyediaan area pandang yang terbuka dapat mencontoh bangunan Harder Kulm Aussichtsplattform di Swiss;
 - b. menyediakan area pandang yang aman dan nyaman bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan dengan maksimal;
 - c. menata bangunan dan lanskap kawasan agar lebih menarik dan bisa menampung pengunjung serta tetap menjaga agar tidak merusak dan mengganggu pandangan warisan budaya dan alam (geologi);
 - d. memperbanyak informasi dan keterangan mengenai DTW yang ada melalui pengadaan penunjuk arah, papan informasi, dan lainnya; dan
 - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas publik (seperti toilet, tempat ibadah, penyediaan tempat sampah terpilah, dan kios) serta membuatnya sesuai dengan standar internasional.
6. Pengembangan DTW di KTA Merek

Merek merupakan kawasan yang didominasi oleh alam dan masih sangat sedikit dikembangkan. Pengembangan DTW di KTA Merek akan dilaksanakan pada tahap kedua dan ketiga, pengembangan difokuskan pada tema ekowisata dengan prinsip melestarikan keaslian aset alam di kawasan ini, serta mengembangkan aset wisata yang telah ada menjadi DTW yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian.

Arah pengembangan DTW di KTA Merek adalah menyediakan area wisata alam dengan prinsip ekologi yang kuat untuk menjaga kelestarian alam. Dengan lahan mendatar yang terbatas, pengembangan wisata difokuskan pada area yang masih alami di pegunungan dan dataran yang berdekatan dengan Danau Toba dalam skala kecil dan bersifat petualangan jelajah alam.

Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Pengembangan KTA Merek ditunjang oleh keberadaan 2 (dua) *geosite*, yaitu Dinding Kaldera Utara Sipiso-piso-Tongging (Sipiso-piso-Tongging, *Northern Caldera Wall*) di Kabupaten Karo dan Dinding Kaldera Barat (*Western Caldera Wall*) Silalahi-Sabungan di Desa Silahi Sabungan di Kabupaten Dairi. Selain itu terdapat Air Terjun Sipiso-piso yang merupakan air terjun tertinggi keenam di Indonesia, panorama Bukit Gajah Bobok, serta Kebun Bunga dan Panorama Sapo Juma. Beberapa desa wisata yang potensial seperti desa tradisional Dokkan, Kawasan Wisata Simalem dengan agrowisata, dan panorama indah, serta Desa Tongging di tepi danau yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdesaan tematik wisata.

Selain Sipiso-piso, pengembangan agrowisata juga dilakukan di kawasan Sibolangit dan Mulia Rakyat. Selanjutnya, terdapat Simalem Resort yang akan dikembangkan sebagai kawasan Pariwisata terpadu. Pengembangan juga diarahkan di kawasan wisata campuran berupa amenitas di Sub KTA Tongging.

Pola ruang Pariwisata di Sub KTA Tongging adalah hutan lindung dan perumahan kepadatan rendah. Kawasan yang direncanakan untuk pertanian hortikultura dapat dimanfaatkan untuk kegiatan atraksi dan amenitas secara selektif. Sedangkan kegiatan akomodasi Pariwisata dan residensial dapat memanfaatkan rencana pola ruang perumahan kepadatan rendah. Bentuk akomodasi yang dapat dikembangkan adalah pondok wisata (*homestay*).

Pada tahap keempat dan kelima, KTA Merek diarahkan untuk saling menunjang dan memperkuat Kepariwisata dengan DTW Kabupaten Karo yang saat ini berada di Berastagi dengan perannya sebagai pusat rekreasi keluarga, kebun bunga dan hortikultura, wisata sejarah seperti Rumah Pengasingan Bung Karno, serta salah satu titik transit bagi wisatawan yang akan ke Tangkahan atau Bukit Lawang.

C. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

1. Pengembangan Aksesibilitas KTA Parapat

Aksesibilitas dari dan menuju KTA Parapat diarahkan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:

- a. jalur utara yang sekarang merupakan jalur utama menuju Bandar Udara Kualanamu;
- b. jalur timur yang direncanakan akan dibangun jalan tol sebagai jalan alihan; dan
- c. jalur selatan yang menghubungkan KTA Parapat menuju Bandar Udara Sibisa.

Pengembangan aksesibilitas akan difokuskan pada jalur timur dan jalur selatan. Jalur timur dikembangkan untuk mendukung pengembangan potensi DTW di sebelah timur, sedangkan jalur selatan dikembangkan untuk meningkatkan akses wisatawan yang datang melalui Ruas Jalan Aek Natolu Ajibata dari Bandar Udara Sibisa menuju KTA Parapat.

Keterpaduan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Keterpaduan infrastruktur aksesibilitas juga dibangun mencakup:

- a. penataan manajemen lalu lintas perkotaan Parapat-Ajibata, penyediaan bus wisata, serta peningkatan kualitas pelabuhan dan Pasar Tiga Raja;
- b. pemeliharaan akses jalan untuk mendukung aksesibilitas menuju area wisata Parapat-Ajibata, serta konektivitas jalan menuju dan dari Bandar Udara Sibisa dan Pelabuhan Ajibata; dan
- c. penataan dan pengaktifan kembali Terminal Sosor Saba Parapat sebagai *hub* untuk peralihan moda dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang dilengkapi jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.

Sebagai area wisata rekreasi, pola transportasi akan diutamakan dengan menyediakan jalur pejalan kaki yang nyaman, ruang untuk sepeda dan penyewaan sepeda, serta angkutan umum ramah lingkungan. Volume lalu lintas kendaraan akan dibatasi. Jalur kendaraan menuju Pelabuhan Ajibata dari arah Pematang Siantar/Berastagi yang selama ini melalui tengah kawasan Parapat, akan dialihkan melalui bagian luar. Pola ini mendorong pengembangan baru yang diarahkan ke selatan dan melebar ke Ajibata, di mana saat ini ruang yang tersedia masih cukup kosong dan secara kontur lebih mendatar dibandingkan dengan sisi utara. Arah pengembangan ini juga membuat Parapat menjadi lebih dekat ke daerah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba di Sibisa.

2. Pengembangan Aksesibilitas KTA Simanindo

Pengembangan aksesibilitas menuju KTA Simanindo direncanakan melalui transportasi danau yang bertolak dari KTA Parapat dan melalui jalan lingkar Pulau Samosir. Pengaturan sistem lalu lintas dilaksanakan dengan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor yang akan menyeberang dari Parapat ke Simanindo, dimana wisatawan dapat memarkirkan kendaraannya di terminal kantong parkir Parapat. Wisatawan yang melalui jalur darat dari Pangururan diarahkan untuk memarkir kendaraannya di terminal kantong parkir Simanindo dan kemudian menggunakan transportasi publik atau berjalan kaki di jalur yang disediakan. Kawasan di sekitar pelabuhan ditata dengan baik dengan area komersial yang terintegrasi dengan pelabuhan. Area ini akan menjadi ruang tunggu pengunjung.

Rencana pengembangan dan penataan aksesibilitas secara terpadu di KTA Simanindo sebagai berikut:

- a. penataan manajemen lalu lintas Kecamatan Simanindo, beserta penyediaan bus wisata;
- b. perbaikan jalan untuk mendukung aksesibilitas menuju area wisata Simanindo serta konektivitas menuju lingkar Kabupaten Samosir; dan

c. penataan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- c. penataan pola transportasi yang diutamakan untuk manusia dengan menyediakan jalur pejalan kaki yang nyaman, ruang untuk sepeda dan penyewaan sepeda, serta angkutan umum ramah lingkungan. Pembatasan kendaraan bermotor akan dilakukan untuk keseluruhan Pulau Samosir dari semua titik masuknya.
3. Pengembangan Aksesibilitas KTA Pangururan

Aksesibilitas menuju KTA Pangururan dikembangkan melalui jalan lingkar Pulau Samosir, serta melalui jembatan Tano Ponggol sebagai penghubung antara Pulau Samosir dengan daratan Sumatera di kawasan Danau Toba bagian barat. Lalu lintas utama akan diatur dengan pengalihan ke jalan elak (*bypass*). Selain itu direncanakan dibangun terminal kantong parkir yang membantu untuk mengendalikan lalu lintas di dalam perkotaan Pangururan. Rencana pengembangan aksesibilitas di KTA Pangururan yang terpadu mencakup:

 - a. penataan manajemen lalu lintas di Kecamatan Pangururan serta meningkatkan pelayanan bagi wisatawan melalui bus wisata; dan
 - b. perbaikan jalan untuk mendukung aksesibilitas menuju area wisata Pangururan, serta rehabilitasi jembatan di kawasan Tano Ponggol.
 4. Pengembangan Aksesibilitas KTA Balige

Pengembangan aksesibilitas menuju KTA Balige, diarahkan melalui jalur selatan yang bertolak dari Bandar Udara Silangit, serta jalan elak (*bypass*) yang mengalihkan pergerakan jalur jelajah wisata pusaka perkotaan. Jalur kendaraan pada jalan nasional yang melalui pusat kota Balige akan dialihkan melalui bagian luar. Jalan memutar ini juga bisa membantu mengarahkan pengembangan KTA Balige untuk tetap terfokus di bagian barat, sehingga hamparan persawahan sebagai salah satu warisan budaya Balige yang mendominasi bagian timur masih bisa dipertahankan. Rencana penataan aksesibilitas di KTA Balige secara umum sebagai berikut:

 - a. penataan manajemen lalu lintas di Kota Balige, penyediaan bus wisata, serta penyusunan rencana induk transportasi kawasan Lumban Pea; dan
 - b. pengembangan akses jalan elak (*bypass*) Balige menuju area wisata Balige serta pelebaran ruas jalan provinsi dan ruas jalan kabupaten menuju KTA Balige.
 5. Pengembangan Aksesibilitas KTA Muara

Pengembangan aksesibilitas menuju KTA Muara diarahkan melalui jalur selatan yang bertolak dari Bandar Udara Silangit serta jalan elak (*bypass*) yang mengalihkan pergerakan dari jalur jelajah wisata pusaka perkotaan. Pulau Sibandang yang berada di KTA Muara, merupakan pulau terbesar kedua di Danau Toba setelah Pulau Samosir. Wisatawan yang ingin menuju Pulau Sibandang hanya dapat mengakses transportasi air.

Transportasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

Transportasi di Pulau Sibandang harus dilakukan dengan mengedepankan pengelolaan yang ramah lingkungan dengan kendaraan bermotor yang dialihkan menjadi kendaraan ramah lingkungan, kecuali untuk menangani keadaan darurat dan keperluan logistik.

Rencana pembangunan infrastruktur aksesibilitas di KTA Muara sebagai berikut:

- a. penataan manajemen lalu lintas di Kecamatan Muara serta menyediakan bus untuk layanan wisatawan; dan
- b. peningkatan akses menuju Bandar Udara Silangit, akses menuju area Wisata Huta Ginjang serta perbaikan dan pelebaran jalan kabupaten.

6. Pengembangan Aksesibilitas KTA Merek

Aksesibilitas ke KTA Merek terhubung dengan pusat Pariwisata Kabupaten Karo yang saat ini berada di Berastagi, yang menjadi salah satu titik transit bagi wisatawan yang akan ke Tangkahan atau Bukit Lawang. Aksesibilitas internal KTA Merek akan ditingkatkan melalui jalan tepi danau, serta akses dari KTA menuju Sub KTA, misalnya perbaikan akses menuju area wisata Tongging dan Paropo (lingkar dalam Danau Toba) di Kecamatan Silahisabungan, serta pelebaran jalan kabupaten pendukung KTA Merek. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan juga akan dilengkapi dengan penataan manajemen lalu lintas di Kecamatan Merek serta menyediakan bus untuk layanan wisatawan.

Pada area wisata alam ini dilakukan pembatasan kendaraan bermotor karena secara topografi tidak memungkinkan dan untuk mengurangi kemungkinan perambahan. Pola transportasi direncanakan untuk mengutamakan jalur kendaraan publik dengan skema shuttle dari DTW satu ke DTW yang lain. Kendaraan bermotor yang diperbolehkan hanya milik penduduk, untuk keadaan darurat dan keperluan logistik perlahan dialihkan menjadi kendaraan ramah lingkungan.

D. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

1. Pengembangan Fasilitas Umum dan Amenitas di KTA Parapat

Pengembangan fasilitas umum di KTA Parapat difokuskan pada pemanfaatan fasilitas yang ada, peningkatan kualitas, serta pembangunan fasilitas yang belum tersedia. Pelaksanaannya secara umum meliputi:

- a. pembangunan jaringan drainase serta perluasan pada kecamatan sekitarnya;
- b. peningkatan jaringan dan akses air minum perpipaan di beberapa lokasi seperti Aek Haming ke Parapat dan Sibisa, Aek Parsigoman ke Sibisa dan Ajibata, distribusi di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, dan sebagainya;

c. penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- c. penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL), pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Komunal, penghilangan buang air besar sembarangan, dan sebagainya;
- d. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Parapat, sarana pengumpul, serta Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS3R) baru;
- e. elektrifikasi 100% (seratus persen) untuk pelanggan baru serta peningkatan keandalan jaringan distribusi;
- f. penambahan layanan telepon bergerak menjadi 100% (seratus persen) dan penambahan fiber optik;
- g. infrastruktur dasar dan lanskap kawasan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (jalan lingkungan, drainase, jaringan air baku dan air bersih, gardu distribusi, jaringan listrik, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah dan limbah padat, serta jaringan gas); dan
- h. infrastruktur fasilitas umum dan penunjang Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (gedung pengelola, pusat budaya, pusat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), politeknik Pariwisata, arboretum, amfiteater, dan fasilitas pemadam kebakaran).
Sementara itu pengembangan amenitas Pariwisata di KTA Parapat difokuskan pada kawasan wisata muka air Parapat-Ajibata sesuai dengan karakteristik fisik dan kegiatan wisata, antara lain:
 - a. segmen Pantai Bebas-Hotel Khas Parapat: membuat akses bagi wisatawan untuk dapat mencapai muka air;
 - b. segmen "Alun-alun" Parapat-Rumah Pengasingan Bung Karno:
 - 1) memadukan blok "Alun-alun" Parapat, kavling mess komando daerah militer, PT Perkebunan Nusantara, dan pemerintah daerah, serta blok Rumah Pengasingan Bung Karno menjadi suatu area yang terbuka bagi kegiatan wisata; dan
 - 2) merelokasi semua kios yang berjajar di tepi jalan, yang menghalangi kontinuitas pergerakan dan visual di area ini, ke lokasi khusus yang disediakan untuk fungsi pendukung wisata.
 - c. segmen Kampung Nelayan Tiga Raja:
 - 1) menata dan meningkatkan kualitas fisik lingkungan di area ini dengan menonjolkan karakter aslinya sebagai kampung masyarakat lokal di tepian danau; dan
 - 2) mengembangkan bagian tepi danau menjadi bagian muka blok Kampung Tiga Raja, melalui penataan jalur pejalan kaki dan kavling di sepanjang tepian danau sehingga memiliki muka ke arah tepian danau.

d. segmen . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- d. segmen Pelabuhan Ajibata–Long Beach Ajibata:
 - 1) menata dan meningkatkan kualitas fisik lingkungan melalui pengembangannya menjadi kawasan urban campuran berkepadatan menengah, yang terintegrasi dengan fungsi pelabuhan penyeberangan kapal feri;
 - 2) mengembangkan bagian tepi danau menjadi wisata muka air melalui pengembangan area publik di sepanjang tepian danau dan penataan blok/kavling sehingga memiliki muka ke arah tepian danau; dan
 - 3) meningkatkan kualitas fisik lingkungan serta sarana dan prasarana obyek wisata Long Beach Ajibata sehingga memberikan kenyamanan yang lebih bagi para wisatawan.
- e. segmen Pantai Bebas-Terminal Sosor Saba Parapat:
 - 1) meningkatkan kualitas fisik lingkungan serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pariwisata di sepanjang koridor jalan nasional, seperti perbaikan fisik jalur pejalan kaki beserta kelengkapannya, pengaturan lalu lintas, parkir, dan lainnya; dan
 - 2) menata dan meningkatkan kualitas fisik lingkungan permukiman agar nyaman dilalui sebagai jalur alternatif menuju titik wisata lainnya dimulai dari Pantai Bebas.

Penataan dan penyediaan amenities pada KTA Parapat, dengan fokus:

- a. memberikan akses yang nyaman bagi wisatawan untuk menuju DTW dan menikmati pemandangan terbuka ke arah Danau Toba;
- b. menyediakan area parkir dan fasilitas pendukungnya seperti toilet, tempat duduk, dan lain-lain;
- c. melengkapi penunjuk arah dan informasi lokasi; dan
- d. menata pusat penjualan makanan minuman dan produk masyarakat lokal.

Beberapa fasilitas Pariwisata berupa amenities juga akan dibangun yang terdiri dari anjungan tunai mandiri, fasilitas ibadah, rumah makan, fasilitas kesehatan, minimarket, serta fasilitas keamanan dan keselamatan.

2. Pengembangan Fasilitas Umum dan Amenitas di KTA Simanindo

Pengembangan fasilitas umum di KTA Simanindo difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang terpadu, antara lain:

- a. pembangunan jaringan drainase di KTA Simanindo dan perluasan pada kecamatan sekitarnya serta pembangunan kolam retensi genangan dalam mengatasi banjir;
- b. peningkatan kualitas air minum perpipaan, *intake* dan jaringan transmisi di Kecamatan Simanindo, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kabupaten, kecamatan, dan perdesaan;

c. pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- c. pembangunan SPALD terpusat skala kawasan, komunal, dan perkotaan di KTA Simanindo untuk meningkatkan akses SPALD aman;
- d. pengembangan sarana pengumpul di KTA Simanindo untuk mengangkut sampah dari sumber ke Tempat Pemrosesan Sementara (TPS);
- e. elektrifikasi 100% (seratus persen) untuk menyalurkan listrik ke pelanggan baru serta meningkatkan keandalan jaringan distribusi di KTA Simanindo; dan
- f. penambahan layanan telepon bergerak menjadi 100% (seratus persen) serta penambahan fiber optik.

Pengembangan fasilitas umum dilengkapi dengan pengembangan amenities yang difokuskan pada segmen-segmen DTW di KTA Simanindo sebagai berikut:

- a. segmen Ambarita:
 - 1) menata area komersial beserta fasilitas pendukung/tambahan lainnya sehingga keaslian kompleks Huta Siallagan dapat dimunculkan kembali dan ditingkatkan daya tariknya; dan
 - 2) meningkatkan kualitas fisik lingkungan serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pariwisata, seperti penataan area pelabuhan, penambahan fungsi pelayanan perkotaan, perbaikan fisik jalur pejalan kaki beserta kelengkapannya, pengaturan lalu lintas dan parkir.
- b. segmen Tuktuk:
 - 1) meningkatkan kualitas fisik lingkungan serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pariwisata di Tuktuk, seperti penambahan fungsi pelayanan lingkungan, perbaikan fisik jalur pejalan kaki beserta kelengkapannya, pengaturan lalu lintas dan parkir, serta lainnya; dan
 - 2) merevitalisasi hotel agar sesuai standar pelayanan ke depan.
- c. segmen Tomok:
 - 1) menata area komersial fasilitas pendukung/tambahan lainnya sehingga keaslian kompleks Huta Sidabutar dapat dimunculkan kembali dan ditingkatkan DTWnya; dan
 - 2) meningkatkan kualitas fisik lingkungan dan sarana prasarana pendukung kegiatan Pariwisata di area pelabuhan Tomok dan di sepanjang koridor jalan lingkaran Samosir, seperti penataan area pelabuhan dan pasar, perbaikan fisik jalur pejalan kaki beserta kelengkapannya, serta pengaturan lalu lintas dan parkir.
- d. segmen di antara Ambarita-Tuktuk Siadong-Tomok: mencegah pola pengembangan linear (*ribbon development*) di sepanjang jalan lingkaran Samosir dan menetapkan blok-blok yang diperuntukkan khusus untuk aktivitas komersial, dengan tidak menghalangi bentang alam dan bentang budaya/saujana asli di kawasan ini.

e. segmen . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- e. segmen lainnya: area pertanian dan perkebunan terutama di sepanjang jalan raya dijaga dan tidak tertutup elemen apapun. Ruang aktivitas ditingkatkan agar ramah terhadap pejalan kaki dan penyediaan sarana pendukung seperti penunjuk arah, tempat duduk, dan lainnya.

Pola pengembangan amenities akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya seperti toilet, anjungan tunai mandiri, fasilitas ibadah, rumah makan, fasilitas kesehatan, minimarket, fasilitas keamanan dan keselamatan.

3. Pengembangan Fasilitas Umum dan Amenitas di KTA Pangururan

KTA Pangururan dikembangkan menjadi pusat pelayanan perkotaan dan fasilitas akomodasi wisata yang dilakukan melalui perbaikan kualitas fisik lingkungan serta perbaikan sarana dan prasarana perkotaan, sehingga menjadi lebih representatif. Fasilitas umum yang akan dibangun antara lain:

- a. pembangunan jaringan drainase;
- b. peningkatan kualitas air minum dengan pembangunan *water treatment plant* (WTP) Parjonggi, WTP Parbaba, serta perluasan jaringan pipa distribusi Kecamatan Pangururan;
- c. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Perkotaan di Kecamatan Pangururan untuk meningkatkan akses SPALD aman;
- d. pengembangan sarana pengumpul serta melakukan pembangunan TPS3R baru;
- e. elektrifikasi 100% (seratus persen) untuk menyalurkan listrik ke pelanggan baru serta meningkatkan keandalan jaringan distribusi; dan
- f. penambahan layanan telepon bergerak menjadi 100% (seratus persen) serta penambahan fiber optik.

Sementara itu, pengembangan amenities Pariwisata di KTA Pangururan difokuskan pada segmen-segmen utama, yaitu:

- a. segmen Pangururan yang mencakup tiga bagian yaitu:
 - 1) Koridor Gerbang Kota sampai Taman Liberti Malau:
 - a) meningkatkan kualitas fisik lingkungan serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pariwisata di sepanjang koridor, seperti perbaikan jalur pejalan kaki dan kelengkapannya, serta pengaturan lalu lintas dan parkir; dan
 - b) mengembangkan fasilitas pendukung Pariwisata yang representatif seperti hotel, rumah makan, dan fasilitas seni budaya/hiburan, khususnya di area komersial di sekitar Taman Liberti.
 - 2) Koridor Taman Liberti Malau-Pasar Onan Baru-Rumah Sakit Umum Daerah Pangururan:

a) meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- a) meningkatkan kualitas fisik lingkungan serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pariwisata di sepanjang koridor Poros Taman Liberty Malau sampai ke Pasar Onan Baru dan Rumah Sakit Umum Daerah Pangururan/Kompleks Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangururan, seperti perbaikan jalur pejalan kaki beserta kelengkapannya, pengembangan jalur sepeda, pengaturan lalu lintas dan parkir, dan lainnya; dan
 - b) mengembangkan fasilitas pendukung Pariwisata yang representatif seperti hotel, rumah makan, dan fasilitas seni budaya/hiburan, di sepanjang koridor jalan utama.
- 3) Wisata muka air danau:
- a) menata jalan dan bangunan dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangururan sampai dengan Dermaga Onan Baru; dan
 - b) mengembangkan fasilitas pendukung Pariwisata yang representatif seperti hotel, rumah makan, dan fasilitas seni budaya/hiburan, di sepanjang koridor jalan utama.
- b. segmen Parbaba: mengembangkan wisata berbasis rekreasional di Pantai Parbaba, Pantai Situngkir, dan Pantai Tandarabun.
- c. segmen Huta Namora: mengembangkan wisata berkelas dengan fasilitas resor dan lapangan golf bernuansa geowisata dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
- d. segmen Aek Rangat:
- 1) menata bangunan yang sudah ada agar lebih menarik serta sesuai standar internasional untuk kebersihan dan kenyamanan;
 - 2) mengintegrasikan kompleks pemandian dengan kondisi alam eksisting dan memaksimalkan pemandangan ke danau; dan
 - 3) menata gerbang kawasan agar lebih menarik serta menata jalan menuju dan di dalam kawasan menjadi jalur yang lebih nyaman untuk wisata berjalan kaki dan bersepeda.
- e. segmen Tano Ponggol:
- 1) menata bangunan dan lanskap kawasan agar lebih menarik dan bisa menampung pengunjung; dan
 - 2) mengintegrasikan kompleks area pandang agar tidak menghalangi arus kendaraan di jalan dan memaksimalkan pemandangan ke pegunungan.

Amenitas di KTA Pangururan juga akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas Pariwisata berupa anjungan tunai mandiri, fasilitas ibadah, rumah makan, fasilitas kesehatan, minimarket, serta fasilitas keamanan dan keselamatan.

4. pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

4. Pengembangan Fasilitas Umum dan Amenitas di KTA Balige

Pengembangan fasilitas umum di KTA Balige akan mencakup keterpaduan infrastruktur dasar sebagai berikut:

- a. pembangunan jaringan drainase serta pembangunan kolam retensi genangan;
- b. peningkatan kualitas air minum perpipaan, pembangunan *intake* dan jaringan transmisi Kecamatan Balige serta pembangunan SPAM ibu kota Kecamatan dan Perdesaan;
- c. pembangunan SPALD Terpusat skala kawasan dan perkotaan untuk meningkatkan akses SPALD aman;
- d. pengembangan sarana pemilahan dan pewadahan/pengumpulan untuk mengangkut sampah dari sumber ke TPS;
- e. elektrifikasi 100% (seratus persen) untuk menyalurkan listrik ke pelanggan baru serta meningkatkan keandalan jaringan distribusi; dan
- f. penambahan layanan telepon bergerak menjadi 100% (seratus persen) serta penambahan fiber optik.

Pengembangan amenitas Pariwisata di KTA Balige juga akan dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) segmen sebagai berikut:

- a. segmen Balige:
 - 1) koridor Pasar Onan Balerong dan Poros Barat-Timur Kota Balige:
 - a) meningkatkan kualitas fisik lingkungan serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pariwisata di sepanjang koridor poros barat-timur Kota Balige, seperti perbaikan fisik jalur pejalan kaki beserta kelengkapannya, pengaturan lalu lintas dan parkir, dan lainnya; dan
 - b) mengembangkan fasilitas pendukung Pariwisata yang representatif seperti hotel, rumah makan, dan fasilitas seni budaya/hiburan.
 - 2) koridor Gereja HKBP Balige dan Rumah Sakit Umum Daerah Balige, serta poros pusat kota ke selatan dan Tugu Donald Isaac Panjaitan serta poros pusat kota ke utara, sampai ke Lapangan Sisingamangaraja XII: mengembangkan area lain (komersial) di sekitarnya, khususnya pada area yang berbatasan dengan pusat kota, menjadi kawasan yang representatif bagi kegiatan wisata.
 - 3) koridor area muka air (wisata muka air):
 - a) pengembangan amenitas untuk wisata muka air danau dilaksanakan dengan menjaga sempadan danau agar tetap alami dan dapat diakses oleh publik, serta menata bangunan dan jalan yang berada di tepian air (di luar sempadan) agar representatif dan memastikan ada koridor visual ke arah danau; dan

b) pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- b) pengembangan amenities untuk wisata muka air sungai dilaksanakan dengan menjaga sempadan sungai agar tetap alami dan dapat diakses oleh publik, dan menjaga kelestarian sawah yang ada di tepi sungai sebagai bagian dari warisan budaya dan potensi wisata pemandangan alam.
- b. segmen Lumban Pea:
 - 1) menata bangunan dan lanskap; dan
 - 2) mengembangkan fasilitas untuk festival/acara di ruang terbuka yang tersedia.
- c. segmen Lumban Sillitong:
 - 1) membatasi pengembangan amenities untuk menjaga ruang perkebunan dan pertanian; dan
 - 2) mengembangkan pusat layanan Pariwisata di Sangkar Nihuta.
- d. segmen Lumban Bulbul:
 - 1) membatasi fasilitas Pariwisata untuk menjaga lanskap khas hamparan sawah dan mencegah *ribbon development*;
 - 2) menata perkampungan tradisional di Desa Sibolahotang Sas untuk dapat dikembangkan pondok wisata (*homestay*) yang menggunakan rumah penduduk atau rumah baru; dan
 - 3) menerapkan daerah penyangga untuk menjaga jarak dari jalan utama.

Layanan komersial termasuk pedagang kaki lima di KTA Balige akan ditata dan dikendalikan di area tertentu dalam bentuk kios permanen yang dikelola oleh pemerintah daerah. Beberapa fasilitas Pariwisata berupa amenities akan dikembangkan terdiri dari anjungan tunai mandiri, fasilitas ibadah, rumah makan, fasilitas kesehatan, minimarket, serta fasilitas keamanan dan keselamatan.

5. Pengembangan Fasilitas Umum dan Amenitas di KTA Muara

Pengembangan fasilitas umum di KTA Muara akan mencakup keterpaduan infrastruktur dasar sebagai berikut:

- a. pembangunan jaringan drainase serta pembangunan kolam retensi genangan mengatasi banjir;
- b. peningkatan kualitas air minum perpipaan, pembangunan *miniplant* di Pulau Sibandang, perluasan jaringan distribusi, serta pembangunan SPAM perdesaan dan SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK);
- c. pembangunan SPALD terpusat skala kawasan dan perkotaan untuk meningkatkan akses SPALD serta promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan penyediaan subsidi peningkatan kualitas tangki septik;
- d. pembangunan TPS3R untuk pengelolaan dan pemrosesan/daur ulang sampah;

e. elektrifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- e. elektrifikasi 100% (seratus persen) untuk menyalurkan listrik ke pelanggan baru; dan
- f. penambahan layanan telepon bergerak menjadi 100% (seratus persen) serta penambahan fiber optik.

Sesuai dengan penahapan pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba, pengembangan amenities Pariwisata di KTA Merek disesuaikan dengan kebutuhan DTW, seperti akomodasi berupa hotel dan pondok wisata (*homestay*), rumah makan, kafe, fasilitas seni/budaya, serta fasilitas penunjang lainnya yang terdiri dari anjungan tunai mandiri, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, minimarket, serta fasilitas keamanan dan keselamatan.

Kelestarian kawasan akan dipertahankan dengan membangun beberapa fasilitas Pariwisata yang terbatas dan terukur. Ruang-ruang publik yang memiliki akses ke danau serta area pertanian dikendalikan dari pembangunan fisik atau dibatasi dengan daerah penyangga, terutama terkait aktivitas layanan komersial (permanen dan pedagang kaki lima). Amenitas juga dibangun sesuai dengan prinsip keberlanjutan, salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

6. Pengembangan Fasilitas Umum dan Amenitas di KTA Merek

Pengembangan fasilitas umum di KTA Merek akan mencakup keterpaduan infrastruktur dasar sebagai berikut:

- a. pembangunan jaringan drainase serta pembangunan kolam retensi genangan dalam mengatasi banjir;
- b. peningkatan kualitas air minum perpipaan, perluasan jaringan distribusi, serta pembangunan SPAM perdesaan dan SPAM IKK;
- c. pembangunan SPALD terpusat skala kawasan dan perkotaan untuk meningkatkan akses SPALD aman;
- d. pembangunan TPA Regional Dokan, pembangunan TPA Sidikalang, serta pengembangan sarana pengumpulan;
- e. elektrifikasi 100% (seratus persen) untuk menyalurkan listrik ke pelanggan baru; dan
- f. penambahan layanan telepon bergerak menjadi 100% (seratus persen) serta penambahan fiber optik.

Pengembangan amenities Pariwisata di KTA Merek akan difokuskan pada pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba. Arah pengembangan amenities di KTA Merek secara umum sebagai berikut:

- a. menata bangunan dan lanskap kawasan wisata agar lebih menarik dan bisa menampung pengunjung, sambil tetap menjaga agar tidak merusak dan mengganggu pandangan potensi alam. Sebagai contoh, penataan di DTW Air Terjun Sipiso-piso dapat memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk memandangi Air Terjun Sipiso-piso, Danau Toba, dan Gunung Sipiso-piso sekaligus. Penataan ini dilaksanakan dengan:

1) berorientasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- 1) berorientasi pada *viewscales* dengan membuka ruang secara masif untuk meningkatkan kualitas spasial kawasan;
 - 2) menjaga kelestarian kawasan dengan meletakkan potensi keramaian di area kedatangan dan menjauhkannya dengan kawasan wisata atraksi utama; dan
 - 3) menciptakan pengalaman kedatangan (*sense of arrival*) dengan dua lapisan gerbang.
- b. memperbanyak informasi dan keterangan mengenai DTW yang ada melalui pengadaan petunjuk arah serta papan informasi; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas publik seperti toilet, tempat ibadah, tempat sampah, kios, dan lainnya, serta membuatnya sesuai dengan standar internasional (ukuran, kualitas pengerjaan, mengikuti prinsip *universal design*, dan kebersihan).

Amenitas lain yang dapat dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan wisatawan, seperti akomodasi hotel dan pondok wisata (*homestay*), rumah makan, kafe, fasilitas seni/budaya, serta fasilitas penunjang lainnya yang terdiri dari anjungan tunai mandiri, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, minimarket, serta fasilitas keamanan dan keselamatan.

E. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Dalam RIDPN Danau Toba, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha Pariwisata. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan, dan pembukaan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan produk wisata, peningkatan kualitas dan pelayanan sarana dan prasarana, peningkatan aksesibilitas, peningkatan promosi, serta pengembangan kelembagaan, khususnya yang berkaitan dengan inovasi. Peningkatan kapasitas masyarakat diarahkan untuk:

- a. mengembangkan keterampilan, sikap, pengetahuan, keahlian, dan kreativitas, yang didukung dengan pelatihan berbasis kompetensi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang Kepariwisata, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan pelatihan termasuk pendidikan vokasi, serta ekosistem inovasi yang mendorong upaya terobosan untuk menangani tantangan pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba;
- b. mengembangkan aktivitas Pariwisata secara inklusif dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi berbagai komponen masyarakat untuk terlibat langsung dalam aktivitas Pariwisata, baik sebagai pelaku usaha Pariwisata maupun penerima manfaat dari Pariwisata. Perwujudannya misalnya dalam bentuk perhatian khusus terhadap:

1) pelatihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- 1) pelatihan kewirausahaan;
 - 2) sarana dan prasarana Pariwisata yang ramah difabel, lansia, dan anak-anak;
 - 3) pengembangan industri wisata dan desa wisata yang melibatkan partisipasi berbagai komponen masyarakat setempat; dan
 - 4) pengembangan acara dan promosi wisata yang mempertimbangkan partisipasi keragaman budaya.
- c. memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk digitalisasi, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan memperluas jangkauan dari pengembangan Pariwisata, termasuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata. Pelaksanaannya dapat melibatkan komunitas ekonomi kreatif dan digital setempat, sekaligus sebagai upaya pembinaan talenta ekonomi kreatif dan digital lokal.

Kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya secara umum terdiri dari beberapa kelompok, yaitu:

- a. penduduk lokal atau kelompok masyarakat lokal yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisataan, terutama sebagai penyedia berbagai macam layanan (produk maupun jasa);
- b. anggota masyarakat penerima manfaat sehingga mereka dapat menjadi tuan rumah yang berpengetahuan serta memiliki kesempatan untuk mengenal kawasan sekitar tempat tinggalnya yang menjadi destinasi wisatawan;
- c. kelompok generasi muda, baik yang sedang menempuh pendidikan (pelajar dan mahasiswa) maupun yang sudah tidak bersekolah, yang merupakan bagian dari sumber pasokan tenaga kerja atau calon pengusaha baru;
- d. kelompok ibu atau perempuan yang dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada penyediaan produk dan jasa wisata secara penuh atau paruh waktu;
- e. anggota masyarakat yang tergabung ke dalam organisasi masyarakat setempat seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan lainnya; dan
- f. para anggota lembaga kemasyarakatan atau organisasi nirlaba yang mempunyai misi khusus, misalnya dalam pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, penggerak pendidikan luar sekolah, dan lainnya.

Rencana dukungan peningkatan kapasitas masyarakat diuraikan dalam Tabel 4. sebagai berikut:

Tabel 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Tabel 4. Rencana Dukungan Peningkatan Kapasitas Masyarakat di
DPN Danau Toba

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KAPASITAS	PENINGKATAN KAPASITAS
PENGEMBANGAN PRODUK WISATA		
Ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> ● Mampu terlibat dalam upaya reforestasi dan perlindungan Taman Wisata Alam sekaligus pengembangan wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Edukasi peran masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan Taman Wisata Alam. ● Pelatihan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat.
Wisata Sukarelawan	<ul style="list-style-type: none"> ● Masyarakat setempat yang mampu menjadi tuan rumah program para sukarelawan. ● Dapat bekerja sama dengan pemerintah dan/atau dunia usaha untuk bersama-sama merumuskan program wisata sukarelawan. ● Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Edukasi peran masyarakat sebagai tuan rumah program wisata sukarelawan. ● <i>Workshop</i> perencanaan dan pelaksanaan wisata sukarelawan.
Geowisata	<ul style="list-style-type: none"> ● Memiliki pengetahuan dasar mengenai <i>geopark</i> dan pelestarian <i>geosite</i> terutama yang berada di lahan miliknya. ● Mampu terlibat dalam pelestarian <i>geopark</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Edukasi tentang <i>geopark</i> secara umum. ● Edukasi publik tentang peran masyarakat dalam pelestarian <i>geopark</i>. ● Muatan lokal tentang <i>geopark</i> dalam kurikulum pendidikan daerah.
Wisata Danau	<ul style="list-style-type: none"> ● Mampu memelihara kelestarian danau. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Edukasi tentang pemeliharaan kelestarian danau. ● Pelatihan tentang pengolahan limbah perikanan atau peternakan.

Wisata Perdesaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KAPASITAS	PENINGKATAN KAPASITAS
Wisata Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok masyarakat yang mampu merencanakan dan mengelola desa wisata/wisata perdesaan. • Kelompok masyarakat yang mampu menggerakkan warga sebagai tuan rumah. • Masyarakat yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan wisatawan. • Masyarakat yang memiliki keterampilan dan kemampuan mengolah sumber daya di desa dan aset budaya yang ada sebagai DTW. • Masyarakat yang mampu menjalankan, mengenalkan, dan mempromosikan adat istiadat, norma, dan kebiasaan setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pendampingan pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan desa wisata. • Pelatihan dan pendampingan perencanaan dan pengembangan desa wisata. • Pelatihan dan pendampingan peningkatan kualitas produk UMKM yang menjadi komponen pendukung produk wisata desa wisata. • Pelatihan berkesinambungan peningkatan kemampuan bahasa asing. • Edukasi peran masyarakat dan peningkatan kemampuan komunikasi dan interaksi dengan wisatawan.
Wisata Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok masyarakat yang memiliki inisiatif dan kesadaran terlibat dalam pengembangan Wisata Perkotaan di lingkungannya. • Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan wisatawan. • Memiliki pengetahuan dasar tentang sejarah dan budaya setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat tentang pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan wisata perkotaan. • Pelatihan berkesinambungan peningkatan kemampuan bahasa asing.

• Mampu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KAPASITAS	PENINGKATAN KAPASITAS
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjalankan, mengenalkan dan mempromosikan adat istiadat, norma dan kebiasaan setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi peran masyarakat dalam wisata perkotaan dan peningkatan kemampuan komunikasi dan interaksi dengan wisatawan.
Wisata Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok masyarakat yang mampu mengorganisasikan unsur kegiatan budaya agar wisatawan dapat berpartisipasi dan terlibat dalam produk wisata, misalnya sanggar tari, kegiatan terkait pertanian, menenun, memasak, serta berbagai jenis kegiatan yang dapat dikatakan sebagai unsur budaya. • Kelompok masyarakat yang mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya budayawan setempat, untuk mengembangkan sanggar di desa, sebagai sarana latihan bagi masyarakat lokal, yang disertai dengan pengaturan jadwal kunjungan agar wisatawan dapat diikutsertakan. • Warga masyarakat yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan wisatawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat tentang pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan wisata budaya. • Pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat tentang perencanaan, pengembangan, dan pemasaran wisata. • Pelatihan dan pendampingan peningkatan kualitas unsur kegiatan budaya yang dikemas sebagai DTW. • Pelatihan berkesinambungan peningkatan kemampuan bahasa asing. • Edukasi peran masyarakat dalam wisata budaya dan peningkatan kemampuan komunikasi dan interaksi dengan wisatawan. • Pendidikan luar sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler bagi anak/remaja tentang

• Warga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KAPASITAS	PENINGKATAN KAPASITAS
	<ul style="list-style-type: none"> • Warga masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang kondisi tempat tinggal, sejarah, bahasa, budaya, alam, dan sebagainya. • Warga masyarakat yang mampu menjalankan, mengenalkan, menjelaskan, dan mempromosikan aktivitas kehidupan sehari-hari, adat istiadat, norma, dan kebiasaan setempat. 	<p>sejarah, budaya, bahasa, produk kerajinan, kuliner, dan lainnya.</p>
MICE	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan wisatawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi tentang peran masyarakat dalam wisata MICE.
Wisata Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan wisatawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi peran masyarakat dalam wisata olahraga. • Pelatihan untuk masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan acara/kompetisi.
Wisata Kebugaran dan Herbal	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan melakukan penyelenggaraan kesehatan tradisional yang sudah memiliki bukti ilmiah keamanan dan manfaat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kebugaran wisatawan. • Masyarakat yang memiliki keterampilan dan kemampuan mengolah sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat tentang pemanfaatan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri dan keterampilan pemanfaatan tanaman obat keluarga. • Edukasi peran masyarakat dalam pemanfaatan bahan alam sesuai kearifan lokal.

bahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KAPASITAS	PENINGKATAN KAPASITAS
	<p>bahan alam sesuai kearifan lokal daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong terbentuknya konsorsium penyelenggaraan wisata kebugaran dan herbal di Indonesia. • Pelatihan bagi tenaga kesehatan di bidang kesehatan tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkolaborasikan penciptaan layanan unggulan kebugaran dan herbal di Indonesia. • Mampu memberikan informasi terkait penyelenggaraan wisata kebugaran dan herbal di Indonesia.
PENINGKATAN KUALITAS SARANA, PRASARANA, DAN PELAYANAN		
Kualitas sarana, prasarana, dan pelayanan yang memadai dan bertaraf internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kesadaran untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan fasilitas Pariwisata. • Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan wisatawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi tentang dampak positif Pariwisata dan peran masyarakat dalam wisata. • Edukasi tentang pengelolaan sarana dan prasarana umum serta fasilitas wisata. • Pelatihan untuk masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan acara. • Edukasi serta pelatihan terkait sikap dan keramahan.
PENINGKATAN AKSESIBILITAS		
Aksesibilitas eksternal dari dan menuju KTA dan internal di dalam KTA yang memadai dan terjangkau bagi semua kalangan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami sistem transportasi eksternal maupun internal KTA hingga ke level DTW. • Mampu memberikan informasi kepada wisatawan terkait alternatif rute jalan menuju DTW, alternatif moda transportasi yang dapat digunakan, termasuk biaya, jarak, simpul transportasi, dan sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi rencana pengembangan aksesibilitas kawasan Danau Toba pada masyarakat. • Edukasi terkait aksesibilitas internal dan eksternal kawasan.

PENINGKATAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KAPASITAS	PENINGKATAN KAPASITAS
PENINGKATAN PROMOSI		
Meningkatkan jaringan/jangkauan, kualitas, dan efektivitas promosi DPN Danau Toba	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami citra Pariwisata Danau Toba secara umum. ● Mampu menggunakan dan memanfaatkan berbagai media pemasaran secara optimal. ● Memiliki sikap dan keterampilan sebagai duta Pariwisata Danau Toba. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi RIDPN Danau Toba kepada kelompok masyarakat, terutama terkait citra, visi, dan misi. ● Sosialisasi citra DPN Danau Toba bagi seluruh lapisan masyarakat dan sosialisasi peran masyarakat sesuai citra tersebut. ● Pelatihan bahasa asing tingkat dasar dan menengah dengan materi khusus terkait promosi dan pemasaran. ● Pelatihan tuturan cerita (<i>story telling</i>) tentang sejarah, budaya, dan khas DPN Danau Toba.
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN		
Dinamika bisnis dan kemampuan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> ● SDM yang mampu menciptakan usaha baru dan lapangan kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata. ● Pelatihan pengembangan Pariwisata tematik. ● Edukasi dan pelatihan untuk mendukung Pariwisata inklusif. ● Pendampingan profesional bagi kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi pengusaha. ● Pelatihan dan pembelajaran pembentukan UMKM baru, khususnya di kalangan pemuda.

Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

Peningkatan kapasitas pelaku usaha meliputi seluruh pengusaha, baik dalam skala besar maupun UMKM, yang menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata. Pengusaha dalam hal ini mencakup pemilik usaha atau pengelola yang dibayar, sementara UMKM termasuk pula yang dikelola secara informal, seperti usaha keluarga atau usaha rumah tangga yang menjalankan usaha penginapan, warung/rumah makan, toko cendera mata, dan lain sebagainya. Pengembangan kapasitas di lingkungan dunia usaha diperlukan agar barang dan/atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi standar minimal bahkan lebih sesuai tuntutan sebagai destinasi super prioritas dan memenuhi tuntutan pembangunan yang inklusif. Kapasitas dan kapabilitas dunia usaha dapat tercapai apabila tersedia pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sebagai sarana bagi pelaku industri dan UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya serta didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan tenaga kerja industri Pariwisata dapat mengembangkan kapasitas dan kompetensinya.

Rencana dukungan peningkatan kapasitas pelaku usaha diuraikan dalam Tabel 5. berikut:

Tabel 5. Rencana Dukungan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha di DPN Danau Toba

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KOMPETENSI	PENINGKATAN KAPASITAS
PRODUK WISATA		
Ekowisata	<ul style="list-style-type: none">● Pemandu yang mampu menjelaskan jenis-jenis fauna dan flora yang ada.● Pengelola yang mumpuni dan melaksanakan pengembangan wisata ramah lingkungan.	<ul style="list-style-type: none">● Pelatihan bagi pemandu dan pelayan wisata tentang pengendalian pencemaran lingkungan.● Pelatihan pemasaran ekowisata berbasis masyarakat.● Pelatihan pelayanan <i>eco-camp/pondok wisata (homestay)</i> dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.
Wisata Sukarelawan	<ul style="list-style-type: none">● Pengelola dan pelaksana kegiatan wisata sukarelawan yang mampu bekerja sama dengan masyarakat yang menjadi target	<ul style="list-style-type: none">● Pelatihan pengembangan, pelaksanaan, dan pengelolaan wisata sukarelawan bidang lingkungan, budaya, dan

kunjungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KOMPETENSI	PENINGKATAN KAPASITAS
	<p>kunjungan wisata sukarelawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menyusun dan menyiapkan program wisata sukarelawan bersama masyarakat sehingga masyarakat memperoleh manfaat dan wisatawan mendapat pengalaman sesuai harapan. 	<p>bahasa berbasis masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pemandu/pendamping kegiatan wisata sukarelawan (sesuai kegiatan sukarelawan yang dikembangkan).
Geowisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penerjemah dan pemandu yang memiliki pengetahuan mengenai <i>geopark</i> dan mampu menerapkan aturan pelestarian <i>geopark</i>. • Pengelola dan penerjemah/pemandu kegiatan geowisata yang mampu menyiapkan naskah, informasi, brosur, dan sebagainya untuk tuturan cerita (<i>story telling</i>) produk dan pemasaran produk geowisata. • Pengelola kegiatan yang mampu merancang produk geowisata tanpa mengganggu kelestarian <i>geopark</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan penerjemah dan pemandu wisata tentang <i>geopark</i>. • Pelatihan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian geowisata.
Wisata Danau	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menyiapkan dan mengelola program dan promosi wisata danau. • Mengoperasikan sarana transportasi wisata danau sesuai standar keamanan dan keselamatan. • Awak kapal wisata yang memenuhi standar kompetensi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran wisata danau. • Pelatihan pengembangan dan pengelolaan wisata danau untuk lansia, anak-anak, dan difabel. • Pelatihan untuk awak kapal.

• Pemandu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KOMPETENSI	PENINGKATAN KAPASITAS
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemandu/pendamping wisata olahraga air yang memenuhi standar kompetensi. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan untuk pemandu/pendamping wisata olahraga air.
Wisata Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Mampu bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait dalam rangka pembinaan masyarakat desa. ● Mampu mengembangkan, mengelola, dan memasarkan produk wisata perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran wisata perdesaan berbasis pelibatan masyarakat.
Wisata Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan program atau paket wisata perkotaan. ● Mampu menyediakan informasi dan promosi mengenai wisata perkotaan, baik secara digital maupun non-digital. ● Penerjemah atau pemandu yang memiliki pengetahuan tentang sejarah kota dan aset budaya di perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran wisata perkotaan. ● Pelatihan pemasaran digital. ● Pelatihan penerjemah atau pemandu tentang wisata perkotaan.
Wisata Budaya	<ul style="list-style-type: none"> ● Mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan program atau paket wisata budaya. ● Mampu menyediakan informasi dan promosi mengenai wisata budaya, baik secara digital maupun non-digital. ● Penerjemah atau pemandu yang memiliki pengetahuan tentang budaya dan adat istiadat setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran wisata budaya. ● Pelatihan pemasaran digital. ● Pelatihan penerjemah atau pemandu tentang bahasa, budaya, dan adat istiadat setempat.

MICE . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KOMPETENSI	PENINGKATAN KAPASITAS
MICE	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan MICE sesuai standar penyelenggaraan MICE. • Mampu mengelola penyelenggaraan MICE dan merancang paket wisata <i>pre</i> dan <i>post tour</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran wisata MICE. • Pelatihan standarisasi penyelenggaraan MICE.
Pertukaran Pelajar/Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam merancang dan mengelola aktivitas wisata berbasis pengetahuan untuk pelajar/mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengembangan dan pengelolaan wisata edukasi.
Wisata Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu merencanakan, mengelola, dan memasarkan wisata olahraga. • Mampu bekerja sama dengan pemerintah, asosiasi, dan federasi yang terkait dengan cabang olahraga yang menjadi DTW untuk memastikan kegiatan yang diselenggarakan memenuhi standar setiap jenis cabang olahraga. • Pendamping/pelatih yang memenuhi standar kompetensi sesuai standar yang berlaku pada cabang olahraga terkait. • Tenaga kerja (tetap/lepas) yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk terlibat dalam penyelenggaraan acara kompetisi nasional dan internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan pemasaran wisata olahraga. • Pelatihan dasar tentang keselamatan dan keamanan olahraga (<i>free diving, paragliding, sepeda gunung, dan lainnya</i>). • Pelatihan pendamping/pelatih sesuai jenis cabang olahraga yang dikembangkan. • Pelatihan untuk tenaga kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan acara kompetisi nasional dan internasional (seperti F1 H2O Danau Toba).

STANDAR . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KOMPETENSI	PENINGKATAN KAPASITAS
STANDAR KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DAN PELAYANAN		
Kualitas sarana, prasarana, dan pelayanan yang memadai dan bertaraf internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga kerja sektor Pariwisata yang dapat memberikan layanan bertaraf internasional kepada wisatawan. • Tenaga kerja dan pemilik usaha yang memiliki kepedulian terhadap sarana dan prasarana pendukung Pariwisata. • Pemilik usaha yang dapat berkontribusi dalam penyediaan sarana dan prasarana wisata yang memenuhi standar minimal bahkan internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan tenaga kerja sektor Pariwisata sesuai dengan kualifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. • Insentif pelatihan tematik berbasis kompetensi bagi lulusan sekolah Pariwisata yang bekerja di DPN Danau Toba. • Pelatihan pada bidang-bidang atau sektor pendukung seperti terapis untuk spa, pendamping untuk pusat kebugaran, tenaga dalam bidang informasi, pertukangan, dan sebagainya. • Sosialisasi dan pelatihan standar Pariwisata berkelanjutan.
AKSESIBILITAS		
Aksesibilitas eksternal (dari dan menuju KTA) dan internal (di dalam KTA) yang memadai dan terjangkau bagi semua kalangan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami sistem transportasi eksternal maupun internal KTA hingga ke level DTW. • Berkontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas dari sisi sarana dan prasarana. • SDM bidang transportasi yang memadai dan memiliki keramahan yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi rencana pengembangan aksesibilitas kawasan Danau Toba pada pemilik usaha dan investor. • Pelatihan keramahan dan pemanfaatan aplikasi digital bagi tenaga kerja bidang transportasi.

PEMASARAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

BIDANG STRATEGIS	KEBUTUHAN KOMPETENSI	PENINGKATAN KAPASITAS
PEMASARAN		
Meningkatkan jaringan/jangkauan, kualitas, dan efektivitas promosi DPN Danau Toba	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami citra Pariwisata Danau Toba secara umum. ● Mampu mempromosikan kawasan Danau Toba secara umum, bukan hanya spesifik terkait bidang usahanya. ● Mampu menggunakan dan memanfaatkan berbagai media pemasaran secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan bahasa asing dengan materi khusus terkait promosi dan pemasaran. ● Pelatihan promosi digital tingkat lanjut. ● Pelatihan pemanfaatan media promosi digital tingkat lanjut.
EKOSISTEM INOVASI		
Dinamika bisnis dan kemampuan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Dunia usaha dan SDM Pariwisata yang mampu memanfaatkan dan mengaplikasikan TIK untuk pengembangan Kepariwisata. ● Dunia usaha yang mampu merancang dan memasarkan produk wisata dalam kelompok Pariwisata tematik dan wisata minat khusus. ● Dunia usaha dan SDM Pariwisata yang berkontribusi menciptakan usaha baru dan lapangan kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan kerja sama pengembangan Kepariwisata (<i>pentahelix</i>). ● Pelatihan peran dan pemanfaatan TIK dalam pengembangan Kepariwisata. ● Pelatihan pengembangan Pariwisata tematik. ● Pelatihan pengembangan Pariwisata inklusif. ● Perubahan kurikulum: <i>soft skill</i> dan <i>entrepreneurship</i>. ● Pemanfaatan gelanggang remaja sebagai pusat pembelajaran untuk pembentukan UMKM baru, dengan pemberian insentif/disinsentif bagi pelaku bisnis (UMKM).

F. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pengembangan investasi Pariwisata di DPN Danau Toba mencakup investasi yang didanai dari sumber anggaran dan belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat.

Investasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan difokuskan untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas, infrastruktur permukiman dan perkotaan lainnya, pemanfaatan ruang terbuka, revitalisasi lingkungan, amenities, atraksi Pariwisata, serta peningkatan SDM termasuk pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha khususnya UMKM.

Khusus investasi dari swasta diarahkan untuk dapat melengkapi investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam bentuk sebagai berikut:

1. kerja sama pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas, permukiman dan perkotaan melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta skema pengembangan dan pengelolaan mandiri sesuai ketentuan yang berlaku (misalnya untuk penyediaan listrik, air bersih, sumber energi lainnya, pengelolaan sampah dan limbah, permukiman, transportasi perkotaan, perparkiran, telekomunikasi, dan lainnya);
2. pengembangan amenities Pariwisata (hotel, restoran, fasilitas MICE, sarana olahraga, pusat promosi dan pemasaran, dan lainnya);
3. atraksi Pariwisata (taman bunga, agrowisata, taman hiburan, museum, galeri, wisata petualangan, wisata olahraga, wisata kebugaran, wisata religi, tempat pertunjukan/konser, dan lainnya); dan
4. pengembangan SDM termasuk sekolah dan lembaga pelatihan Pariwisata. Prosedur investasi dan pelayanan investasi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedelapan kabupaten di DPN Danau Toba diharapkan telah menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) secara terintegrasi dengan berbagai perizinan yang dibutuhkan untuk investasi di sektor Pariwisata di wilayahnya masing-masing.

Pengembangan investasi dilaksanakan melalui perencanaan investasi di DPN Danau Toba, yang didukung promosi peluang investasi, fasilitasi dan pengendalian investasi, serta kerja sama investasi. Pelaksanaannya didukung dengan pengembangan dan penyediaan insentif fiskal dan nonfiskal. Investor juga didorong untuk bermitra dengan pelaku usaha di DPN Danau Toba, terutama UMKM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peluang investasi swasta termasuk UMKM dapat merujuk pada lokasi-lokasi DTW yang dikembangkan di 6 (enam) KTA atau di wilayah lain yang terhubung secara konektivitas dengan DPN Danau Toba. Khusus untuk investasi amenities akomodasi, hasil pemetaan terhadap kebutuhan hotel dan pondok wisata (*homestay*) di 6 (enam) KTA di DPN Danau Toba sampai tahun 2044 sebagai berikut:

Tabel 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Tabel 6. Investasi Amenitas Akomodasi Komersial di DPN Danau Toba

KTA	Tahap Pengembangan	Jenis	Jumlah	Lokasi
Parapat	tahap pertama	<ul style="list-style-type: none"> • Hotel, termasuk yang terintegrasi dengan resor dan fasilitas MICE • Pondok wisata (<i>homestay</i>) 	-	KTA Parapat, Pardamean Ajibata, Tiga Raja, Sibaganding, Motung, Sigapiton, dan Kawasan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba di Sibisa
	tahap kedua dan tahap ketiga			
	tahap keempat dan kelima			
Simanindo	tahap pertama	Hotel	-	Tuktuk, Tomok, Simanindo Sangkal, Simarmata, Aek Natonang, dan Martoba
		Pondok wisata (<i>homestay</i>)		
	tahap kedua	Hotel	307 kamar	Ambarita
	tahap ketiga	Pondok wisata (<i>homestay</i>)	102 kamar	Cinta Dame
	tahap keempat dan kelima	Hotel	167 kamar	Ambarita
Pangururan	tahap pertama	Hotel, termasuk yang terintegrasi dengan resor dan lapangan golf	327 kamar	Namora, Pardomuan I, Pasar Pangururan, Pintu Sona, dan Rianiate
		Pondok wisata (<i>homestay</i>)	109 kamar	Situngkir
	tahap kedua	Hotel	742 kamar	Pangururan
	tahap ketiga	Pondok wisata (<i>homestay</i>)	247 kamar	Situngkir

tahap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

KTA	Tahap Pengembangan	Jenis	Jumlah	Lokasi
	tahap keempat	Hotel	419 kamar	Pangururan
	tahap kelima	Pondok wisata (<i>homestay</i>)	583 kamar	Situngkir
Balige	tahap pertama	Hotel	351 kamar	Balige II, Balige III, Lumban Dolok Hauma Bange, Napitupulu Bagasan, dan Pardede Onan
		Pondok wisata (<i>homestay</i>)	117 kamar	Lumban Pea dan Lumban Pea Timur
	tahap kedua	Hotel	641 kamar	KTA Balige
	tahap ketiga	Pondok wisata (<i>homestay</i>)	115 kamar	
	tahap keempat	Hotel	637 kamar	KTA Balige
	tahap kelima	Pondok wisata (<i>homestay</i>)	578 kamar	
	Muara	tahap pertama	Pondok wisata (<i>homestay</i>)	7 kamar
tahap kedua		Pondok wisata (<i>homestay</i>)	93 kamar	KTA Muara
tahap ketiga			29 kamar	Simatupang
tahap keempat		Pondok wisata (<i>homestay</i>)	10 kamar	KTA Muara
tahap kelima			79 kamar	Simatupang
Merek	tahap pertama	Pondok wisata (<i>homestay</i>)	279 kamar	KTA Merek, Sub KTA Situnggaling, dan Sub KTA Tongging

tahap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

KTA	Tahap Pengembangan	Jenis	Jumlah	Lokasi
	tahap kedua dan tahap ketiga	Pondok wisata (<i>homestay</i>)	174 kamar	KTA Merek
	tahap keempat dan tahap kelima	Pondok wisata (<i>homestay</i>)	298 kamar	KTA Merek

Penarikan investasi untuk kawasan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba akan difokuskan untuk beberapa amenities Pariwisata yang dapat dikerjasamakan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dengan investor dan/atau pemerintah daerah. Lokasi investasinya merujuk pada alokasi penggunaan lahan di Toba Caldera Resort sebagai berikut:

Tabel 7. Rencana Penggunaan Lahan Toba Caldera Resort

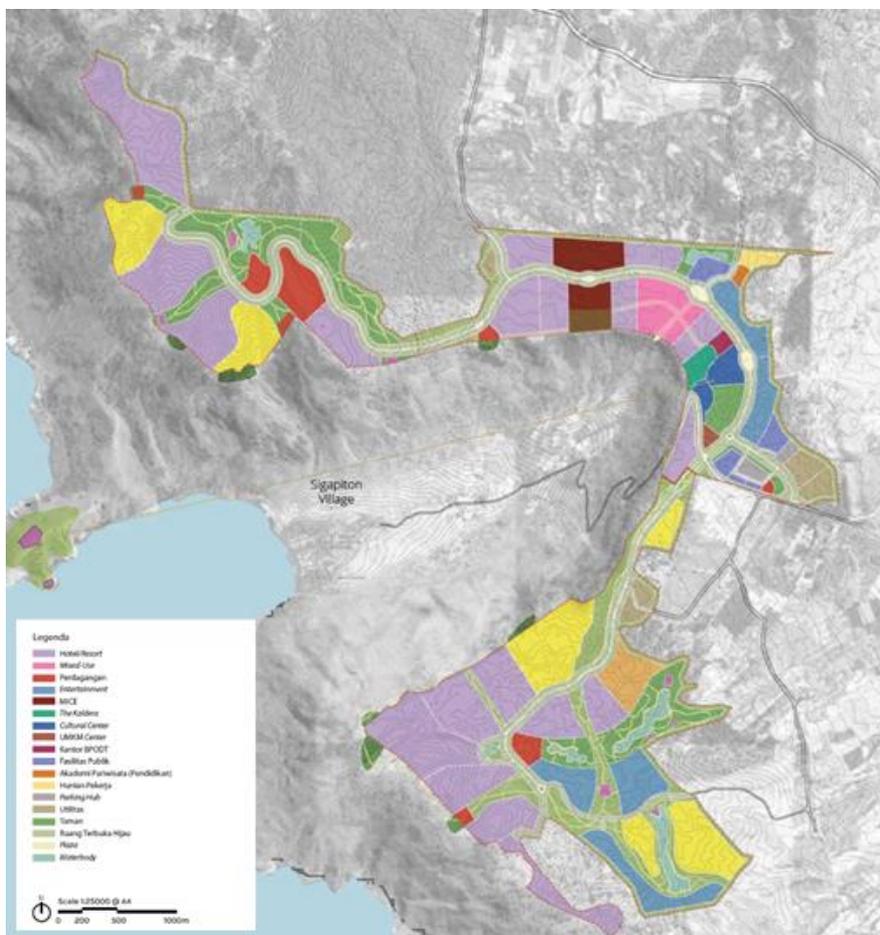
No.	Peruntukan Lahan	Area (ha)	Persentase
1	Hotel/resor	116,93	30,2%
2	Hunian	38,68	10%
3	Hunian apartemen	5,48	1,4%
4	Kawasan campuran	7,49	1,9%
5	Komersial	10,37	2,7%
6	Hiburan	23,90	6,2%
7	MICE	10,30	2,7%
8	The Kaldera	2,06	0,5%
9	Pusat kebudayaan	3,73	1,0%
10	Pusat UMKM	0,64	0,2%
11	Hunian pekerja	1,36	0,4%
12	Akademi Pariwisata	0,58	0,2%
13	Taman/kebun	40,99	10,6%

Gambar 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -



Gambar 10. Penggunaan Lahan Kawasan di Toba Caldera Resort

G. Pengelolaan DPN Danau Toba

1. Organisasi Tata Kelola di Tingkat Pusat dan Daerah

Pengelolaan DPN Danau Toba merujuk pada rencana yang tertuang di dalam RIDPN Danau Toba untuk mengatasi masalah dan tantangan, baik dalam konteks pengembangan Pariwisata maupun dalam konteks pembangunan daerah yang lebih luas. Pelaksanaannya difokuskan pada pengembangan Pariwisata yang berbasis kolaborasi multisektor dan multiaktor. Kolaborasi multisektor mencakup pelaksanaan dari rencana pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba terkait infrastruktur aksesibilitas, infrastruktur dasar, lingkungan hidup, kehutanan, Pariwisata, sumber daya manusia, dan investasi.

Koordinasi pengembangan DPN secara nasional yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga, termasuk yang dituangkan dalam RIDPN Danau Toba, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata. Sementara kolaborasi multiaktor akan melibatkan kementerian/lembaga sebagai berikut:

a. pemerintah pusat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

- a. pemerintah pusat melalui program dan kegiatan di kementerian/lembaga sebagai berikut:
- 1) kementerian/lembaga pelaksana antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 - 2) Kementerian/lembaga terkait antara lain: Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta kementerian/lembaga lainnya.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan 8 (delapan) Kabupaten (Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat) melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah yang menangani urusan Pariwisata, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, penataan ruang, kehutanan, lingkungan hidup, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olahraga, penanaman modal, penanggulangan bencana, kepolisian, serta urusan lain yang terkait.

Pada tingkat provinsi, koordinasi pengembangan DPN Danau Toba dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Program Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) Provinsi Sumatera Utara. Pokja P3TB di 8 (delapan) kabupaten juga telah dibentuk untuk mengawal koordinasi pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

evaluasi, pengendalian, dan pelaporan hasil pelaksanaan RIDPN Danau Toba di wilayahnya masing-masing. Peran Pokja P3TB perlu diperkuat melalui pengembangan kolaborasi antarkabupaten, serta dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, asosiasi industri, pekerja Pariwisata, akademisi, perwakilan dari kelompok masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Pokja P3TB Provinsi berkoordinasi dengan Pokja P3TB Kabupaten untuk memperkuat kolaborasi antarwilayah dalam pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan hasil pelaksanaan RIDPN Danau Toba.

Masing-masing Pokja di provinsi dan kabupaten memiliki kewenangan untuk memastikan komitmen pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di wilayahnya masing-masing. Anggota Pokja P3TB Provinsi dan Pokja P3TB Kabupaten terdiri dari perwakilan perangkat daerah sesuai dengan urusan yang diuraikan di atas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, Pokja P3TB Provinsi, dan Pokja P3TB Kabupaten didukung oleh Ketua Harian dan sekretariat yang menjamin proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata dan Pokja daerah diharapkan dapat melaksanakan perannya untuk seluruh tahap pengembangan Pariwisata sesuai RIDPN Danau Toba. Seiring dengan tahap pengembangan Pariwisata tersebut, pelaksanaan tata kelola DPN Danau Toba juga menerapkan transformasi tata kelola yang berorientasi pada hasil, kolaborasi, pemberdayaan, inovasi, dan keterbukaan/transparansi.

2. Tata Kelola Lingkungan dan Penanggulangan Bencana

Pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana di DPN Danau Toba dilaksanakan untuk memastikan pengembangan Pariwisata Danau Toba sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Fokus dari pengelolaan lingkungan di DPN Danau Toba mencakup pengelolaan, pemantauan, dan pemulihan kualitas air Danau Toba, penataan persetujuan lingkungan, serta perbaikan pengelolaan danau dan hutan terpadu satu pintu.

Pembentukan institusi atau penyerahan tanggung jawab kepada satu institusi yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan, pemantauan, dan pemulihan kualitas air danau. Institusi ini dapat berbentuk badan pengelola hutan dan danau terpadu satu pintu atau bentuk lain yang dibutuhkan. Badan pengelola ini terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang memiliki wewenang untuk menerapkan strategi peningkatan keberlanjutan Danau Toba berdasarkan hasil pemantauan. Upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi antara Pemangku Kepentingan, yang terlibat dalam pemantauan dan

peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

peningkatan kualitas air di Danau Toba. Beberapa program dan kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

- a. melakukan pengelolaan kualitas hutan dan danau secara menyeluruh berlandaskan prinsip konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
- b. melakukan pemantauan secara berkala, baik manual maupun daring di Danau Toba. Pemantauan manual dapat dilakukan minimal di 2 (dua) titik yaitu Ajibata dan Inalum dengan frekuensi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan secara daring dilaksanakan secara otomatis dan terus menerus dengan dukungan 3 (tiga) stasiun yang terletak di Marom, Ajibata, dan Inalum. Rencana ke depan, jumlah stasiun pemantauan dapat ditambah untuk mencakup: Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Tanjung Balai, Asahan, dan Kabupaten Samosir.
- c. menyediakan fungsi sinyal untuk melacak sumber polusi (polutan) lokal dan aktivitas manusia di sekitar danau. Pemantauan ini dilakukan dengan memanfaatkan 22 (dua puluh dua) titik pemantauan yang memiliki data lebih dari 10 (sepuluh) tahun di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- d. meneliti geologi dan ekosistem Danau Toba dan meningkatkan jumlah literatur terkait Danau Toba. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang kemudian menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional telah melakukan berbagai pengukuran di 12 (dua belas) stasiun, dan menganalisis beberapa parameter sejak tahun 2009 di laboratoriumnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional berfokus pada bagian pusat terdalam Danau Toba dengan model hidrodinamik 3D untuk memantau sirkulasi horizontal dan vertikal pada sistem danau.
- e. mengelola dan memantau kualitas air Danau Toba, Wilayah Sungai Toba Asahan, dan daerah aliran sungai lainnya sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, dan Wilayah Sungai Jiratunseluna. Perum Jasa Tirta 1 (PJT1) telah melakukan pemantauan kualitas air dan perlu membangun laboratorium di Danau Toba.
- f. menyediakan dan memantau data kualitas air untuk sertifikasi standar akuakultur dari *Aquaculture Stewardship Council* besar di Danau Toba. Pemantauan data difokuskan pada dampak dari kegiatan akuakultur dari waktu ke waktu pada sistem danau. Pemantauan kualitas air dapat menggunakan informasi dari laboratorium lapangan PT Aquafarm Nusantara yang bekerja sama dengan Universitas Wageningen, Belanda.

g. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

- g. melakukan pemulihan kualitas air danau. Pemulihan kualitas air danau dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pelaku usaha dengan pengendalian sumber pencemar, pengendalian usaha budi daya Keramba Jaring Apung (KJA)/pemberian izin hanya kepada usaha yang memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemulihan kualitas air danau dalam hal tidak diketahui sumber pencemarnya.

Strategi dalam pengelolaan lingkungan dan bencana, meliputi:

- a. Pemantauan Kualitas Air Danau Toba

Pemantauan kualitas air Danau Toba yang komprehensif diperlukan untuk pengelolaan lingkungan ekosistem Danau Toba yang dilakukan di 8 (delapan) kabupaten. Pemantauan kualitas air Danau Toba diarahkan untuk:

- 1) menilai status kualitas air Danau Toba untuk memandu strategi konservasi;
- 2) identifikasi potensi masalah kualitas air untuk tindakan perbaikan;
- 3) melindungi kesehatan ekologi dan manusia di danau; dan
- 4) melakukan koreksi untuk mencegah, mengurangi, serta mengendalikan sumber polusi.

Pemantauan kualitas air Danau Toba dilaksanakan melalui:

- 1) penetapan indikator kinerja utama dan rencana aksi pencapaian peningkatan kualitas air untuk target 5-10 (lima sampai sepuluh) tahun mendatang;
- 2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi dan hasil pemeriksaan; dan
- 3) monitoring kualitas air dan biota air (danau dan sungai yang mengalir ke danau) setidaknya 2 (dua) kali dalam setahun di titik pengambilan sampel yang ditetapkan.

Dalam jangka menengah 5-10 (lima sampai sepuluh) tahun, beberapa titik pengambilan sampel dapat dikembangkan untuk *real-time monitoring online*. Pengembangan sistem pemantauan kualitas air Danau Toba perlu diperkuat untuk mencakup:

- 1) manajemen sistem informasi secara terpusat untuk data pembangunan laboratorium yang lengkap dengan didukung staf yang terlatih;
- 2) pengembangan kualitas air yang dilengkapi *dashboard* pemantauan;
- 3) *Capacity Development* untuk metode standar analisis laboratorium, *Quality Assurance/Quality Control*, pengambilan sampel, analisis data statistik, interpretasi hasil, penulisan laporan, dan penerapan *remote sensing* kualitas air; dan

4) dukungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

- 4) dukungan logistik–kapal, kendaraan, infrastruktur, *sampler*, pengambilan sampel, dan analisis *real time*.
- b. Pemulihan Kesehatan Ekosistem dan Peningkatan Kualitas Air Danau Toba

Lingkup pemulihan kesehatan ekosistem dan kualitas air Danau Toba akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) pengendalian sumber pencemar yang mudah teridentifikasi (*point source pollution*) untuk usaha dan kegiatan industri atau hotel yang telah melakukan pengolahan air limbah; dan
- 2) pengendalian sumber pencemar yang sumbernya tidak teridentifikasi (*nonpoint source pollution*) seperti air limbah dari ladang pertanian atau peternakan. Program ini dapat dilaksanakan melalui percontohan praktik terbaik dan pendampingan penerapannya.

Pengolahan air limbah yang berasal dari *nonpoint source* dapat menjadi *point source* jika menggunakan teknologi pengolahan air limbah seperti lahan basah dan penyangga sungai untuk mengurangi kandungan nutrisi dalam air limbah sebelum masuk ke dalam Danau Toba. Lahan basah dan penyangga sungai perlu dibuat produktif dan bisa dikembangkan menjadi objek wisata edukasi.

Program ini dapat dilakukan dengan cara pengendalian air limbah cair dari kegiatan rumah tangga dan usaha, penerapan peraturan lingkungan hidup yang didukung pembenahan basis data, pembinaan dan penegakan hukum, serta pengendalian budi daya ikan di Danau Toba.

Upaya yang dapat dilakukan secara khusus dalam pemulihan ekosistem air Danau Toba yaitu:

- 1) peningkatan kualitas air dan rehabilitasi ekosistem dengan cara mengendalikan jumlah KJA, penggunaan *chemical cleaning* seperti amonia, fosfor, dan sebagainya dan *biological cleaning*, serta pengendalian gulma, melalui:
 - a) pengendalian usaha budi daya KJA seperti moratorium KJA selama periode waktu tertentu;
 - b) aplikasi teknologi pada keramba ikan seperti KJA lapis ganda atau lapis tiga dan pengembangan KJA dengan Sistem Manajemen Air Resirkulasi Terintegrasi (SMART);
 - c) pengaturan zonasi pemanfaatan ruang sesuai dengan sektor usaha;
 - d) pengenalan praktik pemberian pakan ikan yang lebih efisien;
 - e) intensifikasi budi daya ikan alternatif dengan kolam ikan air tawar;

f) penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

- f) penetapan titik pengambilan sampel sebagai titik pemantauan di danau dan sungai yang mengarah ke danau;
 - g) sosialisasi penetapan lokasi KJA; dan
 - h) pemberian izin hanya kepada pelaku usaha budi daya yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) pengurangan limpasan pertanian dan pencucian nutrisi (*nutrient leaching*), melalui pembangunan sistem pengolahan air limbah seperti lahan basah komunal sebagai sistem pengolahan limbah, sosialisasi plot reaktor biogas untuk mengolah limbah padat dan cair dari ternak serta penggunaan bioreaktor untuk pertanian organik, dan sosialisasi plot produksi pupuk organik dari proses pengomposan limbah ternak (padat dan cair) atau pupuk organik dari limbah reaktor biogas;
 - 3) pengurangan sedimen dari erosi dan tanah longsor dari lahan kritis, melalui mitigasi dampak longsor dan erosi pada kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat serta kualitas air Danau Toba, dan konsultasi publik tentang pencegahan longsor dan erosi untuk setiap jenis longsor dan erosi terutama untuk lahan pertanian dan lahan pribadi;
 - 4) pencegahan ancaman kesehatan ekosistem akuatik (*biosecurity*) guna meningkatkan kapasitas lembaga pengelola Danau Toba dalam melaksanakan pengawasan dan partisipasi masyarakat dan wisatawan dalam menjaga kesehatan ekosistem akuatik Danau Toba;
 - 5) pemulihan kesehatan ekosistem akuatik dengan cara mereduksi ikan biota akuatik *non-native* yang bersifat invasif. Program ini perlu didukung kampanye dan sosialisasi pengenalan biota akuatik *non-native* yang bersifat invasif, yang diikuti dengan gerakan pemusnahan atau penangkapan secara massal. Bagian dari sosialisasi juga mencakup pengenalan cara pemanfaatan ikan kaca-kaca, ikan *red devil*, dan biota *non-native* bersifat invasif lainnya sebagai komoditas bernilai ekonomi sehingga menjadi target tangkapan oleh nelayan guna menekan populasinya. Upaya-upaya tersebut juga didukung kegiatan *restocking* biota akuatik asli Danau Toba seperti ikan batak, ikan pora-pora dengan didahului sosialisasi pada masyarakat agar tidak terjadi penangkapan ikan asli Danau Toba hasil *restocking* pada ukuran dan periode tertentu;
 - 6) perbaikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

- 6) perbaikan kualitas air Danau Toba secara mekanik, kimiawi, dan biologi yang didukung pengendalian sumber pencemaran;
 - 7) pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi untuk menentukan umpan balik upaya pemulihan kesehatan ekosistem dan kualitas Danau Toba yang dikoordinasikan terpadu; dan
 - 8) pembentukan badan pengelola hutan dan danau terpadu satu pintu yang bertugas untuk meningkatkan koordinasi antara 8 (delapan) kabupaten dan keterpaduan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi.
- c. Penataan Persetujuan Lingkungan
- 1) penataan persetujuan lingkungan untuk pelaku bisnis dan kegiatan lokal, melalui:
 - a) identifikasi dan penetapan bisnis lokal dan kegiatan yang diperlukan persetujuan lingkungan;
 - b) identifikasi bisnis dan kegiatan lokal yang tidak memiliki persetujuan lingkungan;
 - c) identifikasi bisnis dan kegiatan lokal yang memiliki persetujuan lingkungan dan mematuhi persetujuan; dan
 - d) identifikasi bisnis dan kegiatan lokal yang memiliki persetujuan lingkungan yang sebagian memenuhi dan/atau tidak mematuhi persetujuan lingkungan.
 - 2) peningkatan penerapan peraturan terkait lingkungan, melalui:
 - a) sosialisasi peraturan lingkungan, termasuk perannya untuk pengembangan Pariwisata Danau Toba yang berkelanjutan;
 - b) kerja sama antara Instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten dan provinsi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu usaha dan kegiatan pelaku usaha skala kecil untuk memenuhi peraturan lingkungan; dan
 - c) penegakan pemenuhan persyaratan persetujuan lingkungan.
- d. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Rencana pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk memandu pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari potensi pencemaran bahan dan/atau limbah B3. Strategi yang dilakukan sebagai berikut:
- 1) pengelolaan limbah B3 yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah B3 kedap air di lokasi proyek yang sesuai karakteristik limbahnya;
 - 3) penggunaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

- 3) penggunaan absorben untuk membersihkan ceceran limbah B3 dan limbahnya akan ditampung di TPS limbah B3;
- 4) penanganan dan pengangkutan limbah B3 akan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin; dan
- 5) mewajibkan setiap kapal untuk tidak membuang air balas (*ballast water*) serta limbah cair berminyak dan mengandung B3 ke perairan pelabuhan sesuai dengan yang ditetapkan *International Maritime Organization*.

Rencana aksi pengelolaan limbah B3 ini meliputi kegiatan identifikasi limbah B3, pengemasan limbah B3, penyimpanan sementara limbah B3, pengangkutan limbah B3, dan pemeriksaan pengelolaan limbah B3.

e. Pengelolaan Kekayaan Alam Daratan dan Perairan

Rencana pengelolaan kekayaan alam daratan dan perairan diarahkan untuk memandu pengelolaan serta pelestarian hutan dan danau, termasuk flora dan fauna di dalamnya, antara lain:

- 1) pencegahan dan penegakan hukum bagi penebangan liar;
- 2) pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan serta semak;
- 3) reboisasi dengan menanam pohon endemik, pohon produksi, dan pohon yang cepat tumbuh;
- 4) pengembangan skema pembayaran jasa ekologis;
- 5) pengendalian pengembangan amenitas dan atraksi di dalam zonasi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk terkait pembersihan lahan, pengembangan jalur berjalan kaki (*trekking*), dan jaminan penyerapan air di berbagai area amenitas dan atraksi;
- 6) pengelolaan jumlah pengunjung untuk mengendalikan dan melindungi kelestarian ekosistem Taman Wisata Alam;
- 7) pembuatan peraturan/standar prosedur operasional yang memuat larangan memberi makan hewan, mengganggu atau bahkan membunuh secara sengaja hewan yang ada di dalam areal hutan lindung;
- 8) pengelolaan jalur kapal di area danau; dan
- 9) koordinasi dan kerja sama dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dalam upaya konservasi flora dan fauna, terkait:
 - a) sosialisasi zonasi pemanfaatan ruang dan peraturan yang berlaku kepada masyarakat, dunia usaha, dan wisatawan guna melindungi dan melestarikan lingkungan;
 - b) inventarisasi dan *monitoring* dalam rangka konservasi ekosistem yang meliputi perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati, khususnya di area yang bersinggungan dengan rencana tata ruang;

c) penelitian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

- c) penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk meningkatkan konservasi alam, yang diselaraskan dengan aktivitas wisata berbasis pengetahuan, akademis, kesukarelawanan, serta pendidikan; dan
 - d) kerja sama dengan masyarakat untuk perlindungan hutan melalui rehabilitasi kawasan hutan melalui hutan lindung kemasyarakatan.
- f. Penanggulangan Bencana
- 1) pengembangan pertanian dan akuakultur sesuai prinsip berkelanjutan;
 - 2) peningkatan pengelolaan dan preservasi lahan sesuai prinsip berkelanjutan untuk mengurangi erosi, abrasi, dan tanah longsor;
 - 3) reboisasi di daerah aliran sungai;
 - 4) edukasi dan sosialisasi terkait lingkungan danau;
 - 5) penguatan serta pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana dan Prakiraan Cuaca dan Iklim Berbasis Dampak yang melibatkan partisipasi Pemangku Kepentingan; dan
 - 6) pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana.
- g. Analisis Iklim
- 1) analisis kondisi iklim di lingkungan Danau Toba;
 - 2) analisis kondisi iklim di lingkungan danau di masa depan menggunakan proyeksi iklim Danau Toba saat ini dan kondisi mendatang bagi masyarakat sekitar;
 - 3) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi pelaku usaha Pariwisata di lingkungan Danau Toba; dan
 - 4) memasukkan parameter *Travel and Tourism Development Index*, khususnya terkait iklim misalnya indeks risiko iklim, emisi gas rumah kaca per kapita, dan *particulate matter (2.5) concentration* di Danau Toba.
3. Tata Kelola Sosial Budaya

Pelaksanaan RIDPN Danau Toba memperhatikan tata kelola sosial budaya sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pengelolaannya mencakup mitigasi dampak sosial terhadap pengadaan lahan, masyarakat adat, pelestarian budaya, serta pengelolaan cagar budaya.

a. Mitigasi Dampak Sosial dari Pengadaan Lahan

Pengelolaan dampak sosial difokuskan pada rencana pengelolaan dampak dari pengadaan lahan mengingat isu kepemilikan lahan masih menjadi tantangan dalam pengembangan Pariwisata Danau Toba. Di beberapa wilayah masih banyak ditemukan perselisihan lahan, yang disebabkan

oleh . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

oleh lahan-lahan yang masih belum dilengkapi sertifikat, tumpang tindih data terkait surat keterangan kepala desa dan bukti jual beli untuk lahan yang sama, ketidaksesuaian batas lahan, dan perselisihan harga lahan. Oleh karena itu rencana pengelolaan dampak dari pengadaan lahan disusun dengan tujuan untuk:

- 1) menghindari pengusuran secara terpaksa;
- 2) menghindari pengadaan lahan dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa atau jika tidak dapat dihindari, perlu upaya mengeksplorasi alternatif desain proyek untuk meminimalisasi dampak; dan
- 3) mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang tidak terhindarkan dari pengadaan lahan, atau dari pembatasan akses terhadap penggunaan lahan atau sumber daya, atau terhadap taman nasional yang ditetapkan secara hukum dan kawasan lindung yang mengakibatkan dampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat terkena dampak dengan:
 - a) memberikan kompensasi tepat waktu untuk kehilangan aset dengan biaya penggantian yang wajar dan adil; dan
 - b) membantu pihak yang dipindahkan untuk memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka.

Tindakan mitigasi yang akan dilaksanakan untuk mengelola dampak pengadaan lahan antara lain:

- 1) konsultasi dengan pengguna lahan yang teridentifikasi mengenai pengadaan lahan dan mekanisme kompensasi dan merancang mekanisme penanganan keluhan untuk memberi masyarakat kesempatan untuk mengajukan pengaduan secara formal jika ada keberatan terkait dengan pengadaan lahan atau proses kompensasi;
- 2) penetapan prosedur formal pengadaan lahan dengan perincian yang jelas tentang mekanisme kompensasi dan disosialisasikan kepada semua orang yang terkena dampak (termasuk pengguna lahan dan keluarga mereka);
- 3) pelaksanaan studi *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP), dengan mengumpulkan data sosial-ekonomi semua orang yang berpotensi terkena dampak, baik mata pencaharian dan kondisi kehidupan sebagai bagian dari proses penggantian lahan/kompensasi, termasuk identifikasi orang-orang yang lebih rentan terkena dampak yang harus diberi perhatian khusus untuk memastikan pemulihan mata pencaharian mereka; dan
- 4) perancangan dan pelaksanaan program pemulihan mata pencaharian bagi penduduk yang terkena dampak.

Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

Rencana ini dapat dilakukan baik secara internal oleh pemrakarsa atau pelaksana proyek, maupun secara eksternal oleh lembaga pemerintah terkait, sebagai berikut:

- 1) pemantauan rutin bulanan atau setiap triwulanan pada tahap awal perancangan sampai dengan satu tahun pertama operasionalisasi proyek oleh internal;
- 2) evaluasi pihak eksternal oleh lembaga pemerintah terkait dan pihak pemberi dana dilakukan setiap semester dan tahunan; dan
- 3) pelaporan oleh pemrakarsa proyek dilakukan sesuai jadwal evaluasi.

Parameter/indikator keberhasilan yang perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala dari pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan dampak terhadap masyarakat dijelaskan dalam Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Rencana Pemantauan dan Indikator Keberhasilan Pengelolaan Dampak dari Pengadaan Lahan

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Kajian Alternatif Penentuan Lokasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Laporan hasil kajian alternatif lokasi pembangunan.• Tercapainya jumlah penerima manfaat dari pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung pengembangan Pariwisata dalam RIDPN Danau Toba.
Pengkajian Nilai Aset dan Penghitungan Kompensasi	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikasi laporan pengukuran aset terkena dampak.• Laporan pengkajian nilai aset dan penghitungan kompensasi oleh penilai bersertifikasi.
Rencana Konsultasi dan Mekanisme Penanganan Keluhan	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi proses dan hasil konsultasi.• Dokumentasi proses <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (FPIC), jika ada aset adat dan warisan atau cagar budaya terkena dampak pengadaan lahan.• Dokumentasi keluhan dan resolusi penyelesaian keluhan.
Program Pemulihan Penghidupan Masyarakat terkena Dampak	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat partisipasi masyarakat terkena dampak proyek dalam perencanaan dan implementasi program pemulihan penghidupan masyarakat.• Tercapainya target program pemulihan penghidupan, seperti peningkatan pendapatan atau bertambahnya alternatif sumber pendapatan rumah tangga orang terkena dampak.

Dampak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Dampak Pengadaan Lahan terhadap Aset Adat dan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none">• Aset adat yang terkena dampak telah dikompensasi secara adil, sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat adat terkait, sebagaimana terdokumentasikan dalam proses konsultasi FPIC.• Benda warisan atau cagar budaya yang terkena dampak dapat direlokasi dan/atau tetap dilestarikan dengan konsultasi dan persetujuan serta bekerja sama dengan masyarakat pengelola/pemilik termasuk masyarakat adat serta dinas terkait.

Berbagai panduan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk bekerja sama memastikan penyediaan lahan yang terang dan jelas, baik untuk proyek pemerintah maupun investasi swasta.

b. Mitigasi Dampak terhadap Masyarakat Adat

Rencana pengelolaan dampak terhadap masyarakat adat diarahkan untuk membuka akses masyarakat adat kepada sumber daya alam dan cagar budaya yang bernilai penting bagi mereka. Mitigasi dari potensi dampak negatif bagi masyarakat adat dapat dilakukan mulai dari identifikasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat adat dan Pemangku Kepentingan terkait. Beberapa dampak dari pengembangan Pariwisata yang perlu dikelola termasuk:

- 1) potensi gangguan terhadap aktivitas kebudayaan dan Pariwisata yang sudah berjalan, misalnya dalam bentuk kompetisi dengan pendatang dalam mendapatkan keuntungan dari pengembangan Pariwisata yang sejalan dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan usaha di wilayah adat;
- 2) dampak terhadap akses masyarakat ke sumber penghidupan tradisional seperti pertanian dan dampak perluasan wilayah Pariwisata di kampung adat sehingga berpotensi pada terdesaknya, pemindahan atau relokasi masyarakat adat; dan
- 3) gangguan terhadap sumber daya alam dan warisan budaya yang memiliki nilai penting, yaitu cagar budaya/warisan budaya yang bernilai penting atau disakralkan, baik itu dari norma budaya, religi, dan nilai sejarah serta tanah adat atau sumber daya alami lainnya yang secara adat berstatus milik komunal dan bernilai penting atau disakralkan.

Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

Berdasarkan potensi dampak di atas, maka rencana perlindungan masyarakat adat yang dilaksanakan dalam RIDPN Danau Toba sebagai berikut:

- 1) melakukan analisis terhadap rencana alternatif pengembangan Pariwisata yang akan bersinggungan dengan masyarakat adat, pemukiman adat, tanah adat, ataupun warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat adat;
- 2) apabila dampak tidak bisa dihindari, upaya yang perlu dilaksanakan yaitu mengoptimalkan/memastikan masyarakat adat mendapatkan dampak positif dari pengembangan Pariwisata di wilayahnya dan merumuskan langkah-langkah atau rencana aksi untuk memitigasi dampak negatif pengembangan berdasarkan konsultasi dan kesepakatan dengan komunitas adat yang terkena dampak;
- 3) pengembangan daya tarik budaya yang sudah ada sesuai dengan nilai, karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat, serta regulasi dan standar internasional;
- 4) apabila pengembangan Pariwisata menimbulkan dampak terhadap sumber daya lahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat ataupun tanah adat/komunal, maka rencana pengadaan lahan dan analisa dampak sosial serta program pemulihan penghidupan perlu dirancang; dan
- 5) untuk program pengembangan Pariwisata yang bersinggungan dengan cagar budaya, atau memanfaatkan cagar budaya sebagai objek komersial sebagai DTW, maka rencana perlindungan dan pengelolaan dampak terhadap cagar budaya perlu disusun dan dilaksanakan oleh pemrakarsa program bersama-sama untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat adat.

Pelaksanaan rencana di atas dilengkapi dengan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara internal dari pelaksana kegiatan dan eksternal oleh lembaga pemerintah terkait, sebagai berikut:

- 1) pemantauan rutin bulanan atau setiap triwulan pada tahap awal perancangan sampai dengan sedikitnya satu tahun pertama operasionalisasi program/subproyek oleh internal;
- 2) evaluasi pihak eksternal oleh lembaga pemerintahan dan pihak pemberi dana dilakukan setiap semester dan tahunan; dan
- 3) pelaporan oleh pemrakarsa proyek dilakukan sesuai jadwal evaluasi.

Parameter . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

Parameter/indikator keberhasilan yang perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala dari pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan dampak terhadap masyarakat adat, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Rencana Pemantauan dan Indikator Keberhasilan Pengelolaan Dampak terhadap Masyarakat Adat

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Program Pemberdayaan Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses dan kesempatan bagi masyarakat adat terkait dampak positif ekonomi dari pengembangan Pariwisata, dapat dilihat melalui, misalnya peningkatan pendapatan atau beragamnya sumber pendapatan.• Pendidikan nilai budaya dan kelembagaan adat terlestarikan kepada generasi muda dari masyarakat adat untuk menjaga keberlanjutan dari penerapan nilai-nilai tradisional, norma budaya, dan adat istiadat yang menjadi DTW.• Fasilitas dan infrastruktur pendukung pengembangan Pariwisata yang memadai termanfaatkan oleh masyarakat adat.
Program Pengelolaan Potensi Dampak Negatif terhadap Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none">• Studi perencanaan yang sudah mempertimbangkan dampak dan/atau minimalisasi dampak terhadap masyarakat adat, alternatif pengembangan Pariwisata yang minimal gangguan terhadap aset adat, serta menghindari relokasi.• Indikator keberhasilan dari strategi rencana aksi.
Konsultasi dengan Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi proses dan hasil konsultasi sesuai FPIC.• Dokumentasi keluhan dan resolusi penyelesaian keluhan.

Program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Program Peningkatan Kapasitas Pemrakarsa Proyek	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi pelaksanaan pelatihan.• Hasil pemantauan dan evaluasi keefektifan pelatihan terhadap peningkatan kapasitas pihak yang terlibat.

c. Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya dalam kaitannya dengan pengembangan Pariwisata Danau Toba mencakup, antara lain:

- 1) inventarisasi pusaka budaya yang merupakan aset fisik, berupa bangunan atau kompleks bangunan dengan sistem kelembagaannya sebagai satu kesatuan/sistem (*huta-bius* dan manusianya: *ulubalang* dan sebagainya);
- 2) inventarisasi pusaka budaya nonfisik (tak benda), berupa tarian, upacara, pakaian, peralatan, lagu, cerita rakyat/legenda, serta kepercayaan, dan sebagainya;
- 3) inventarisasi nilai budaya dan kearifan lokal yang perlu diangkat karena dianggap sesuai dan penting dalam meminimalisir stigma atau citra yang berkembang tentang masyarakat Batak yang dianggap belum siap/ramah dalam menerima wisatawan serta belum optimal untuk melestarikan budaya dan alam;
- 4) pemanfaatan budaya untuk aktivitas Pariwisata yang berkelanjutan dan memaksimalkan pengalaman berwisata dari interaksi wisatawan dengan masyarakat setempat dan budayanya;
- 5) pengembangan model pengelolaan berbagai aset yang hampir punah dengan ditemukan kembali dan direstorasi, baik secara fisik maupun secara nonfisik sebagai bagian dari proses penguatan budaya; dan
- 6) pengembangan model kelembagaan pengelola situs geologis dan budaya dengan beragam status kepemilikan.

Instrumen yang dibutuhkan dalam proses pelestarian ini mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) pelestarian aset fisik dengan perlindungan hukum (peraturan daerah terkait), pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

2) pelestarian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

- 2) pelestarian khusus melalui pengakuan. Sebagai contoh, kawasan Bakkara-Tipang memiliki budaya hidup yang belum terangkat dan perlu mendapatkan perlindungan pada aspek budaya petani tradisional, areal persawahan (saujana), dan sistem irigasi. Pelestarian kawasan ini penting untuk preservasi kehidupan sosial budaya masyarakat dan mengembangkan DTW. Kawasan ini dapat diusulkan menjadi pusaka budaya dunia secara tersendiri sebagai situs warisan dunia UNESCO;
 - 3) pelestarian berbagai aset tak benda melalui pemanfaatannya dan integrasinya ke dalam berbagai kegiatan Kepariwisata, yang meliputi pengembangan makanan lokal, pemanfaatan berbagai benda budaya untuk kegiatan dan aktivitas wisata, revitalisasi sanggar budaya untuk dikunjungi atau dimana wisatawan dapat berpartisipasi, serta pengemasan benda atau unsur budaya seperti ragam hias bangunan, dan sebagainya; dan
 - 4) perumusan peta jalan pelestarian sosial budaya kawasan Danau Toba dan ekosistemnya.
- d. Pengelolaan Cagar Budaya
- Bagian dari upaya pelestarian budaya di DPN Danau Toba adalah dengan memperbaiki pengelolaan cagar budaya melalui kolaborasi Pemangku Kepentingan sebagai berikut:
- 1) aspek kelembagaan, melalui:
 - a) bekerja sama dengan Badan Warisan Budaya Sumatera serta perguruan tinggi yang memiliki bidang studi kebudayaan;
 - b) membentuk jejaring dengan pihak lain;
 - c) membentuk dan memperkuat komunitas pecinta cagar budaya di kawasan Danau Toba; dan
 - d) menyusun rencana kerja dan kelembagaan yang didukung partisipasi figur yang berpengaruh untuk menjadi duta warisan budaya Batak.
 - 2) aspek perlindungan, melalui:
 - a) pemerintah daerah melakukan inventarisasi semua aset yang dimiliki masyarakat, lembaga, dan pihak lain, mengembangkan sistem pengelolaan data tentang aset budaya, dan menerbitkan peraturan daerah dalam rangka penetapan dan perlindungan status aset budaya;
 - b) melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

- b) melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan terhadap cagar budaya;
 - c) bekerja sama dengan para pihak untuk perlindungan cagar budaya; dan
 - d) bekerja sama dengan para pakar, termasuk dengan perguruan tinggi, dalam penelitian cagar budaya.
- 3) aspek pemanfaatan dan pengembangan benda/kawasan cagar budaya, melalui:
- a) identifikasi benda atau kawasan cagar budaya yang memiliki signifikansi bagi Kepariwisata, baik karena usia maupun makna yang terkandung di dalamnya, sebarannya, atau lokasinya, terutama yang dekat dengan pusat-pusat Pariwisata di kawasan Danau Toba; dan
 - b) bekerja sama dengan kelompok kreatif yang berasal dari akademisi dan/atau pengusaha untuk memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan nilai tambah Pariwisata.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

**BAB IV
RENCANA AKSI**

Pengembangan Kepariwisata di DPN Danau Toba perlu didukung melalui kerja sama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh Pemangku Kepentingan untuk saling melengkapi sehingga tercipta pengembangan Pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaannya akan dipandu melalui rencana aksi yang disesuaikan dengan kelompok kebutuhan pengembangan KTA di DPN Danau Toba. Rencana aksi dituangkan secara rinci untuk tahap pertama pengembangan DPN Danau Toba, sedangkan rincian rencana aksi di tahap berikutnya akan dikembangkan sesuai hasil evaluasi dari pelaksanaan tahap pertama dan seterusnya dalam periode secara total 21 (dua puluh satu) tahun.

Rencana aksi dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian sesuai dengan tujuan penyusunan RIDPN Danau Toba, yaitu:

1. kelompok rencana aksi peningkatan kapasitas kelembagaan mencakup tata kelola destinasi, penataan ruang, tata kelola lingkungan, peningkatan layanan kesehatan, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
2. kelompok rencana aksi infrastruktur dan penataan kawasan mencakup jalan, air minum, air limbah, drainase, persampahan, penataan kawasan, transportasi, listrik, dan telekomunikasi.
3. kelompok rencana aksi peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan perekonomian lokal/masyarakat.
4. kelompok rencana aksi peningkatan iklim investasi dan ekonomi yang kondusif.

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RIDPN Danau Toba pada tahap pertama dapat dipenuhi dari sumber anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, antara lain pendanaan swasta, pendanaan di bawah skema KPBU, serta pendanaan mitra pembangunan internasional. Rincian kegiatan, lokasi, target, tahun, dan instansi pelaksana tercantum dalam Matriks Rencana Aksi (Tabel 10) sebagai berikut:

Tabel 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

Tabel 10. Matrik Rencana Aksi Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1	KELOMPOK RENCANA AKSI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN				
1.1	Tata Kelola Destinasi				
1.1.1	Sosialisasi pengembangan Pariwisata kawasan Danau Toba	DPN Danau Toba	3 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ● Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba
1.1.2	Aktivasi kelompok kerja Pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan program pembangunan Pariwisata di provinsi/kabupaten/kota	DPN Danau Toba	9 pokja	2024	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ● Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ● Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ● Pemerintah Kabupaten Toba ● Pemerintah Kabupaten Simalungun ● Pemerintah Kabupaten Samosir ● Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ● Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ● Pemerintah Kabupaten Karo ● Pemerintah Kabupaten Dairi ● Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

1.1.3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.1.3	Peningkatan kapasitas Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	DPN Danau Toba	10 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.1.4	Penataan kelembagaan melalui penyusunan regulasi mengenai Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	DPN Danau Toba	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1.1.5	Fasilitasi penyiapan skema KPBU di kawasan otorita Danau Toba	DPN Danau Toba	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
1.1.6	Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan Kepariwisata Danau Toba	DPN Danau Toba	6 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Badan Pusat Statistik• Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara

1.1.7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.1.7	Peningkatan kapasitas Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba	DPN Danau Toba	2 kegiatan	2024	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
1.1.8	Pengembangan kelembagaan Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba	DPN Danau Toba	1 dokumen	2024	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
1.1.9	Pengembangan kelembagaan tata kelola kawasan wisata unggulan	KTA Parapat	2 dokumen	2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun
1.1.10	Pengembangan kapasitas dan pendampingan desa dalam pengelolaan Pariwisata	KTA Parapat	2 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun
1.1.11	Pembentukan dan pendampingan desa wisata	KTA Parapat	2 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun

1.1.12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.1.12	Pengembangan kelembagaan tata kelola kawasan wisata unggulan	<ul style="list-style-type: none">• KTA Simanindo• KTA Pangururan	2 dokumen	2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir
1.1.13	Pengembangan kapasitas dan pendampingan desa dalam pengelolaan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• KTA Simanindo• KTA Pangururan	2 kegiatan	2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir
1.1.14	Pembentukan dan pendampingan desa wisata	<ul style="list-style-type: none">• KTA Simanindo• KTA Pangururan	2 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir• Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir
1.1.15	Pengembangan kelembagaan tata kelola kawasan wisata unggulan	KTA Balige	2 dokumen	2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Toba
1.1.16	Pembentukan dan pendampingan desa wisata	KTA Balige	2 dokumen	2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba
1.1.17	Pengembangan kelembagaan tata kelola kawasan wisata unggulan	KTA Merek	2 dokumen	2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Karo

1.1.18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.1.18	Pengembangan kapasitas dan pendampingan desa dalam pengelolaan Pariwisata	KTA Merek	2 kegiatan	2024	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo
1.1.19	Pengembangan kelembagaan tata kelola kawasan wisata unggulan	KTA Muara	2 dokumen	2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
1.1.20	Pengembangan kapasitas dan pendampingan desa dalam pengelolaan Pariwisata	KTA Muara	2 kegiatan	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
1.1.21	Pembentukan dan pendampingan desa wisata	KTA Muara	2 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
1.1.22	Pembentukan dan pendampingan Kelompok Sadar Wisata	KTA Muara	1 kegiatan	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
1.1.23	Pengembangan kelembagaan tata kelola kawasan wisata unggulan	Kabupaten Humbang Hasundutan	2 dokumen	2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
1.1.24	Pengembangan kelembagaan tata kelola kawasan wisata unggulan	Kabupaten Dairi	2 dokumen	2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi

1.1.25 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.1.25	Pengembangan kelembagaan tata kelola kawasan wisata unggulan	Kabupaten Pakpak Bharat	2 dokumen	2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
1.2	Penataan Ruang				
1.2.1	Reviu dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Simalungun	Kabupaten Simalungun	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
1.2.2	Reviu dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Samosir	Kabupaten Samosir	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir

1.2.3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.2.3	Reviu dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
1.2.4	Reviu dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
1.2.5	Reviu dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten Humbang Hasundutan	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan

1.2.6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.2.6	Reviu dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
1.2.7	Reviu dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten Pakpak Bharat	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat
1.2.8	Reviu dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo

1.2.9 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.2.9	Penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan Danau Toba dan sekitarnya	Kabupaten Simalungun	6 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
1.3	Tata Kelola Lingkungan				
1.3.1	Penataan, penertiban KJA dan bangunan gedung yang melanggar sempadan danau	Kawasan Danau Toba	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan• Badan Riset dan Inovasi Nasional• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara• PT Perum Jasa Tirta 1
1.3.2	Pengawasan usaha atau kegiatan dari sumber pencemar nirtitik	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara	8 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

• Kabupaten . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat			<ul style="list-style-type: none">• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat

1.3.3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.3.3	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah dari sumber pencemar nirtitik	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat	5 unit	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara● Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi● Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat

1.3.4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.3.4	Penerapan <i>biosecurity</i> pada perikanan budi daya dan tangkap	KSPN Toba dan sekitarnya	4 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Kelautan dan Perikanan● Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
1.3.5	Kesehatan ekosistem akuatik-perlindungan pada sumber daya biologis dan keanekaragaman hayati	Danau Toba	300.000 benih ikan asli Danau Toba	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan● Badan Riset dan Inovasi Nasional● Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
1.3.6	Pemulihan kualitas air Danau Toba	Danau Toba	3 plot area/tahun	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan● Kementerian Kelautan dan Perikanan● Badan Riset dan Inovasi Nasional● Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
1.3.7	Pemantauan dan evaluasi	Danau Toba	40 titik 3 kedalaman/ 3 bulan	2024	<ul style="list-style-type: none">● Badan Riset dan Inovasi Nasional● Universitas Sumatera Utara● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

1.3.8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.3.8	Pencegahan pembalakan liar	Area hutan pada daerah tangkapan air Danau Toba	3 unit	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.3.9	Mengendalikan kebakaran hutan, semak, dan kegiatan pembakaran dalam pembersihan lahan pertanian	Area hutan pada daerah tangkapan air Danau Toba	3 unit	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.3.10	Kesiapan dan rencana tanggap darurat bencana	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat	6 kegiatan	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara

1.3.11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.3.11	Percepatan akses kelola, pengembangan usaha, dan pendampingan perhutanan sosial	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Karo	3 kegiatan	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.4	Peningkatan Layanan Kesehatan				
1.4.1	Peningkatan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah Porsea sebagai rumah sakit rujukan untuk DPN Danau Toba	Kabupaten Toba	1 unit	2024	Kementerian Kesehatan
1.4.2	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana puskesmas	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat	26 unit	2024	Kementerian Kesehatan

1.4.3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.4.3	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan pengelola program kesehatan tradisional di puskesmas	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat	4 kabupaten	2024	Kementerian Kesehatan
1.4.4	Peningkatan asuhan mandiri melalui taman obat keluarga dan <i>acupressure</i> bagi tenaga kesehatan pengelola program kesehatan tradisional	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan	4 kabupaten	2024	Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat			
1.4.5	Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional bagi tenaga kesehatan dalam rangka wisata kebugaran	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat	4 kabupaten	2024	Kementerian Kesehatan

1.5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
1.5	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi				
1.5.1	Pemanfaatan teknologi pemantauan daring (<i>online monitoring</i>) dilaksanakan secara otomatis	DPN Danau Toba	3 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.5.2	Pengembangan teknologi pemantauan daring (<i>online monitoring</i>) dilaksanakan secara otomatis	DPN Danau Toba	1 paket	2024	Badan Riset dan Inovasi Nasional
1.5.3	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pengurangan sedimen dan tanah longsor	DPN Danau Toba	2 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"> ● Badan Riset dan Inovasi Nasional ● Universitas Sumatera Utara ● Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
2	KELOMPOK RENCANA AKSI INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN KAWASAN				
2.1	Jalan				
2.1.1	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional batas Kota Medan-batas Kota Lubuk Pakam; Jalan A.H. Nasution (Medan); Jalan Sisingamangaraja (Medan); dan Jalan Medan (Lubuk Pakam)	Ruas Jalan Nasional No. 7 s.d. 7-15K	27,42 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.1.2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.2	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional Tugu Kota Lubuk Pakam-batas Kabupaten Serdang Bedagai	Ruas Jalan Nasional No. 10	61,6 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.3	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional batas Kabupaten Deli Serdang-Perbaungan	Ruas Jalan Nasional No. 11	18 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.4	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional Perbaungan-Sei Buluh	Ruas Jalan Nasional No. 12	13,2 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.5	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional batas Kabupaten Deli Serdang/Sei Buluh-Sei Rampah	Ruas Jalan Nasional No. 13	13,2 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.6	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional Tebing Tinggi; Sei Rampah-batas Kota Tebing Tinggi; Jalan Yos Sudarso; Jalan Jenderal Sudirman; dan Jalan Ahmad Yani	Ruas Jalan Nasional No. 14 s.d. 14-13K	82,7 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.1.7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.7	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional Jalan Jamin Ginting (Medan)	Ruas Jalan Nasional No. 52-11	8,68 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.8	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional batas Kota Medan-batas Kabupaten Karo	Ruas Jalan Nasional No. 52	37,67 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.9	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional batas Deli Serdang-Sp. Ujung Aji; Sp. Ujung Aji-batas Kota Kabanjahe; Jalan Jamin Ginting (Kabanjahe); dan Jalan Mariam Ginting (Kabanjahe)	Ruas Jalan Nasional No. 53 s.d. 53-23K	22,83 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.10	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional batas Kota Tebing Tinggi-batas Kabupaten Simalungun; dan Ruas Jalan Nasional Jalan Gatot Subroto (Tebing Tinggi)	Ruas Jalan Nasional No. 63 dan 63-11	59,34 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.1.11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.11	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional batas Kabupaten Serdang Bedagai-batas Kota Pematang Siantar; Jalan ke Medan (P. Siantar); dan Jalan Sisingamangaraja (P. Siantar)	Ruas Jalan Nasional No. 64 dan 64-12K	68,18 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.12	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional batas Kota Pematang Siantar-Parapat; dan Jalan ke Parapat (P. Siantar)	Ruas Jalan Nasional No. 64 dan 64-12K	42,88 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.13	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional Tomok-Ambarita	Ruas Jalan Nasional No. 93	5,3 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.14	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional Ambarita-Simanindo	Ruas Jalan Nasional No. 94	18,3 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.15	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional Tele-Pangururan	Ruas Jalan Nasional No. 98	22 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.16	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional Pangururan-Nainggolan	Ruas Jalan Nasional No. 99	40 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.17	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional Nainggolan-Onan Runggu	Ruas Jalan Nasional No. 100	7 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.1.18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.18	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nasional Onan Runggu-Tomok	Ruas Jalan Nasional No. 101	34 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.19	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Provinsi Balige-Tarabunga-Meat (Bts. Taput)	Ruas Jalan Provinsi No. 12.147	14,1 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
2.1.20	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Provinsi Silalahi-Batas Kabupaten Karo	Ruas Jalan Provinsi No. 11.133	10,7 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
2.1.21	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Provinsi Sp. Jambuk-Huta Jungk-Sigalingging	Ruas Jalan Provinsi No. 15.043	11 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
2.1.22	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Provinsi Sigalingging-Huta Jungkak batas Pakpak Bharat	Ruas Jalan Provinsi No. 11.039	4,23 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
2.1.23	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Provinsi Jalan Parlilitan Batu Gajah	Ruas Jalan Provinsi No. 108	3,4 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
2.1.24	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Gaol-Huta Tinggir (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 304	4,85 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

2.1.25 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.25	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Bage-Huta Imbaru-Gaol (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 509	10,53 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.26	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Bage Tongging/batas Kabupaten Karo (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 508	1,87 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.27	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Huta Tano/Sp. Huta Tinggir-Huta Tano (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 213	1,18 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.28	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Bandar Hinalang-Huta Tano (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 212	1,69 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.29	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Simp. Purba Tongah-Purba Dolok (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 202	4,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

2.1.30 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 118 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.30	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Simp. Naga Pane-Purba Dolok (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 218	4,19 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.31	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Haranggaol-Simpang Salbe (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 302	17,66 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.32	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Simp. Dalig Raya- Dalig Raya (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 130	0,79 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.33	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Simp. Tiga-Tambun Rea (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 1202	3,27 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.34	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Tambun Rea Sp. Huta III (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 1203	4,58 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.35	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Tambun Raya-Sipolha (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 1205	1,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

2.1.36 . . .

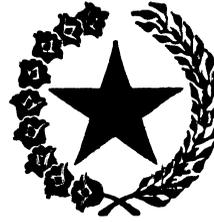


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.36	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Huta Mula-Sipolha (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 1204	4,77 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.37	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Simp. Sibaganding (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 1619	2,33 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.38	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Situri-Turi-Huta Tinggir (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 416	2,76 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.39	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Simp. Salbe-Tambun Rea (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 1303	7,43 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.40	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Simp. Bage-Bage (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Kabupaten No. 507	6,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.41	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Kawasan BPK Aek Nauli (Kabupaten Simalungun)	Ruas Jalan Desa Link No. 01	1,24 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

2.1.42 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.42	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nagori Juma Toba (Kabupaten Simalungun)	Ruas jalan Desa Link No. 103	11,01 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.43	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Tulas-Sp. A. Rangat (2) (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S1	8,9 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.44	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Lontung-Silima Lombu (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S2	13,3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.45	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Sigulatti-Tala (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S3	6,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.46	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Tulas-Binangara (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S4	19 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.47	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Pintu Sona-Sp. Kantor Camat (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S5	10,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir

2.1.48 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.48	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Jalan Provinsi (Ambarita-Tomok)-Pelabuhan Ambarita-Sp. Jalan Tanah Lapang (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S7	0,87 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.49	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Jalan Provinsi (Tomok-Onan Runggu)-Jalan Museum Batak Pasar Tomok (Kecamatan Simanindo) (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S8	0,21 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.50	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Jalan Provinsi Tomok Onan Runggu-Desa Huta Lombun Tanjungan (Kecamatan Simanindo) (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S9	4,6 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.51	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Janji Matogu-Si Boro (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S10	3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir

2.1.52 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.52	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Lingkar Pusuk Buhit-Si Ogung-Ogung (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S11	1,8 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.53	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Pgr-LS Segmen I DAK 2017 (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S12	10,4 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.54	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Lumban Sihombing-Parmonangan (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S13	4,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.55	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Limbong-Sp. Sigulatti (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S14	3,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.56	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Sigulatti-Sp. Tulas (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S15	4,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir

2.1.57 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.57	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Pangururan-Pintu Sona (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S16	3,3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.58	Pemeliharaan rutin SP. Jalan Provinsi (Pangururan-Ambarita-Pelabuhan Simanindo) (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Kabupaten No. Link S17	0,3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.59	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Muslim Kampung Tua (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Desa No. Link 31	13,3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.60	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Pantai Batu Hoda (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Desa No. Link 16	10,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.61	Pemeliharaan rutin Ruas Aek Sipitu Dai Road (Jalan Onan Limbong) (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Desa No. Link 60	0,45 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.62	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Pantai Tio (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Desa No. Link 10	0,21 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir

2.1.63 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.63	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Sosorgalung (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Desa No. Link 52	4,6 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.64	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Holang-holang (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Desa No. Link 32	3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.65	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Kawasan Pantai Perbaba (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Desa No. Link 33	1,8 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.66	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Sitapigagan Abutment (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Desa No. Link 68	10,4 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.67	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Bonan Dolok (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Desa No. Link 69	4,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.68	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Perkampungan Siraja Batak Sigulatti (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Desa No. Link 71	3,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir

2.1.69 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.69	Pemeliharaan rutin Ruas jalan Air Terjun Efrata Road (Jalan Bukit Holbung Sipege) (Kabupaten Samosir)	Ruas Jalan Desa No. Link 89	3,3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.70	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Jalan Pertanian-Gurgur (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-004	4,4 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.71	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Lumban Bulbul-Sibolahotang (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-021	3,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.72	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Pasar Sirongit-Lancang (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-037	10,6 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.73	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Porsea-Siregar (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-066	15,6 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.74	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Lumban Nabolon-Sihubak hubak (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-068	4,4 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba

2.1.75 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.75	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Jangga Dolok-Jangga Toruan (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-093	1,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.76	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Hatinggian-Parendeian (Kabupaten Toba)	Ruas Jalan Kabupaten No. K-087	7,1 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.77	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Hatinggian-Parendeian (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-096	6,3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.78	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sibisa-Parendeian (Kabupaten Toba)	Ruas Jalan Kabupaten No. K-086	11,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.79	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sibisa-Sigapiton (Kabupaten Toba)	Ruas Jalan Kabupaten No. K-084	6,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.80	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sibulele-Bonan Dolok (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-022	6,6 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba

2.1.81 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.81	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Hutagaol-Simarmar (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-033	3,3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.82	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sihubak Hubak-Dolok Nagodang (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-081	5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.83	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Dolok Nagodang-Parik (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-080	7 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.84	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Jangga Toruan-Sibaruang (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-092	9 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.85	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Lumban Lintong-Lumban Lintong (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-094	7,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.86	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Amborgang-Sampuara (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-073	7,9 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba

2.1.87 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.87	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Aek Natolu-Ajibata (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-082	17 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.88	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Janji Maria-Lumban Gaol (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-028	3,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.89	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Dalam Kota Balige (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-034	10,7 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.90	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Jalan Negara-SMPN Tambunan (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-032	0,9 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.91	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Laguboti-Lumban Hasibuan (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Kabupaten No. K-053	2,6 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.92	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Simanobak (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Desa Link No. 112	1,16 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.93	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Taman Eden (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Desa Link No. 73	0,21 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba

2.1.94 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.94	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Naromonja (Kabupaten Toba)	Ruas jalan Desa Link No. 74	1,01 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.95	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Nutubulu Mejan (Kabupaten Toba)	Ruas Jalan Desa Link No. 24	0,25 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.96	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Desa Pandoan (Kabupaten Toba)	Ruas Jalan Desa Link No. 23	1,19 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.97	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Lumban Bulbul-Lumban Pea (Kabupaten Toba)	Ruas Jalan Desa Link No. 113	0,27 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.98	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Galpak (Kabupaten Toba)	Ruas Jalan Desa Link No. 76	0,46 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.99	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Desa Sihiong (Kabupaten Toba)	Ruas Jalan Desa Link No. 93	1,10 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba

2.1.100 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.100	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Banjarganjang (Kabupaten Toba)	Ruas Jalan Desa Link No. 104	5,42 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.101	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Sibide (Kabupaten Toba)	Ruas Jalan Desa Link No. 105	2,43 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.102	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Lumban Bulbul-Lumban Pea (Kabupaten Toba)	Ruas Jalan Desa Link No. 114	0,36 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.103	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Tongging-Peapira (Kabupaten Karo)	Ruas Jalan Kabupaten No. 143	4,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
2.1.104	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sibolangit-Batas Kabupaten Simalungun (Kabupaten Karo)	Ruas Jalan Kabupaten No. 948	2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
2.1.105	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sp. Dokan-Dokan (Kabupaten Karo)	Ruas Jalan Kabupaten No. 137	1,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo

2.1.106 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 131 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.106	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Panorama Tongging-Aek Hotang (Kabupaten Karo)	Ruas Jalan Kabupaten No. 934	7 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
2.1.107	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Taman Semalem (Kabupaten Karo)	Ruas Jalan Desa Link No. 111	4,04 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
2.1.108	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Pangambatan (Kabupaten Karo)	Ruas Jalan Desa Link No. 47	0,23 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
2.1.109	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Sikodon-kodon (Kabupaten Karo)	Ruas Jalan Desa Link No. 46	1,09 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
2.1.110	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Dokan (Kabupaten Karo)	Ruas Jalan Desa Link No. 115	0,64 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
2.1.111	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Gajah Bobok (Kabupaten Karo)	Ruas Jalan Desa Link No. 109	0,76 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo

2.1.112 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.112	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Unte Mungkur-Batu Binumbun-Simatupang (Kabupaten Tapanuli Utara)	Ruas Jalan Kabupaten No. K-308	5,18 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
2.1.113	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sibandang-Sampuran-Sibandang (Kabupaten Tapanuli Utara)	Ruas Jalan Kabupaten No. K-417	11,86 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
2.1.114	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Lumban Toba (Kabupaten Tapanuli Utara)	Ruas Jalan Desa Link No. 53	0,43 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
2.1.115	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Tao Silaban-Sp. Huta Gurgur (031) (Kabupaten Humbang Hasundutan)	Ruas Jalan Kabupaten No. 031	4 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan

2.1.116 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.116	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sibuntuon-Panoguan Solu-Batas Taput (Kabupaten Humbang Hasundutan)	Ruas Jalan Kabupaten No. 033	6,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
2.1.117	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Onan Raja-Pearung (Kabupaten Humbang Hasundutan)	Ruas Jalan Kabupaten No. 172	6 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
2.1.118	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Sigumpar-Sipinsur (Kabupaten Humbang Hasundutan)	Ruas Jalan Kabupaten No. 034	4,66 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
2.1.119	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Bahalimbalo-Batas Pargaulan-Taput (Kabupaten Humbang Hasundutan)	Ruas Jalan Kabupaten No. 033	12,66 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan

2.1.120 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 134 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.120	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Jalan Sulu-sulu Marbuntoran (Kabupaten Humbang Hasundutan)	Ruas Jalan Kabupaten No. 049	4 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
2.1.121	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Hatuaan (Kabupaten Humbang Hasundutan)	Ruas Jalan Desa Link No. 64	0,81 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
2.1.122	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Desa Tao Silaban (Kabupaten Humbang Hasundutan)	Ruas Jalan Desa Link No. 66	1,19 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
2.1.123	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Borsak Junjungan (Kabupaten Humbang Hasundutan)	Ruas Jalan Desa Link No. 92	0,90 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
2.1.124	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Taman Wisata Iman Sitinjo (Kabupaten Dairi)	Ruas Jalan Desa Link No. 67	1,19 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi

2.1.125 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.125	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Pintu Batu Silalahi (Kabupaten Dairi)	Ruas Jalan Desa Link No. 110	9,61 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
2.1.126	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Pekan Salak-Napasengkut-Aornakan (Kabupaten Pakpak Bharat)	Ruas Jalan Kabupaten No. 002	4,9 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat
2.1.127	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Salak-Lae Mbalno-Jamburea (Kabupaten Pakpak Bharat)	Ruas Jalan Kabupaten No. 003	5,54 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat
2.1.128	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Traju-Sumbul-Parongil Julu (Kabupaten Pakpak Bharat)	Ruas Jalan Kabupaten No. 013	5,1 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat
2.1.129	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kabupaten Lingkar Aornakan-Simp. Mesjid-Kecupak II (Kabupaten Pakpak Bharat)	Ruas Jalan Kabupaten No. 104	1,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat

2.1.130 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.130	Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Jalan Lae Temberkuh (Kabupaten Pakpak Bharat)	Ruas Jalan Desa No. 95	2,56 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat
2.1.131	Penyiapan <i>Readiness Criteria</i> pada Penyelesaian Jalan Tol Pematang Siantar-Parapat	Pematang Siantar-Parapat (Kabupaten Simalungun)	39 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.132	Pembangunan Ruas Jalan Kabupaten Sp. Sigulatti-Tala (S3)	Kabupaten Samosir	6,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.133	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Sp. Tulas-Binangara (S4)	Kabupaten Samosir	19 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.134	Pembangunan Ruas Jalan Kabupaten Janji Matogu-Si Boro (S10)	Kabupaten Samosir	3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.135	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Sp. Limbong-Sp. Sigulatti (S14)	Kabupaten Samosir	3,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.136	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Sp. Sigulatti-Sp. Tulas (S15)	Kabupaten Samosir	4,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir

2.1.137 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.137	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Sp. Jalan Provinsi Tomok Onan Runggu-Desa Huta Lombun Tanjungan (Kecamatan Simanindo) (S9)	Kabupaten Samosir	4,6 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.138	Pemasangan, perambuan, dan penerangan Jalan Kabupaten Ruas Lingkar Danau Toba dan Lingkar Samosir	Kabupaten Samosir	94,43 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.139	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Pgr-LS Segmen I DAK 2017	KTA Simanindo- Kecamatan Simanindo	10,4 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.140	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Lumban Sihombing-Parmonangan (S13)	KTA Simanindo- Kecamatan Simanindo	4,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.141	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Sp. Tulas-Sp. A. Rangat (S1)	KTA Simanindo- Kecamatan Simanindo	8,9 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.142	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Lontung-Silima Lumbu (S2)	KTA Simanindo- Kecamatan Simanindo	13,3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir

2.1.143 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.143	Pembangunan Ruas Jalan Kabupaten Sp. Jalan Pariwisata (Lingkar Tuk Tuk)-Jalan Inpres (S6)	KTA Simanindo-Kecamatan Simanindo	0,45 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.144	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Pintu Sona-Sp. Kantor Camat (S5)	KTA Pangururan-Kecamatan Pangururan	10,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.145	Pembangunan Ruas Jalan Kabupaten Pangururan-Pintu Sona (S16)	KTA Pangururan-Kecamatan Pangururan	3,3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.146	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Sp. Lingkar Pusuk Buhit-Si Ogung-Ogung (S11)	KTA Pangururan-Kecamatan Pangururan	1,8 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.147	Pembangunan Ruas Jalan Desa Jalan Muslim Kampung Tua	KTA Simanindo-Kecamatan Simanindo	0,06 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.148	Pembangunan Ruas Jalan Desa Jalan Sipalaga Sialagan	KTA Simanindo-Kecamatan Simanindo	0,13 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.149	Pembangunan Jalan Desa Ruas Jalan Pantai Tio	KTA Simanindo-Kecamatan Simanindo	0,14 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir

2.1.150 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.150	Pelebaran Ruas Jalan Desa Jalan Sosorgalung	KTA Simanindo- Kecamatan Simanindo	5,11 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.151	Pelebaran Ruas Jalan Desa Jalan Holang-holang	KTA Pangururan- Kecamatan Pangururan	0,18 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.152	Pelebaran Ruas Jalan Desa Jalan Kawasan Pantai Perbaba	KTA Pangururan- Kecamatan Pangururan	0,14 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.153	Pembangunan Ruas Jalan Desa Jalan Pantai Pangururan	KTA Pangururan- Kecamatan Pangururan	0,16 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.154	Pembangunan Jalan Provinsi menuju Desa Sigapiton	Kabupaten Toba	3,5 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.155	Konstruksi peningkatan jalan	Kabupaten Dairi	11 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
2.1.156	Pembangunan Ruas Jalan Kabupaten Sp. Jalan Pertanian-Gurgur	Kabupaten Toba	3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.157	Pembangunan Ruas Jalan Kabupaten Hutagaol-Simarmar	Kabupaten Toba	3,3 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.158	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Janji Maria-Lumban Gaol	Kabupaten Toba	3,2 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.159	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Jalan Negara-SMPN Tambunan	Kabupaten Toba	0,9 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba

2.1.160 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.160	Konstruksi pelebaran Ruas Jalan Loka Jalan Pora-Pora, Parapat	KTA Parapat Kecamatan Girsip, Kabupaten Simalungun	0,72 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.161	Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Jalan Sulu-sulu Marbuntoran	Kabupaten Humbang Hasundutan	4 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
2.1.162	Pemasangan, perambuan, dan penerangan Jalan Provinsi Ruas Lingkar Danau Toba dan Lingkar Samosir	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat	10 unit	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

2.1.163 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.163	Pemasangan, perambuan, dan penerangan Jalan Kabupaten Ruas Lingkar Danau Toba dan Lingkar Samosir	Kabupaten Simalungun	114,3 km	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun
2.1.164	Pemasangan, perambuan, dan penerangan Jalan Kabupaten Ruas Lingkar Danau Toba dan Lingkar Samosir	Kabupaten Toba	167,19 km	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Toba
2.1.165	Pemasangan, perambuan, dan penerangan Jalan Kabupaten Ruas Lingkar Danau Toba dan Lingkar Samosir	Kabupaten Karo	21,75 km	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo
2.1.166	Pemasangan, perambuan, dan penerangan Jalan Kabupaten Ruas Lingkar Danau Toba dan Lingkar Samosir	Kabupaten Tapanuli Utara	17,47 km	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
2.1.167	Pemasangan, perambuan, dan penerangan Jalan Kabupaten Ruas Lingkar Danau Toba dan Lingkar Samosir	Kabupaten Dairi	10,78 km	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi

2.1.168 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.168	Pemasangan, perambuan, dan penerangan Jalan Kabupaten Ruas Lingkar Danau Toba dan Lingkar Samosir	Kabupaten Pakpak Bharat	16,74 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat
2.1.169	Studi pengembangan jaringan Jalan Kabupaten Simalungun	Kabupaten Simalungun	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.1.170	Studi pengembangan jaringan Jalan Kabupaten Samosir	Kabupaten Samosir	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.1.171	Studi pengembangan jaringan Jalan Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.1.172	Studi pengembangan jaringan Jalan Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
2.1.173	Studi pengembangan jaringan Jalan Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
2.1.174	Studi pengembangan jaringan Jalan Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten Humbang Hasundutan	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
2.1.175	Studi pengembangan jaringan Jalan Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi

2.1.176 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.1.176	Studi pengembangan jaringan Jalan Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten Pakpak Bharat	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat
2.1.177	Fasilitasi serah terima aset terkait pembangunan infrastruktur di dalam kawasan Toba Caldera Resort Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Kawasan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	1 dokumen	2024	Kementerian Keuangan
2.2	Air Minum				
2.2.1	Reviu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Simalungun	Kabupaten Simalungun	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.2.2	Reviu RISPAM Kabupaten Samosir	Kabupaten Samosir	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.2.3	Reviu RISPAM Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
2.2.4	Reviu RISPAM Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.2.5	Reviu RISPAM Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

2.2.6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.2.6	Reviu RISPAM Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten Humbang Hasundutan	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
2.2.7	Reviu RISPAM Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten Pakpak Bharat	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat
2.2.8	Peningkatan kapasitas Instalasi Pengelolaan Air 40 liter/detik dan pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Parapat mendukung KSPN Toba dan sekitarnya	KTA Parapat-Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun	40 liter/detik	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.2.9	Reviu RISPAM	Kabupaten Simalungun	2 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.2.10	Penyusunan peraturan daerah terkait keharusan hotel/penginapan melakukan sambungan PDAM di Samosir	Kabupaten Samosir	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir
2.2.11	Pengembangan kelembagaan SPAM daerah	Kabupaten Toba	1 dokumen	2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba

2.2.12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.2.12	Peningkatan akses air minum Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.2.13	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air dengan kapasitas 20 liter/detik dan jaringan perpipaan SPAM Sibisa, termasuk untuk melayani di Toba Caldera Resort Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Sibisa• Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.3	Air Limbah				
2.3.1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Lokasi IPAL Ajibata dengan kapasitas 10 meter kubik/hari	Kabupaten Toba	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.3.2	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah	Kabupaten Simalungun	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.3.3	Penyusunan materi teknis dan peraturan daerah air limbah skala kabupaten	Kabupaten Simalungun	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

2.3.4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.3.4	Promosi PHBS serta subsidi tangki septik	Kabupaten Simalungun	1 paket	2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
2.3.5	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Samosir dan pengadaan truk tinja	Kabupaten Samosir	12 m3 per hari	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
2.4	Drainase				
2.4.1	Penyusunan rencana induk (<i>masterplan</i>) drainase permukiman	Kabupaten Simalungun	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.4.2	Penyusunan rencana induk (<i>masterplan</i>) drainase permukiman	Kabupaten Samosir	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.4.3	Penyusunan rencana induk (<i>masterplan</i>) drainase permukiman	Kabupaten Karo	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo

2.4.4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.4.4	Penyusunan rencana induk drainase (masterplan) permukiman	Kabupaten Dairi	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
2.4.5	Penyusunan rencana induk drainase (masterplan) permukiman	Kabupaten Toba	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba
2.4.6	Penyusunan rencana induk drainase (masterplan) permukiman	Kabupaten Tapanuli Utara	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
2.4.7	Penyusunan rencana induk drainase (masterplan) permukiman	Kabupaten Humbang Hasundutan	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
2.4.8	Penyusunan rencana induk drainase (masterplan) permukiman	Kabupaten Pakpak Bharat	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat
2.4.9	Reviu rencana induk drainase	Kabupaten Simalungun	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

2.5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5	Persampahan				
2.5.1	Pendampingan kepada pemerintah daerah terkait teknis operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metode lahan urug saniter atau lahan urug terkendali	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat	4 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat

2.5.2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.2	Pendampingan kepada pemerintah daerah terkait penyusunan peraturan tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada sektor ritel (toko modern, pusat belanja, dan pasar rakyat urug terkendali) dan sektor jasa makanan minuman (hotel, restoran, dan kafe)	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat	4 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi● Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat

2.5.3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.3	Pendampingan kepada pemerintah daerah terkait penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat	4 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi● Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat

2.5.4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 151 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.4	Penyusunan dan sosialisasi peraturan daerah pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Simalungun	Kabupaten Simalungun	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun
2.5.5	Reviu dan revisi Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP)	Kabupaten Simalungun	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun
2.5.6	Pendidikan, pelatihan, dan studi banding SDM pengelola sampah	Kabupaten Simalungun	3 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun
2.5.7	Pengembangan sarana pengumpul	<ul style="list-style-type: none">● Kecamatan Pematang Silimakuta● Kecamatan Silimakuta Purba● Kecamatan Haranggaol Horison● Kecamatan Dolok Pardamean● Kecamatan Pematang Sidamanik	38 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun

2.5.8 . . .

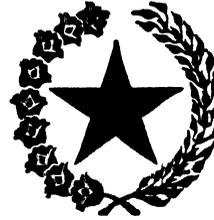


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.8	Pengembangan sarana pengumpul (KTA Parapat-Ajibata)	KTA Parapat-Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	13 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun
2.5.9	Penyusunan dan sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Samosir	Kabupaten Samosir	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
2.5.10	Penyusunan PTMP sejalan RIDPN Danau Toba	Kabupaten Samosir	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
2.5.11	Pendidikan, pelatihan, dan studi banding SDM pengelola sampah	Kabupaten Samosir	3 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
2.5.12	Pengembangan sarana angkutan sampah	Kabupaten Samosir	7 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
2.5.13	Pembangunan TPA Samosir	Kecamatan Harian	1 unit	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir

2.5.14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.14	Pengembangan sarana pengumpul	<ul style="list-style-type: none">● Kecamatan Onan Rungu● Kecamatan Nainggolan● Kecamatan Ronggur Nihuta● Kecamatan Palipi● Kecamatan Sianjur Mulamula● Kecamatan Harian● Kecamatan Sitio-tio	37 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
2.5.15	Pengembangan sarana pengumpul	KTA Simanindo Desa/Kelurahan: <ul style="list-style-type: none">● Tomok● Cinta Dame● Dos Roha● Garoga● Martoba● Parmonangan● Simanindo Sangkal● Simarmata	17 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir

2.5.16 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.16	Pengembangan sarana pengumpul	KTA Pangururan Desa/Kelurahan: ● Huta Namora ● Pardomuan I ● Pasar Pangururan ● Pintu Sona Riniate ● Huta bolon ● Situngkir ● Lumban Pinggol ● Pardugul ● Parmonangan ● Parsaoran I ● Sait Nihuta ● Siogung-ogung ● Siopat Sosor	19 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
2.5.17	Pembangunan TPS3R	KTA Simanindo-Desa Dos Roha, Kecamatan Simanindo	2 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir

2.5.18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.18	Penyusunan dan sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah berkelanjutan	Kabupaten Dairi	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
2.5.19	Reviu dan revisi PTMP	Kabupaten Dairi	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
2.5.20	Pendidikan, pelatihan, dan studi banding SDM pengelola sampah	Kabupaten Dairi	3 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
2.5.21	Pengembangan sarana pengumpul	Kecamatan Silahi Sabungan	2 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
2.5.22	Penyusunan dan sosialisasi peraturan daerah pengelolaan sampah berkelanjutan	Kabupaten Karo	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo
2.5.23	Penyusunan PTMP sejalan RIDPN Danau Toba	Kabupaten Karo	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo
2.5.24	Pendidikan, pelatihan, dan studi banding SDM pengelola sampah	Kabupaten Karo	7 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo

2.5.25 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.25	Pendidikan, pelatihan, dan studi banding bagi SDM pengelola sampah	Kabupaten Karo	3 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo
2.5.26	Pengembangan sarana pengumpul	KTA Merek Desa/Kelurahan ● Merek ● Tongging ● Situnggaling ● Sibolangit ● Tongging ● Ajinembah ● Bandar Tongging ● Garingging ● Kodon-Kodon ● Mulia Rakyat ● Naga Lingga ● Pertibi Lama ● Regaji	7 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo

2.5.27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.27	Penyusunan dan sosialisasi peraturan daerah pengelolaan sampah berkelanjutan	Kabupaten Toba	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba
2.5.28	Reviu dan revisi PTMP	Kabupaten Toba	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba
2.5.29	Pendidikan, pelatihan, dan studi banding SDM pengelola sampah	Kabupaten Toba	3 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba
2.5.30	Pengembangan sarana pengumpul	<ul style="list-style-type: none">● KTA Balige-Kecamatan Lumban Julu● Kecamatan Tampahan● Kecamatan Laguboti● Kecamatan Sigumpar● Kecamatan Siantar Narumonda● Kecamatan Uluan● Kecamatan Porsea	32 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba
2.5.31	Pengembangan sarana pengumpul	KTA Balige-Kecamatan Balige	18 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba

2.5.32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.32	Pengembangan kapasitas untuk masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">● KTA Balige-Kecamatan Lumban Julu● Kecamatan Tampahan● Kecamatan Laguboti● Kecamatan Sigumpar● Kecamatan Siantar● Kecamatan Narumonda● Kecamatan Uluan● Kecamatan Porsea	4 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba
2.5.33	Pembangunan TPS3R	<ul style="list-style-type: none">● KTA Balige-Kecamatan Lumban Julu● Kecamatan Tampahan● Kecamatan Laguboti● Kecamatan Sigumpar● Kecamatan Siantar● Kecamatan Narumonda● Kecamatan Uluan● Kecamatan Porsea	6 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba
2.5.34	Pembangunan TPS3R	KTA Balige-Desa/ Kelurahan Pardamean Ajibata	4 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba

2.5.35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.35	Penyusunan dan sosialisasi peraturan daerah pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Utara	KTA Balige-Desa/ Kelurahan Pardamean Ajibata	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba
2.5.36	Penyusunan PTMP sejalan RIDPN Danau Toba	Kabupaten Tapanuli Utara	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
2.5.37	Pendidikan, pelatihan, dan studi banding SDM pengelola sampah	Kabupaten Tapanuli Utara	3 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
2.5.38	Pengembangan sarana pengumpul	KTA Muara-Kecamatan Muara	7 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
2.5.39	Pembangunan TPS3R	KTA Muara-Kecamatan Muara	1 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
2.5.40	Penyusunan dan sosialisasi peraturan daerah pengelolaan sampah berkelanjutan	Kabupaten Humbang Hasundutan	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan
2.5.41	Reviu dan revisi PTMP	Kabupaten Humbang Hasundutan	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan
2.5.42	Pendidikan, pelatihan, dan studi banding SDM pengelola sampah	Kabupaten Humbang Hasundutan	3 paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan

2.5.43 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 160 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.5.43	Pengembangan sarana pengumpul	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Paranginan• Kecamatan Lintong Nihuta• Kecamatan Baktiraja	21 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan
2.5.44	Penyusunan dan sosialisasi peraturan daerah pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten Pakpak Bharat	1 dokumen	2024	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat
2.5.45	Reviu dan revisi PTMP	Kabupaten Pakpak Bharat	1 dokumen	2024	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat
2.5.46	Pendidikan, pelatihan, dan studi banding SDM pengelola sampah	Kabupaten Pakpak Bharat	3 paket	2024	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat
2.5.47	Fasilitasi pembangunan pengelolaan limbah padat	Kawasan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Sibisa	1 paket	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2.6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 161 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.6	Penataan Kawasan				
2.6.1	Penyusunan kajian akademik dan instrumen cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Karo• Kabupaten Toba• Kabupaten Samosir• Kabupaten Dairi	4 dokumen	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.6.2	Penyelesaian serah terima kawasan wisata muka air Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Toba dan sekitarnya	KTA Pangururan	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
2.6.3	Penataan kawasan segmen HKBP Balige dan rumah sakit umum daerah Balige dan poros pusat kota ke selatan	KTA Balige	5 paket	2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba
2.6.4	Fasilitasi penataan Kawasan Toba Caldera Resort Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Kawasan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Sibisa	1 paket	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2.7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.7	Transportasi				
2.7.1	Pembangunan 4 <i>dockyard</i> untuk kapal rakyat	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Samosir• Kabupaten Simalungun• Kecamatan Balige- Kabupaten Toba• Kecamatan Muara- Kabupaten Tapanuli Utara	4 paket	2024	Investasi Swasta
2.7.2	Sertifikasi kapal (kapal rakyat dan Kapal Ro-Ro)/izin operasi	Semua kapal di Danau Toba	215 paket (2 paket /minggu)	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
2.7.3	Penyediaan alat keselamatan di setiap pelabuhan	Seluruh pelabuhan di sekeliling Danau Toba	12 paket	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
2.7.4	Penyediaan alat keselamatan di setiap kapal	Semua kapal di Danau Toba	215 paket	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
2.7.5	Penyediaan alat pemantau cuaca	Seluruh pelabuhan di sekeliling Danau Toba	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
2.7.6	Peningkatan kompetensi awak kapal untuk mengatasi masalah <i>overloading</i>	Semua awak kapal di Danau Toba	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

2.7.7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.7.7	Penyediaan alat/info navigasi	Semua kapal di Danau Toba	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
2.7.8	Pelatihan pencarian dan pertolongan (<i>Search and Rescue</i>)	8 Kabupaten di Kawasan Danau Toba	1 kegiatan	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
2.7.9	Peningkatan kepedulian pada keselamatan pelayaran (<i>safety awareness</i>)	Semua awak kapal di Danau Toba	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
2.7.10	Penyediaan alat keselamatan di setiap terminal	Semua terminal di: <ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

2.7.11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 164 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.7.11	Pelatihan awak kendaraan umum	Semua angkutan di: <ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat	1 kegiatan	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

2.7.12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 165 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.7.12	Manajemen transportasi dan lalu lintas (lintas 8 (delapan) kabupaten di Danau Toba)	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat	9 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">● Dinas Perhubungan Kabupaten Toba● Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun● Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir● Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara● Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan● Dinas Perhubungan Kabupaten Karo● Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi● Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat

2.7.13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.7.13	Penyediaan bus ramah lingkungan (untuk <i>inner</i> dan <i>outer ringroad</i> Toba)	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat	16 unit	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Perhubungan● Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara● Perusahaan Umum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (Perum Damri)● Investasi Swasta
2.7.14	Perpanjangan <i>runway</i> dan perluasan Bandar Udara Silangit (Sisingamangaraja XII)	<ul style="list-style-type: none">● Kecamatan Siborong-borong● Kabupaten Tapanuli Utara	1 paket	2024	Kementerian Perhubungan
2.7.15	Pelayanan Pengintegrasian KA Kualanamu-Araskabu-Tebing Tinggi	Deli Serdang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Perhubungan● PT Kereta Api Indonesia/PT Railink
2.7.16	Perbaiki fasilitas 8 (delapan) pelabuhan utama di Danau Toba: Sipinggán, Onan Rungu	Kabupaten Samosir	2 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Perhubungan● Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

2.7.17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.7.17	Perbaikan fasilitas Terminal Tipe B (Terminal Parapat)	Kabupaten Simalungun	1 kegiatan	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
2.7.18	Reviu <i>Feasibility Study</i> pembangunan Jalur Kereta Api Pematang Siantar-Parapat	Pematang Siantar-Parapat (Kabupaten Simalungun)	74 km	2024	Kementerian Perhubungan
2.7.19	Penyediaan perlengkapan jalan di beberapa ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten	<ul style="list-style-type: none">• Ruas jalan nasional• Ruas jalan provinsi• Ruas jalan kabupaten	4 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara• Dinas Perhubungan Kabupaten Toba• Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun• Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir• Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara• Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan• Dinas Perhubungan Kabupaten Karo• Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat

2.7.20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.7.20	Perbaiki sistem <i>ticketing</i> untuk mengatasi <i>overcrowding</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pelabuhan Penyeberangan Ajibata• Pelabuhan Penyeberangan Ambarita	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
2.7.21	Perbaiki kapal (kapal rakyat dan kapal Ro-Ro)	Danau Toba	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
2.7.22	Pembuatan kapal baru (kapal rakyat dan kapal Ro-Ro)	Danau Toba	2 paket	2024	Investasi Swasta
2.7.23	Pencegahan pencemaran lingkungan	12 Pelabuhan di Danau Toba	12 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
2.7.24	Layanan angkutan penyeberangan	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Balige-Onan Runggu Dan Onan Runggu-Muara• Kecamatan Tongging-Simanindo Dan Simanindo-Silalahi• Kecamatan Baktiraja-Sippingan	3 lintasan	2024	Kementerian Perhubungan

2.7.25 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 169 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.7.25	Pemasangan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal	Danau Toba	1 paket	2024	Kementerian Perhubungan
2.7.26	Subsidi angkutan antarmoda KSPN Toba dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Ajibata-Pematangsiantar• Bandar Udara Silangit-Sanggul-Pakat• Bandar Udara Silangit-Ajibata (via Sibisa/Kaldera)	3 trayek	2024	Kementerian Perhubungan
2.7.27	Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Simalungun	Kabupaten Simalungun	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun
2.7.28	Penyusunan Tatralok Kabupaten Samosir	Kabupaten Samosir	1 dokumen	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir
2.7.29	Penyusunan Tatralok Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	1 dokumen	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Toba
2.7.30	Penyusunan Tatralok Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	1 dokumen	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
2.7.31	Penyusunan Tatralok Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	1 dokumen	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo

2.7.32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 170 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.7.32	Penyusunan Tatralok Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten Humbang Hasundutan	1 dokumen	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan
2.7.33	Penyusunan Tatralok Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	1 dokumen	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi
2.7.34	Penyusunan Tatralok Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten Pakpak Bharat	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat
2.7.35	Penyusunan dokumen manajemen lalu lintas Kota Parapat	KTA Parapat-Kota Parapat	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun
2.7.36	Penyusunan dokumen manajemen lalu lintas Kecamatan Simanindo	KTA Simanindo-Kecamatan Simanindo	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir
2.7.37	Penyusunan dokumen manajemen lalu lintas Kecamatan Pangururan	KTA Pangururan-Kecamatan Pangururan	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir
2.7.38	Penyusunan dokumen manajemen lalu lintas Kota Balige	KTA Balige-Kota Balige	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Toba

2.7.39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.7.39	Penyusunan dokumen manajemen lalu lintas Kota Ajibata	KTA Parapat-Kota Ajibata	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Toba
2.7.40	Penyusunan dokumen manajemen lalu lintas Kecamatan Muara	KTA Muara-Kecamatan Muara	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun
2.7.41	Penyusunan dokumen manajemen lalu lintas Kecamatan Merek	KTA Merek-Kecamatan Merek	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo
2.7.42	Penyediaan bus wisata di Kota Parapat	KTA Parapat	2 unit	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun
2.7.43	Penyediaan bus wisata di Kota Balige	KTA Balige	2 unit	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Toba
2.7.44	Penyediaan bus wisata di Kecamatan Merek	KTA Merek-Kecamatan Merek	2 unit	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo
2.7.45	Penyediaan bus wisata di Kecamatan Muara	KTA Muara	2 unit	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
2.7.46	Penyusunan rencana induk (<i>masterplan</i>) integrasi angkutan di Kawasan Lumban Pea	Kawasan Lumban Pea	1 dokumen	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Toba

2.8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.8	Listrik				
2.8.1	Konstruksi pembangkit listrik tenaga air Kabupaten Asahan	Kabupaten Asahan	2 x 87 mw	2024	PT Perusahaan Listrik Negara
2.8.2	Pembangunan jaringan distribusi listrik di kawasan wisata Danau Toba	Kawasan wisata Danau Toba	1 paket	2024	PT Perusahaan Listrik Negara
2.8.3	Pembangunan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), Gardu Hubung (GH) dan Jaringan Distribusi 20 kV untuk pengembangan DPN Danau Toba	Kawasan wisata Danau Toba	1 paket	2024	PT Perusahaan Listrik Negara
2.8.4	Pembangunan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) dan Jaringan 20 kV dalam Kawasan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Kawasan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Sibisa	1 paket	2024	PT Perusahaan Listrik Negara
2.9	Telekomunikasi				
2.9.1	Layanan Telepon Bergerak 100%	KTA Parapat	10 BTS	2024	Operator Telekomunikasi

2.9.2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
2.9.2	Layanan Telepon Bergerak 100%	KTA Simanindo	7 BTS	2024	Operator Telekomunikasi
2.9.3	Layanan Telepon Bergerak 100%	KTA Pangururan	15 BTS	2024	Operator Telekomunikasi
2.9.4	Layanan Telepon Bergerak 100%	KTA Balige	6 BTS	2024	Operator Telekomunikasi
2.9.5	Layanan Telepon Bergerak 100%	KTA Muara	4 BTS	2024	Operator Telekomunikasi
2.9.6	Layanan Telepon Bergerak 100%	KTA Merek	3 BTS	2024	Operator Telekomunikasi
2.9.7	Pemenuhan 100% jaringan internet pita lebar (<i>broadband</i>)	KTA Parapat	9 lokasi	2024	PT Telekomunikasi Indonesia
2.9.8	Pemenuhan 100% jaringan internet pita lebar (<i>broadband</i>)	KTA Simanindo	7 lokasi	2024	PT Telekomunikasi Indonesia
2.9.9	Pemenuhan 100% jaringan internet pita lebar (<i>broadband</i>)	KTA Balige	8 lokasi	2024	PT Telekomunikasi Indonesia
2.9.10	Pemenuhan 100% jaringan internet pita lebar (<i>broadband</i>)	KTA Merek	1 lokasi	2024	PT Telekomunikasi Indonesia
2.9.11	Pekerjaan <i>Information Communication and Technology</i> (ICT)	Kawasan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Sibisa	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• PT. Telekomunikasi Indonesia• Operator Layanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3	KELOMPOK RENCANA AKSI PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN LOKAL/MASYARAKAT				
3.1	Dukungan penyelenggaraan <i>General Assembly Tourism Promotion Organization</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat	2 lumsum	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.2	Pelatihan dan sertifikasi SDM industri Pariwisata (PHRI, HPI, dan UMKM)	KTA Balige	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.3	Skema kerja sama antara industri dan lembaga pelatihan/pendidikan	DPN Danau Toba	2 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.4	Pengembangan produk Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat	2 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.5	Penerapan awal <i>digital tourism</i> dalam pengelolaan industri	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan	12 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara

• Kabupaten . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat			
3.6	Standardisasi akomodasi dan restoran	DPN Danau Toba	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara
3.7	Program kampanye sadar wisata (sosialisasi, pelatihan dan penyusunan proposal pengembangan desa wisata, serta pendampingan desa wisata)	KTA Balige	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.8 . . .

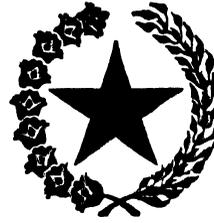


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 177 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.8	Pengembangan kurikulum sekolah dasar berbasis geologi, budaya, dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat	2 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.9	Edukasi publik berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara	16 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi● Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba● Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

● Kabupaten . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 178 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat			<ul style="list-style-type: none">● Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir● Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara● Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan● Dinas Pendidikan Kabupaten Karo● Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi● Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat

3.10 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.10	Kampanye kesadaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat	8 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan● Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.11 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.11	Survei kepuasan	DPN Danau Toba	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

• Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
					<ul style="list-style-type: none">• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo• Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
3.12	Penyelenggaraan <i>event</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat	16 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 182 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.13	Pemasaran dan citra	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat	3 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba• Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir• Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara• Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan• Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo• Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat

3.14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.14	Pengembangan manajemen dan regulasi Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Sumatera Utara • Kabupaten Toba • Kabupaten Simalungun • Kabupaten Samosir • Kabupaten Tapanuli Utara • Kabupaten Humbang Hasundutan • Kabupaten Karo • Kabupaten Dairi • Kabupaten Pakpak Bharat • Kawasan <i>Geopark</i> Kaldera Toba 	8 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pusat Statistik • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara • Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir • Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara • Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan • Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

• Dinas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
					<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat
3.15	Pengembangan gelanggang remaja dan <i>co-working space</i>	KTA Parapat	2 lumsum	2024	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun
3.16	Pengembangan wisata berbasis pendidikan (<i>edu-tourism</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Aek Nauli <i>Elephant Conservation Camp</i>• KTA Parapat	3 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.17	Pengembangan pusat cendera mata dan makanan, serta koperasi UMKM	KTA Parapat	1 kawasan bangunan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun
3.18	Pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Sibaganding	<ul style="list-style-type: none">• KTA Parapat-Dusun Panahatan• Desa Sibaganding (<i>Geosite D Sibaganding</i>)	4 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

• Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
					<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi• Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan• Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun• Patra Group
3.19	Pemajuan kebudayaan desa di sekitar Danau Toba	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Karo• Kabupaten Toba• Kabupaten Samosir• Kabupaten Dairi	5 desa	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.20	Pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Haranggaol	KTA Parapat-Desa Haranggaol (Geosite C Haranggaol)	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi• Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba

3.21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.21	Pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Ambarita-Tuktuk	KTA Simanindo-Desa Siallagan Pindaraya-Tomok Parsaoran-Tuktuk Siadong (Geosite P Ambarita-Tuktuk)	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba
3.22	Pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Simanindo-Batu Hoda	KTA Simanindo-Desa Cinta Dame-Simanindo Sangkal-Martoba (Geosite O Simanindo-Batu Hoda)	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba
3.23	Reaktivasi Pokdarwis dan pelatihan <i>homestay</i> di Desa Wisata Sibaganding, Haranggaol, Ambarita-Tuktuk, dan Simanindo-Batu Hoda	<ul style="list-style-type: none"> • KTA Parapat • KTA Simanindo 	4 paket	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.24	Reaktivasi Pokdarwis dan pelatihan <i>homestay</i> di Desa Wisata Lumban Pea, Parbaba, dan Huta Namora	<ul style="list-style-type: none"> • KTA Balige • KTA Pangururan 	3 paket	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.25	Pengembangan ekonomi lokal destinasi wisata super prioritas	<ul style="list-style-type: none">● Kabupaten Toba● Kabupaten Simalungun● Kabupaten Samosir● Kabupaten Tapanuli Utara● Kabupaten Humbang Hasundutan● Kabupaten Karo● Kabupaten Dairi● Kabupaten Pakpak Bharat	5 orang/desa / tahun, 300 koperasi, usaha kecil, dan menengah, 1000 wirausaha	2024	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3.26	Pembangunan penyelenggaraan <i>eco-camp</i> dan Aek Natonang	KTA Simanindo-Aek Natonang, Desa Tanjung	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">● Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif● Kementerian Lingkungan Hidup● Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir● Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir

3.27 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 188 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.27	Pengembangan gelanggang remaja dan <i>co-working space</i>	KTA Pangururan	lumlah (satu miliar rupiah /tahun)	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir • Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir
3.28	Pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Sidihoni	KTA Pangururan-Desa Huta Tinggi-Sabungan Nihuta (<i>Geosite N Huta Tinggi-Sidihoni</i>)	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba
3.29	Pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Pusuk Buhit	Desa Sianjur Mulamula-Sarimarihit (<i>Geosite M Pusuk Buhit</i>)	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba
3.30	Pengembangan <i>science techno park</i> /Museum IPTEK	<ul style="list-style-type: none"> • KTA Balige • Sub KTA Lumban Pea 	lumlah (satu miliar rupiah /tahun)	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba • Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

3.31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.31	Pengembangan gelanggang remaja dan <i>co-working space</i>	KTA Balige	lumlah (satu miliar rupiah /tahun)	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba • Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba
3.32	Pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Liang Sipege	KTA Balige-Desa Meat-Lumban Bulbul (<i>Geosite F Liang Sipege</i>)	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba
3.33	Pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Situmurun-Uluan	KTA Balige-Desa Hatinggian-Jonggi Nihuta (<i>Geosite G Situmurun-Uluan</i>)	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba
3.34	Pengembangan gelanggang remaja dan <i>co-working space</i>	KTA Merek	1 lumlah	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

3.35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.35	Pengembangan Desa Wisata Muara-Sibandang (Kreatif)	KTA Muara-Desa Papande-Sampuran-Sibandang-Bariba Nisek-Unte Mungkur (<i>Geosite</i> I Muara-Sibandang)	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi• Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba
3.36	Pengembangan dan Pendampingan Desa Wisata Huta Ginjang	KTA Muara-Desa Huta Ginjang (<i>Geosite</i> H Huta Ginjang)	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi• Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba
3.37	Pengembangan pusat informasi terpadu (TIC dan GIC)	KTA Muara-Bandar Udara Silangit	1 lumsum	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Utara

3.38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.38	Pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Sipinsur-Baktiraja	Desa Parulohan (<i>Geosite J Sipinsur-Baktiraja</i>), Kecamatan Lintong Nihuta	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi• Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba
3.39	Pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Bakkara-Tipang	Desa Tipang-Marbun Tonga-Marbun Toruan (<i>Geosite K Bakkara-Tipang</i>), Kecamatan Bakti Raja	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi• Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba
3.40	Pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Silalahi (Ulos)	Desa Silalahi I-Silalahi II-Paropo (<i>Geosite B Silahisabungan</i>), Kecamatan Silahisabungan	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi• Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kaldera Toba

3.41 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.41	Pengembangan agrowisata	• Kabupaten Pakpak Bharat	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat
3.42	Pengembangan wisata kopi	KTA Muara	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.43	Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan <i>sport tourism</i>	<ul style="list-style-type: none">• KTA Balige• KTA Parapat	2 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.44	Pelatihan di balai pelatihan vokasi dan produktivitas, serta balai latihan kerja	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara	2 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Ketenagakerjaan• Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara

• Kabupaten . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 193 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Humbang Hasundutan • Kabupaten Karo • Kabupaten Dairi • Kabupaten Pakpak Bharat 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba • Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Samosir • Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara • Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Humbang Hasundutan • Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dairi • Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat
3.45	Pendampingan UMKM Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Toba • Kabupaten Simalungun • Kabupaten Samosir 	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

• Kabupaten . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 194 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Tapanuli Utara • Kabupaten Humbang Hasundutan • Kabupaten Karo • Kabupaten Dairi • Kabupaten Pakpak Bharat 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun • Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Utara • Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan • Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi • Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pakpak Bharat
3.46	Pengembangan produk olahan komoditas unggulan melalui sentra industri kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Toba • Kabupaten Simalungun • Kabupaten Samosir • Kabupaten Tapanuli Utara 	8 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian • Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir • Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

• Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat			<ul style="list-style-type: none">• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Utara• Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo• Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi• Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pakpak Bharat
3.47	Pengembangan kawasan pariwisata kuliner berbasis olahan ikan	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi• Kabupaten Pakpak Bharat	8 lokasi	2024	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

3.4.8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
3.48	Pengembangan kapasitas usaha mikro berbasis kompetensi di bidang <i>digital marketing</i>	Kabupaten Samosir	30 orang	2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.49	Peningkatan literasi dan digitalisasi keuangan	Danau Toba	25 orang	2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.50	Pelatihan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro berbasis kompetensi bidang barista	Danau Toba	30 orang	2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.51	Pelatihan vokasional berbasis keterampilan	Danau Toba	30 orang	2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4	KELOMPOK RENCANA AKSI PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN EKONOMI YANG KONDUSIF				
4.1	Identifikasi aset-aset masyarakat untuk investasi	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Toba• Kabupaten Simalungun• Kabupaten Samosir• Kabupaten Tapanuli Utara• Kabupaten Humbang Hasundutan• Kabupaten Karo• Kabupaten Dairi	8 kabupaten	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

• Kabupaten . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 197 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
		● Kabupaten Pakpak Bharat			
4.2	Pembangunan sentra industri kecil dan menengah (IKM)	DPN Danau Toba	2 sentra IKM	2024	Kementerian Perindustrian
4.3	Pengadaan kapal wisata	Danau Toba	2 kapal wisata	2024	Investasi Swasta
4.4	Forum investasi Pariwisata	● Kabupaten Toba ● Kabupaten Simalungun ● Kabupaten Samosir ● Kabupaten Tapanuli Utara ● Kabupaten Humbang Hasundutan ● Kabupaten Karo ● Kabupaten Dairi ● Kabupaten Pakpak Bharat	1 kegiatan	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

4.5 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

NO.	KEGIATAN	LOKASI	TARGET (SATUAN)	TAHUN	PELAKSANA
4.5	Pengembangan peternakan sebagai destinasi wisata	<ul style="list-style-type: none">• Desa Parhosaran• Desa Tele, Kabupaten Samosir	1 objek wisata	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir
4.6	Forum investasi internasional	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	2024	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum, -



Silvanna Djaman